

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

GERAKAN ANTI JEPANG 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

THOMAS AQUINAS CAMAR S

NIM : 981314011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2005

SKRIPSI

GERAKAN ANTI JEPANG 1974

Oleh:

THOMAS AQUINAS CAMAR S

NIM: 981314011

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

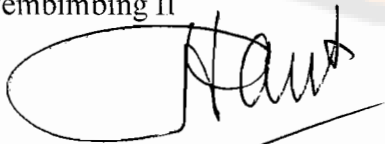


Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R. S.Th.

Tanggal

~~21~~9-2005

Pembimbing II



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

Tanggal

13-9-2005

SKRIPSI

GERAKAN ANTI JEPANG 1974

Dipersiapkan dan ditulis oleh
THOMAS AQUINAS CAMAR S
NIM: 981314011

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal: 21/9/2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R. S.Th.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd.

Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th.

Anggota : Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

Anggota : Drs. A. A. Padi

Yogyakarta, 21 / 9/2005

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. T. Sarkim M. Ed. Ph.D

Motto dan Persembahan

Ambisiku adalah menjadi orang yang bahagia

(Penelope Cruz, Aktris, 1974-...)

Berikanlah apa yang engkau punya selagi sempat

(Shania Twain, Penyanyi, 1965-...)

Tuhan akan memaafkanku. Itu sudah tugasnya.

(Heinrich Heine. Penyair. 1719-1856)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ♥ Tuhan Yesus Kristus
- ♥ Ayah dan Ibuku tercinta
- ♥ Kekasihku Vita Liniadewi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

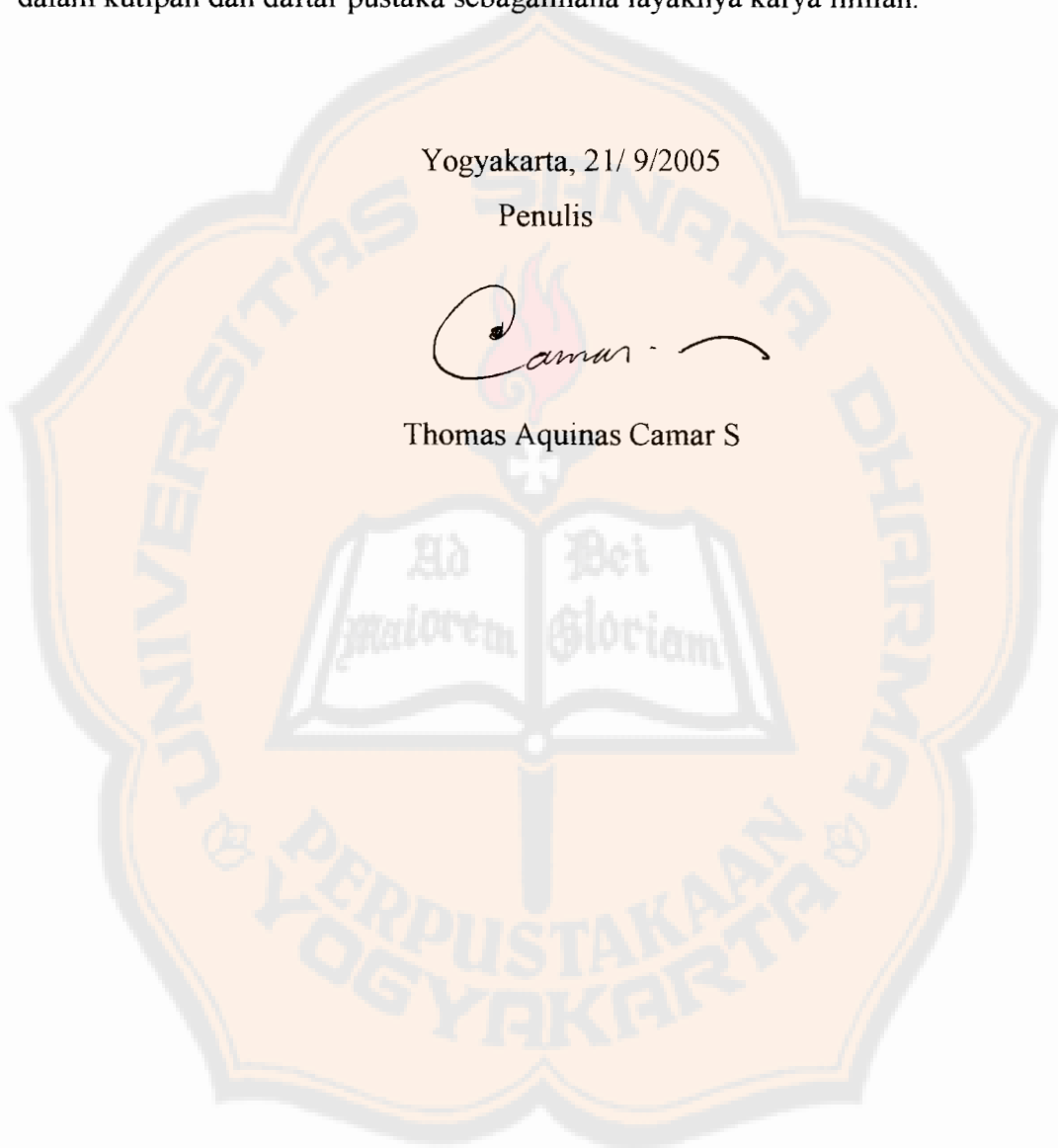
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 21/ 9/2005

Penulis



Thomas Aquinas Camar S



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

GERAKAN ANTI JEPANG 1974

OLEH: THOMAS AQUINAS CAMAR S

NIM : 981314011

Skripsi ini bertujuan untuk membahas tiga permasalahan. Pertama, latar belakang munculnya gerakan anti Jepang tahun 1974. Kedua, tentang proses terjadinya huru hara anti Jepang tahun 1974 di Jakarta. Dan ketiga, dampak huru hara anti Jepang tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode sejarah dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu: pertama, pengumpulan sumber (heuristik) diperoleh dari sumber kepustakaan dan kliping media cetak, kedua kritik sumber (verifikasi) dengan melakukan perbandingan antara sumber-sumber yang ada. Jika data telah menunjukkan kesesuaian maka dipilih sebagai sumber, ketiga interpretasi (penafsiran sumber) merupakan analisa data hasil verifikasi dan keempat historiografi (penulisan sejarah) untuk menyajikan hasil penelitian menjadi satu tulisan sejarah sehingga dapat mempermudah penyampaian peristiwa pada pembaca. Penulisan ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial seperti ekonomi, politik, dan sosiologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru selama 8 tahun (1966-1974) telah membentuk pemerintahan yang solid dan cenderung otoriter. Protes masyarakat terhadap strategi pembangunan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Orde Baru. Ketidakcocokan Pemerintah Orde Baru dan masyarakat menimbulkan konflik yang ditindaklanjuti dengan kekerasan yang merusak hubungan antara Negara dan Warga Negara dalam politik, ekonomi, dan sosial.

ABSTRACT

MOVEMENT OF ANTI JAPAN 1974

BY : THOMAS AQUINAS CAMAR S

NIM : 981314011

This script aim to study three problems. First, background is movement appearance anti Japan in 1974. Second, about process of the happening of riot of anti Japan in 1974 in Jakarta and third, affect riot of anti Japan for Indonesia.

Research method used in this skripsi of history method by using research stages; steps that is: is first: source gathering (characteristic) obtained from source of bibliography and media print; second, criticize source (verification) with conducting comparison of between existing sources if data have shown, hence be selected by as source; third, interpretasi (source interpretation) representing data analysis of result of verification, and fourth, historiography to present research result become one history article so that earnto water down the forwarding of event of atreader. This writing also use approach of social science of such aseconomics, political, and sociology.

Result of research indicate that government of new order of during 8 years (1966-1974) have formed government which solid and tend to authority. Protes society to development strategy of disagree with policy which have been specified by governmental of New Order. Governmental Incompatibility of new order andsocialize to generate conflict which acted by forc. Action ossify Government of New Order leave over effect of destroying relation of between State and Citizen in politics, economic, and social.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang telah melimpahkan anugerah, berkat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Gerakan Anti Jepang 1974”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial program studi pendidikan sejarah di Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini selesai tidak mungkin tanpa ada yang membimbing, mendukung, memberi bantuan dan perhatian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/ Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberi ijin atas penulisan skripsi ini dan membimbing penulis dalam tugas studi.
2. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.,S.Th. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing dan memberikan koreksi yang bersifat membangun sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing dan memberikan koreksi yang membangun hingga skripsi ini selesai dengan sempurna
4. Para dosen Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah banyak memberikan masukan sebagai bekal pengetahuan sebagai bekal pengetahuan dan bimbingan bagi penulis selama menempuh tugas belajar
5. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas pinjaman buku-buku dari sejak kuliah hingga selesainya skripsi ini
6. Seluruh karyawan Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membaca buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Romo Hasto Rosariyanto yang bersedia meminjamkan bahan-bahan bacaan di sela-sela kesibukannya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Teman-teman Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma dari berbagai angkatan yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
9. Teman-teman Mapasadha yang telah menemani penulis saat suka dan duka melewati hari-hari sulit

Penulis juga berterima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut membantu, namun tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dalam lembaran ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan kemurahan-Nya kepada pihak yang menolong tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima baik kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja yang menaruh minat terhadap masalah hubungan Indonesia dan Jepang.

Yogyakarta, 21/9/ 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan.....	18
G. Tinjauan Pustaka.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LATAR BELAKANG GERAKAN ANTI JEPANG.....	25
A. Dominasi Ekonomi Jepang di Indonesia.....	25
B. Rivalitas Elite Politik.....	33
C. Protes Masyarakat Terhadap Strategi Pembangunan.....	41
BAB III PROSES TERJADINYA HURU-HARA ANTI JEPANG 1974.....	49
A. Pertemuan Mahasiswa dan Presiden Suharto.....	49
B. Demonstrasi di Bandara Halim Perdanakusuma.....	51
C. Demonstrasi Menjadi Kerusuhan di Jalanan Jakarta.....	53
D. Usaha Mengatasi Kerusuhan.....	57

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV	DAMPAK HURU-HARA ANTI JEPANG 1974	61
	A. Pembredelan Pers	62
	B. Pergeseran Elite Politik	65
	C. Pembatasan Kebebasan Akademik	68
	D. Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan.....	70
	E. Hubungan Mahasiswa dan Militer Berakhir.....	73
BAB V	KESIMPULAN	76
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SILABUS	86
Lampiran 2	PETISI 24 OKTOBER 1973.....	90
Lampiran 3	Ikrar Warga Negara Indonesia	91
Lampiran 4	PIDATO PERNYATAAN DIRI MAHASISWA	92
Lampiran 5	TUNTUTAN MAHASISWA INDONESIA	102
Lampiran 6	DEKLARASI MAHASISWA INDONESIA	103
Lampiran 7	Pertemuan Presiden Soeharto dan Mahasiswa	104
Lampiran 8	Apel Siaga di Kampus Universitas Kristen Indonesia	105
Lampiran 9	Apel Siaga di Kampus Universitas Kristen Indonesia	106
Lampiran 10	Penyambutan Kedatangan PM Jepang Tanaka	107
Lampiran 11	Appel Mahasiswa di Universitas Indonesia	108
Lampiran 12	Pawai Massal 15 Januari 1974	109
Lampiran 13	Demo Mahasiswa di Jalan Thamrin	110
Lampiran 14	Hariman Siregar di Tengah Demonstrasi Mahasiswa	111
Lampiran 15	Aparat Keamanan di Kramat Raya	112
Lampiran 16	Mahasiswa Menurunkan Sang Saka Merah Putih	113
Lampiran 17	Demonstrasi di Sepanjang Jalan M.H. Thamrin	114
Lampiran 18	Demo Pelajar dan Pemuda di Pecenongan	115
Lampiran 19	Demonstrasi di Depan Kantor Toyota Astra	116
Lampiran 20	Kerusuhan di Depan Pertokoan Senen	117
Lampiran 21	Pertokoan Pasar Senen Setelah Pembakaran dan Perusakan	118
Lampiran 22	Gedung Toyota Astra Setelah Kerusuhan	119
Lampiran 23	Kerusuhan di Harmoni dan Jalan Ir. H. Juanda	120
Lampiran 24	Kerusuhan di Jalan Gajah Mada	121
Lampiran 25	Pangkopkamtib Jenderal Soemitro di Tengah Demonstran	122
Lampiran 26	Jenderal Panggabean Meninjau Daerah Kerusuhan	123
Lampiran 27	Ali Sadikin di Universitas Indonesia	124
Lampiran 28	Kerusuhan di Depan Universitas Indonesia	125
Lampiran 29	Peta Daerah Huru-Hara.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan negara kepulauan di ujung timur laut benua Asia dan sebelah utara kepulauan Indonesia dengan jarak 4.000 kilometer dengan luas wilayahnya hanya seperlima Indonesia.¹ Saat ini Jepang mampu menempatkan diri sebagai raksasa ekonomi dunia bersama Amerika Serikat. Keberhasilan negara berbentuk kekaisaran ini mencapai prestasi yang mengagumkan dalam ekonomi, industri, dan perdagangan menjadi pesaing bagi negara-negara maju. Jepang dengan kekuatan ekonominya berusaha berperan aktif dalam permasalahan internasional agar dapat mempertahankan kedudukan strategisnya di benua Asia.²

Masa lampau orang-orang Jepang datang ke Indonesia saat Bangsa Belanda melalui Kongsi Dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memonopoli perdagangan di Hindia Timur. Orang-orang Jepang bekerja sebagai tentara sewaan yang bertugas di Indonesia bagian timur bersama pasukan VOC untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah di kepulauan Maluku. Pasukan VOC berhasil menundukkan perlawanan orang Banda dan menangkap pemimpin rakyat Banda. VOC menjatuhkan hukuman mati pada pemimpin rakyat Banda dan serdadu sewaan

¹ Bambang Hasrinuksmo, *Ensiklopedi Nasional Indonesia 7*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991. hlm. 416.

² Thomas Shibata dan Charles G Cleaver, *Negara dan Bangsa 4*, (Jakarta: Grolier International, 1988) hlm.108.

Jepang yang diberi tugas memancing kepala mereka di atas geladak kapal Belanda yang berlabuh dekat kota Neira.³

Bangsa Indonesia serta sebagian besar bangsa-bangsa di Asia Timur dan Asia Tenggara mengenang Jepang sebagai negara yang pernah menjajah dengan kejam. Jepang memutuskan untuk terlibat dalam Perang Dunia II saat meletuskan Perang Pasifik yang mengakibatkan penderitaan ratusan juta manusia dari berbagai negara Asia. Jepang menjajah dan menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun dari tahun 1942 sampai tahun 1945 dengan mengambil alih kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Aksi Jepang melibatkan diri dalam Perang Dunia II diawali dengan menyerang Pearl Harbour, Hawaii, pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941.⁴ Amerika Serikat kehilangan kekuatan militer dalam jumlah besar antara lain 188 pesawat hancur, 159 pesawat rusak berat, 20 kapal hancur, dan 2.403 serdadu tewas serta 1.178 luka.⁵ Dengan hancurnya pertahanan Amerika Serikat di Pasifik maka Jepang dengan cepat memperluas ekspansinya ke daerah selatan meliputi Asia Tenggara dan Pasifik yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara sekutu seperti Perancis di Indocina, Inggris di Malaysia dan Singapura, Amerika Serikat di Philipina, Belanda di Indonesia, dan Australia yang membawahi Irian Timur sebagai daerah mandat.⁶

³ Mochtar Lubis, Pengantar "Pengalaman Indonesia dengan Jepang" dalam Taro Sakamoto (terj. Sylvia Tiwon), *Jepang Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982). hlm. vii.

⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988). hlm. 69.

⁵ Kecelakaan di Pearl Harbor, *Tempo*, 23 Februari 1985. hlm 44.

⁶ G. Moedjanto, *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kumpulan Karangan Sejarah*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003). hlm. 175

Jepang tidak memperoleh kesulitan berarti saat memasuki Indonesia untuk menguasai dan menduduki daerah yang telah 350 tahun dijajah bangsa Belanda. Pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang dengan penyerahan kekuasaan berlangsung di pangkalan Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, antara Letnan Jenderal Ter Poorten yang mewakili pihak Belanda dan Jenderal Imamura yang mewakili pihak Jepang.⁷ Bagi bangsa Indonesia, saat itulah akhir dari penjajahan Belanda dan awal pendudukan pemerintahan fasis militeristik Jepang.

Pemerintah militer Jepang berada di Indonesia untuk memenangkan perang melawan Sekutu pimpinan Amerika Serikat dan usaha yang ditempuh adalah membangun kekuatan ekonomi di daerah-daerah yang diduduki. Rakyat Indonesia dikerahkan Jepang secara sistematis pada usaha-usaha mendukung kegiatan-kegiatan militer dan ekonomi yang dibutuhkan militer Jepang.⁸

Jepang menghadapi keadaan Indonesia yang mempunyai daerah yang luas dengan wilayahnya yang kepulauan, masyarakat yang heterogen (serbaneka), dan pluralistik (majemuk) dan pemusatan penduduk ada di pulau Jawa. Rakyat Indonesia dipaksa mengikuti program-program yang diperkenalkan pemerintah pendudukan militer Jepang seperti Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) dan Putera yang bersifat politis, Peta (sukarelawan tentara pembela tanah air) dan Heiho (barisan cadangan prajurit) yang bersifat militer, Keibodan (barisan cadangan polisi – hansip), Seinendan (barisan pemuda – Pramuka), Jawa Hookookai (Gerakan Kebaktian Jawa), dan Romusa (barisan pekerja paksa) yang

⁷ *Ibid.* hlm. 173.

⁸ P.J. Suwarno, *Romusa, Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 1999). hlm. 3.

bersifat sosial-ekonomi.⁹ Program pemerintah Pendudukan militer Jepang yang dilakukan secara terselubung selain yang diselenggarakan secara terang-terangan adalah menyediakan wanita penghibur yang disebut Jugun Ianfu terdiri dari perempuan Bumiputra, warga keturunan Belanda, dan keturunan Cina. Kebijakan Jepang memberi pelayanan bagi tentaranya dalam memenuhi kebutuhan biologis seks bertujuan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan terhadap penduduk lokal oleh tentara Jepang dan menjaga moral pasukan Jepang serta mencegah tersebarnya penyakit kelamin.¹⁰

Dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pendudukan militer Jepang terhadap rakyat Indonesia, pengerahan massa dalam bentuk Romusa dan Jugun Ianfu membawa rakyat pada penderitaan dan kesengsaraan yang hebat. Perlakuan buruk yang diterima menggambarkan kekejaman yang sistematis dan terencana untuk mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik tanpa mengindahkan perikemanusiaan. Penindasan satu bangsa lain terus berlangsung bahkan berkembang dalam bentuknya yang paling vulgar dan sadis seperti pembunuhan massal, pengerahan tenaga rakyat dalam kerja paksa, kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia, dan penajatan bahan makanan yang kesemuanya terjadi di tanah airnya sendiri. Seluruh rakyat Indonesia diperlakukan seolah-olah seperti sampah atau barang yang bisa diboroskan di dalam peperangan. Dari rakyat jelata yang diperbudak dengan kerja paksa dan hasil bumi yang dirampas sampai kaum terpelajar yang dipaksa berdusta dan menipu rakyat sehingga merasakan genggamannya militerisme Jepang. Kesengsaraan lahir batin rakyat Indonesia dalam masa tiga

⁹ *Ibid.* hlm.4, dan G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 1*, hlm. 80-82.

¹⁰ *Tempo*, 25 Juli 1994. hlm.14.

setengah tahun boleh dikatakan tidak terbatas. Seluruh rakyat Indonesia dipaksa berbaris dan tahu menerima perintah secara militer. Sejarah keganasan Jepang yang tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja walaupun Jepang hanya datang seumur jagung namun akibat yang ditimbulkannya jauh lebih mengerikan dari yang ditimbulkan penjajah periode sebelumnya.¹¹

Upaya Sekutu menahan ekspansi Jepang di daerah Pasifik terlihat pada perebutan kembali pulau-pulau antara Australia dan Jepang sehingga mengancam kedudukan Jepang di Indonesia. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang menyatakan menyerah pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945.¹² Sejak itulah Perang Pasifik – Perang Dunia II di kawasan Asia berakhir dan dilanjutkan dengan tindakan negara-negara Sekutu menumpas militerisme dan imperialisme Jepang.

Pernyataan Jepang menyerah tanpa syarat memberi peluang kepada bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan tersebut.

Seperti halnya negara-negara yang kalah perang yaitu Jerman dan Italia, Jepang mengalami kehancuran di berbagai aspek dan memperoleh bantuan dari Amerika Serikat untuk membangun kembali negaranya. Pada tahun 1952, Jepang memperoleh kebebasan dan kemerdekaan memerintah negaranya sendiri dalam mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain terutama dalam perekonomian. Jepang mengembangkan teknologi dan industri yang menunjang

¹¹ A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan, Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997). hlm.13.

¹² G. Moedjanto, *op.cit.* hlm.86.

ekonomi hingga memperoleh kemandiriannya dan memperluas jangkauan ekonomi ke wilayah-wilayah di sekitarnya.

Sesudah Perang Dunia II, Jepang berangsur-angsur bangkit dari kehancuran ekonominya, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berusaha menuntut ganti rugi perang kepada Jepang. Tuntutan pampasan perang Indonesia yang diminta sebesar 17,5 milyar dollar tetapi jumlah yang diterima sebesar 223,08 juta dollar dibayar selama periode dua belas tahun dalam bentuk barang modal dan jasa.¹³ Indonesia yang pada awalnya menuntut pembayaran pampasan perang berubah menjadi peminta akibat tekanan Jepang yang memaksa Indonesia mau menerima jumlah yang lebih sedikit. Dalam hal ini, hubungan Indonesia dengan Jepang berubah menjadi hubungan ketergantungan karena kebutuhan Indonesia pada bantuan Jepang untuk mengelola sumber-sumber alam dan mengerjakan proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi, pengembangan tenaga, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan, dan jasa atau pelayanan.¹⁴

Pengusaha-pengusaha Jepang yang menyalurkan bantuan ke Indonesia telah menimbulkan akibat-akibat buruk dan sepenuhnya ditanggung oleh bangsa Indonesia saat terjadi kerusakan lingkungan dan penebangan hutan yang meluas. Kepentingan masyarakat Indonesia dan hak-haknya dikesampingkan untuk lebih mengutamakan kepentingan pengusaha Jepang dalam mencari keuntungan di Indonesia. Jepang memperoleh keleluasaan menggunakan lalu lintas pelayaran di Indonesia.

¹³ Mochtar Lubis, *op.cit.*, hlm.xi.

¹⁴ *Tempo*, 4 Oktober 1993, hlm.52.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto hubungan Indonesia dengan Jepang menjadi semakin erat karena orientasi pembangunan pada bidang ekonomi sangat menonjol. Pada tahun 1967, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal yang memberi peluang seluas-luasnya bagi masuknya Investasi Modal Asing termasuk di dalamnya modal asing dari Jepang.¹⁵ Modal Asing membantu pemerintah Indonesia mengatasi untuk sementara masalah kekurangan-kekurangan yang ada dalam tiga hal yaitu tenaga-tenaga ahli (human skills) dan teknologi, tabungan dalam negeri, dan devisa (valuta asing atau alat pembayaran luar negeri).¹⁶

Pada perkembangan selanjutnya, Jepang merupakan negara yang paling besar menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁷ Berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari perseorangan sampai masyarakat luas menjadi bidang usaha perusahaan-perusahaan Jepang.

Usaha-usaha Jepang untuk masuk ke berbagai sektor ekonomi, perdagangan, dan industri menimbulkan kesan agresif dibandingkan dengan penanam modal asing dari negara-negara lain. Agresivitas penanaman modal Jepang yang ditunjang oleh sikap mental untuk mau bekerja keras dan rajin sehingga dapat memenuhi kebutuhan orang banyak yang diyakini sebagai pekerjaan suci dan dihayati dengan sikap religius. Orang Jepang sangat menghormati seseorang dengan sikapnya terhadap kerja bersifat religius. Nilai itu hanya bisa diwujudkan dengan kerja produktif

¹⁵ K Gunadi, Penanaman Modal Asing dan Kesempatan Kerja, dalam *Prisma* 9, September 1976. hlm.18.

¹⁶ Strout, Alan M., Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dalam *Prisma* 1, Februari 1973. hlm. 55.

¹⁷ Negara setelah Jepang adalah Amerika Serikat, Hongkong, Australia, Jerman Barat, Belanda, dan Singapura, K Gunadi, *op.cit.*, hlm19.

sehingga membuat bangsa Jepang unggul sebagai pengrajin maupun sebagai pedagang.¹⁸

Kehadiran Jepang di Indonesia dengan maksud menanamkan modal bermacam bentuknya seperti bantuan luar negeri, pinjaman, dan kredit jangka panjang berbunga lunak¹⁹ telah menimbulkan kritik tajam yang ditujukan kepadanya terutama karena sikap proteksionis dan tertutup serta sering melakukan dumping dan bahkan dituduh melakukan manipulasi secara tidak sehat.²⁰ Posisi Indonesia semakin didominasi oleh penanaman modal di bidang-bidang yang sangat strategis sehingga Indonesia menempati posisi yang sangat lemah.²¹

Hubungan Indonesia dengan Jepang sampai pada suasana yang memburuk²² saat muncul aksi-aksi menolak kehadiran modal asing dari Jepang di Indonesia. Masyarakat Indonesia berusaha mengkritisi atau mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan dengan penanaman modal asing dari Jepang. Kalangan mahasiswa dan akademisi merupakan pemimpin-pemimpin yang menggerakkan kegiatan protes terhadap ketimpangan yang muncul akibat penyimpangan pengelolaan bantuan luar negeri Jepang. Di samping itu, ada ketidaksukaan masyarakat Indonesia terhadap tingkah laku orang Jepang yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasionalnya di Indonesia.

Usaha mengkritisi penanaman modal asing Jepang di Indonesia berkaitan dengan sentimen masa lalu bangsa Indonesia yang pahit semasa Perang Dunia II

¹⁸ M Dawam Raharjo, Zuhd-nya Pedagang Zen, dalam *Prisma* 5, Mei 1983. hlm.2.

¹⁹ Siti Daulah Wiratno, Bantuan Luar Negeri dalam Hubungan Indonesia-Jepang, dalam *Prospektif* 4, 1992. hlm.349.

²⁰ Pande Raja Silalahi, Penataan Kembali Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang: Suatu Tuntutan dan Kebutuhan, dalam *Prisma* 5, Mei 1983. hlm.3

²¹ *Ibid.*, hlm.6.

²² Sjahrir, Jepang-Indonesia: Gelombang Hubungan Pasang – Surut yang Permanen, dalam *Tempo*, 23 Juli 1988. hlm.100.

Jepang menguasai Indonesia menggunakan kekuatan militer. Setelah Indonesia merdeka, kekuatan ekonomi Jepang mendominasi dengan agresif perekonomian Indonesia. Protes yang dilancarkan oleh mahasiswa berkembang menjadi aksi anti Jepang didukung para akademisi untuk meninjau ulang pola hubungan Indonesia dengan Jepang berkaitan dengan pembangunan nasional.

Huru-hara anti Jepang yang terjadi pada tahun 1974 merupakan kerusuhan terbesar pada masa awal pemerintahan Jenderal Soeharto. Sejak saat itu, hubungan militer dan mahasiswa berakhir setelah mereka bekerja sama memaksa pemerintahan Presiden Soekarno turun dari jabatannya sebagai penguasa.

Dalam penelitian berjudul “Gerakan Anti Jepang 1974” dipandang sudah ada yang menulis dengan berbagai versi penyajiannya dan tulisan ini disusun untuk meninjau ulang berdasarkan sumber-sumber sesuai dengan perkembangan jaman. Penulis tertarik untuk menelusuri kembali sejarah gerakan pelajar-mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto di tahun-tahun awal kekuasaannya. Mengapa gerakan protes pelajar-mahasiswa dan pemuda gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan berkaitan strategi pembangunan nasional yang tergantung pada bantuan asing dan modal dari Jepang?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang Gerakan Anti Jepang 1974. Adapun masalah yang akan dikemukakan adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi munculnya gerakan anti Jepang tahun 1974?

2. Bagaimana dan siapa pelopor proses terjadinya gerakan anti Jepang tahun 1974 di Jakarta?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari gerakan anti Jepang tahun 1974?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan tentang Gerakan Anti Jepang 1974 ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsi dan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Gerakan Anti Jepang tahun 1974.
2. Mendeskripsi dan menganalisis bagaimana dan siapa pelopor proses terjadinya Gerakan Anti Jepang tahun 1974 di Jakarta.
3. Mendeskripsi dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari Gerakan Anti Jepang tahun 1974.

D. Manfaat Penulisan

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan anti Jepang, proses terjadinya gerakan anti Jepang, dan dampak yang ditimbulkan dari gerakan anti Jepang tahun 1974 bagi Indonesia dan Jepang.
2. Bagi penulis sendiri adalah sebagai syarat tugas akhir memperoleh gelar sarjana di Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah.

3. Bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, penulisan ini menambah informasi tentang sejarah nasional yang Indonesiasentris, khususnya tentang gerakan protes mahasiswa.
4. Manfaat secara praktik, bagi dunia pendidikan dengan penulisan ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi pada peserta didik dan pengajar tentang gerakan anti Jepang yang terjadi tahun 1974 sehingga dapat dipakai sebagai sumber atau acuan dalam pengajaran.

E. Kerangka Konseptual

Skripsi berjudul “Gerakan Anti Jepang, 1974” merupakan studi kasus sejarah yang terkait dengan sejarah ekonomi, politik, dan sosial, yang mengandung permasalahan-permasalahan yang telah disinggung sebelumnya. Guna mengkaji “Gerakan Anti Jepang 1974” diperlukan pemahaman tentang gerakan protes sebagai kegiatan politik. Gerakan protes masyarakat banyak dilakukan dengan demonstrasi atau unjuk rasa sehingga dalam penulisan ini aksi tersebut diuraikan pemahamannya lewat konsep-konsep ilmu politik. Dalam istilah ilmu politik, demonstrasi-protes atau unjuk rasa dikenal sebagai satu bentuk partisipasi politik. Menurut Gabriel A. Almond, unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi politik nonkonvensional. Ia membedakan dengan partisipasi politik konvensional seperti memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik

dan administratif.²³ Selain itu unjuk rasa dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik politik yang paling lunak di antara semua bentuk konflik yang mungkin terjadi. Bentuk konflik politik lain yang lebih keras adalah kerusuhan dan huru-hara, serangan bersenjata, dan pembunuhan dengan sebab politik. Unjuk rasa, dengan demikian merupakan ekspresi atau aktualisasi nilai dan kepentingan politik masyarakat yang dibenturkan dengan nilai dan kepentingan politik negara.²⁴

Unjuk rasa merupakan suatu bentuk ekspresi politik masyarakat yang semestinya diterima dan diakomodasikan dalam proses politik dan pemerintahan sehingga dapat dipandang sebagai wujud awal dari gerakan massa. Eric Hoffer mengidentifikasi gerakan massa sebagai gerakan yang dicirikan oleh: terbangkitnya kerelaan para anggotanya untuk berkorban, kecenderungan untuk bereaksi secara kompak, dimilikinya fanatisme, antusiasme, harapan, kebencian, intoleransi, kepercayaan buta dan kesetiaan tunggal, yang digerakkan oleh kaum frustrasi yang fanatik. Anggota gerakan massa diidentifikasi sebagai orang-orang yang tidak puas dan kecewa, yaitu mereka yang tersingkir dalam kehidupan, kelompok marjinal di tengah masyarakat, hingga kelompok minoritas yang tertekan.²⁵

Gerakan massa merupakan satu bentuk unjuk rasa massal yang memiliki soliditas sosial, politik, dan ideologi yang tinggi. Setiap anggota unjuk rasa digerakkan oleh kesamaan keyakinan, doktrin, fanatisme, dan kepemimpinan serta

²³ Gabriel A. Almond, Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik, dalam Mochtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996) hlm. 46-47

²⁴ Michael C. Hudson dan Charles Lewis Taylor, *World Handbook of Political and Social Indicators*, (New Haven and London: Yale University Press, 1972) hlm. 66

²⁵ Eric Hoffer (terj. Masri Maris), *Gerakan Massa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988) hlm. 25

melibatkan diri di dalamnya dengan kesadaran untuk berkorban atas nama perubahan.

Efektivitas unjuk rasa dan gerakan massa dapat dinilai dari derajat keberhasilannya dalam menghasilkan banyak kebijakan yang sejalan dengan tuntutan perubahan yang disuarakannya dan kemampuannya melakukan kontrol terhadap kinerja dan kebijakan negara. Unjuk rasa atau gerakan massa kerap disebut sebagai “parlemen jalanan” atau aktivitas ekstra parlemen” mengingat sifatnya yang menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan dari luar parlemen. Dalam konteks ini, unjuk rasa dan gerakan massa terlembagakan dalam proses politik dan pemerintahan yaitu institusi politik yang menempati posisi menentang terhadap kinerja negara yang tidak sejalan dengan nilai dan kepentingan masyarakat.²⁶

Pelajar-mahasiswa dan para pemuda yang menjadi simpatisannya merupakan pelaku utama gerakan protes terhadap dominasi ekonomi Jepang yang berupa barang-barang dan modal di Indonesia. Gerakan protes mahasiswa dalam *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa* karya Sarlito Wirawan Sarwono dirumuskan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menentang suatu kebijaksanaan yang dibuat oleh otoritas yaitu pimpinan universitas atau pemerintah.²⁷ Dalam gerakan ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah Republik Indonesia pimpinan Jenderal Soeharto dalam menerapkan politik pembangunan berkaitan dengan masalah penanaman modal asing yang begitu mengandalkan pihak asing terutama pengusaha

²⁶ R. Eep Saefulloh Fatah, *Unjuk Rasa, Gerakan Massa, dan Demokratisasi, Potret Pergeseran Politik Orde Baru*, dalam *Prisma 4*, April 1994. hlm. 6

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis Dalam Gerakan Protes Mahasiswa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.14.

Jepang beserta akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya.²⁸ Mahasiswa menggugat strategi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan pemerintah Orde Baru yang menimbulkan ketergantungan pada modal asing dan munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat.²⁹

Tujuan yang ingin dicapai gerakan protes mahasiswa, menurut Hariman Siregar, adalah adanya perubahan dalam sistem politik dan strategi pembangunan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaannya.³⁰ Beberapa kelompok masyarakat menggabungkan perjuangan politik dengan gerakan protes dan gerakan intelektual-ideologis oposisi, yang akan mengakibatkan perubahan revolusioner di bidang struktural, ekonomi, politik, sosial secara terpadu dan meluas di segenap aturan-aturan dasar interaksi sosial dan sumber-sumber kelembagaannya.³¹

Arief Budiman menyebut gerakan protes mahasiswa menggugat intervensi dan penjajahan baru Jepang di Indonesia dengan sebutan Gerakan Koreksi karena sifatnya yang melakukan kritik (dengan harapan akan ada perbaikan) terhadap suatu permasalahan. Gerakan ini tidak menuntut supaya pemerintah yang ada diganti melainkan meminta supaya pemerintah melakukan koreksi terhadap kebijakannya.³² Mahasiswa menggunakan peran pokok yang selalu mewarnai aktivitasnya yaitu sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta sebagai pencetus kesadaran masyarakat luas akan

²⁸ Rum Aly, *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia, 1970 – 1974*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm.282.

²⁹ Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.74.

³⁰ *Ibid.*, hlm.89.

³¹ S.N. Eisenstadt (terj. Chandra Johan), *Revolusi dan Transformasi Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 390-391

³² Arief Budiman, Pengantar “Mengkaji Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia” dalam Arief Budiman dan Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001), hlm.xxvii.

problema yang ada dan menumbuhkan kesadaran untuk menerima alternatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri sehingga masyarakat berubah ke arah kemajuan.³³

Dalam buku *Indonesia Abad Ke-20* karya G Moedjanto terbitan tahun 1988, Gerakan Anti Jepang disebutkan secara singkat sebagai wujud ketidakpuasan pelajar-mahasiswa atas adanya dominasi ekonomi oleh Jepang yang dirasakan sengaja membuat Indonesia tergantung kepadanya.³⁴ Atau dalam rumusan Okada Osamu, Gerakan Anti Jepang merupakan bentuk amarah penduduk Indonesia yang muncul karena serbuan barang-barang dan modal Jepang yang telah berlangsung dengan cepat sejak pemerintahan Jenderal Soeharto berkuasa.³⁵ Di samping itu dirasakan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang seperti perminyakan, perkayuan, dan perbankan memperlakukan pihak Indonesia secara tidak adil alias Jepang mau menang sendiri.³⁶ Keadaan tersebut membuat pelajar-mahasiswa di Jakarta tidak puas. Dengan demonstrasi-demonstrasi para mahasiswa mengungkapkan rasa benci yang mendalam terkandung dalam hati rakyat banyak terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang dengan cepat menguasai Indonesia dengan bekerja sama dengan elite lokal, kaum politisi, birokrat, dan perwira-perwira militer yang dengan keras menindas massa rakyat dan memaksa rakyat hidup dalam kemiskinan.³⁷

³³ Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan, dan Bangsa: Refleksi dan Gagasan Alternatif*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan LBH, 1989), hlm 8-9.

³⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 2, Dari Perang Kemerdekaan Pertama samapai Pelita III*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988) hlm. 159

³⁵ Okada Osamu, Ekspansi Ekonomi Jepang ke Asia Tenggara: Tinjauan Perdagangan Jepang dan Asean, dalam *Prisma 11*, November, 1979. hlm. 86

³⁶ G. Moedjanto, *loc.cit.*

³⁷ Okada Osamu, *op.cit.*, hlm. 87

Pemerintah Orde Baru menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dengan indikator GNP (Gross National Product) mengandalkan bantuan modal, teknologi, ketrampilan, dan pola manajemen yang didatangkan pemerintah dari negara-negara maju dan kaya seperti negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.³⁸ Sistem politik dan strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya menimbulkan problem sosial dalam masyarakat berkaitan dengan pemerataan dan keadilan sosial yang belum mencapai hasil nyata. Problem kesenjangan dan ketimpangan sosial seperti kota-desa, pusat-pinggiran, Jawa-luar-Jawa, menyertai kemiskinan massal, serta pengangguran yang mengiringi pertumbuhan ekonomi. Problem modal dan bantuan asing menimbulkan ketergantungan, terciptanya jarak antara modern-tradisional, formal-non-formal, dan kecenderungan tingkah laku penguasa/pejabat tinggi mengembangkan praktek kolusi ekonomi dalam menyalurkan modal dan bantuan asing. Kolusi ekonomi ini telah merugikan dan menyingkirkan pengusaha-pengusaha pribumi dalam mendapatkan aksesnya terhadap modal asing yang masuk Indonesia sehingga posisi pengusaha non-pribumi semakin menguat. Selain itu, hubungan pengusaha non pribumi dan penguasa melahirkan suap menyuap dan korupsi yang melibatkan sejumlah aparatur negara.³⁹

Di samping persoalan-persoalan ekonomi dan penyimpangannya, ada juga persoalan teknokrat yang menjadi perencana pembangunan. Cendekiawan Indonesia

³⁸ Adi Suryadi Culla. *op.cit.*, hlm.72 GNP-Gross National Product- Produk Nasional Bruto berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun yang dinilai dalam uang sebelum dikurangi penyusutan – T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm. 513

³⁹ Akhmad Zaini Abar, *1966-1974: Kisah Pers Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm191-193

mengemukakan kritik terhadap arah dan politik pembangunan yang ditempuh pemerintah Orde Baru untuk memperhatikan faktor-faktor non ekonomi, mengalokasikan modal asing dan teknologi modern bagi perluasan lapangan kerja, memberi peringatan akan kemungkinan buruk akibat dari masuknya perusahaan-perusahaan multinasional ke Indonesia, dan perlunya memprioritaskan pengusaha-pengusaha kecil dalam pembangunan ekonomi.⁴⁰

Pemerintah Orde Baru menganggap sistem politik dan strategi pembangunan yang dijalankan sudah tepat walaupun mendapat kritik dan protes dari berbagai pihak. Mahasiswa menggunakan dua cara untuk menekan pemerintah Orde Baru agar memperhatikan protes-protesnya. Pertama, mahasiswa menggunakan bentuk kegiatan yang tergolong membujuk seperti lobi, petisi, pernyataan pendapat, demonstrasi secara tertib, dan menulis di media massa. Kedua, mahasiswa menggunakan bentuk kegiatan yang tergolong paksaan seperti mengacaukan pekerjaan lembaga politik, menekan pejabat, mogok, boikot, melawan alat keamanan, dan pawai kekuatan massa yang disertai huru-hara dan menghalangi kelancaran kehidupan sehari-hari.⁴¹ Pers meliput seluruh kegiatan mahasiswa dalam medianya dan memuat opini redaksi dan masyarakat yang mendukung mahasiswa.⁴² Cendekiawan oposisi mengemukakan kritik terhadap arah dan politik pembangunan yang dijalankan pemerintah Orde Baru dalam jurnal ilmiah.⁴³

Gerakan anti Jepang mencapai puncak aksinya pada peristiwa Demonstrasi 14-15-16 Januari 1974 di Jakarta bertepatan dengan kunjungan tamu Perdana

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 197-198.

⁴¹ Arbi Sanit, *op. cit.*, hlm.105.

⁴² Akhmad Zaini Abar, *op.cit.*, hlm.195.

⁴³ *Ibid.*, hlm.196.

Menteri Jepang Kakuei Tanaka.⁴⁴ Penguasa dan mahasiswa mempunyai perbedaan yang tajam ketika pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa-pelajar dan pemuda memprotes intervensi dan penjajahan baru Jepang di Indonesia serta adanya kecenderungan penyimpangan politik oleh penguasa dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru.⁴⁵ Kejadian tersebut lebih dikenal sebagai Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 yang disingkat Malari saat demonstrasi besar oleh mahasiswa mengkritik tajam kebijakan ekonomi pemerintah berkembang menjadi kerusuhan sosial, huru-hara, aksi penjarahan, dan bakar-bakaran produk industri Jepang yang nyaris menghanguskan ibukota.

F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini bermanfaat untuk merekonstruksikan peristiwa masa lampau secara imajinatif dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Penelitian ini menyangkut tentang objek dokumentasi sejarah, oleh karena itu metode deskriptif analisis yang tepat untuk dipakai. Metode deskriptif itu sendiri diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatian kepada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.

⁴⁴ M. Panggabean (Menhankam – Pangab), *Peristiwa 14-15-16 Januari 1974 di Jakarta*, Siaran Khusus Nomor I, 22 Januari 1974 (Jakarta: Departemen Penerangan, 1974), hlm. 1.

⁴⁵ Ismed Hasan Putro, *Seutas Pandangan*, dalam Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm ix.

Menurut Louis Gottschalk ada empat tahap yang harus dijalani untuk merekonstruksikan suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan akhirnya penulisan.⁴⁶ Keempat tahap tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk memahami sumber data, dalam penelitian yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku pustaka, surat kabar, majalah, dokumen, ataupun publikasi lainnya yang bersifat primer atau sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Manfaat penelitian melalui penelusuran perpustakaan dan penelaahan kepustakaan adalah dapat mengungkapkan buah pikiran secara efektif, kritis, dan efisien.

Tahap kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan otentisitas sumber. Oleh karena itu kritik sumber merupakan uji data pada penelitian sejarah.⁴⁷ Kritik sumber ini terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan sumber, sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan meneliti bahan yang digunakan, sifat, dan jauh dekatnya dari peristiwa. Hasil dari kritik sumber adalah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi.

Tahap ketiga adalah interpretasi yang dilakukan setelah data diuji kebenarannya. Dalam tahap ini dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Oleh sebab itu diperlukan analisis yang benar-benar cermat dengan tujuan untuk mengurangi subjektivitas dalam kajian sejarah sebab sejarah dalam arti objektif jika diamati dan dimasukkan dalam pikiran subjektif tidak akan

⁴⁶ Louis Gottschalk (terjemahan Nugroho Notosusanto), *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm.33-40.

⁴⁷ *Ibid.* hlm.80-90. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.72 dan Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995) hlm.99.

pernah murni, tetapi telah diberi warna sesuai dengan kaca mata subjek.⁴⁸ Analisa dapat dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan sintesis dari tesis dan anti-tesis. Sintesis dalam hal ini adalah kemampuan menghasilkan ide-ide baru yang belum pernah dihasilkan oleh orang lain.

Tahap terakhir adalah penulisan yang merupakan suatu proses penyusunan kembali runtutan peristiwa berdasarkan data-data yang sudah diperoleh atau diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini akan ditampilkan bentuk penulisan yang bersifat deskriptif analisis sehingga merupakan rangkaian tulisan yang menceritakan sekaligus menganalisa terjadinya gerakan anti Jepang dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Republik Indonesia.

Penulisan tentang Gerakan Anti Jepang 1974 menggunakan pendekatan multi disipliner adalah pendekatan dua atau lebih disiplin ilmu yang saling berjalanan berdasarkan interaksional masing-masing. Pendekatan ini sering digunakan oleh para sejarawan. Titik berat penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan ekonomi digunakan dalam penulisan ini karena bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi Indonesia yang telah didominasi bantuan asing dan modal dari Jepang pemerintah Indonesia terlibat perjanjian ganti rugi perang sampai dibukanya penanaman modal asing di awal pemerintahan Orde Baru. Pendekatan sosial bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat Indonesia khususnya kalangan muda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda serta akademisi kampus dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masuknya modal asing Jepang. Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.62. Lihat juga Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.100.

kondisi politik pada khususnya para elite politik yang berada di sekeliling Presiden Soeharto. Para elite politik berusaha memperluas pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat agar kedudukan mereka disekitar pemegang kekuasaan tetap kuat. Melalui ketiga pendekatan disiplin ilmu tersebut maka diharapkan dapat menghasilkan karya penulisan yang bersifat deskriptif analisis. Dengan tiga pendekatan ekonomi, sosial, dan politik tersebut, bertujuan agar gejala-gejala sejarah dapat ditampilkan dan gambaran tentang peristiwa sejarah menjadi bulat dan menyeluruh sehingga dapat menghindari kesepihakan dan determinisme.⁴⁹

G. Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung penulisan ini adalah sumber-sumber yang berupa buku, surat kabar, dan majalah. Sumber-sumber yang digunakan mempunyai dua jenis sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi mata atau pelaku peristiwa dengan mata kepala sendiri menyaksikan dan mengetahui suatu peristiwa itu terjadi atau berupa dokumen resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata. Atau hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian dari seorang saksi. Akan tetapi dalam penulisan ini sumber yang digunakan bukan merupakan kesaksian secara langsung dari seorang pelaku dari suatu peristiwa melainkan suatu hasil karya yang ditulis oleh tokoh itu sendiri maupun orang lain yang menjadi topik penulisan ini.

⁴⁹ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.87

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini yang merupakan saksi mata dan pelaku langsung dari peristiwa tersebut seperti buku *Hati Nurani Seorang Demonstran* karya Hariman Siregar tentang pemikiran-pemikiran pelaku dan penjelasannya tentang kegiatan mahasiswa selama peristiwa berlangsung dan buku *Pikiran Politik Sjahrir* yang ditulis Sjahrir berisi pembelaan penulis dari tuduhan terlibat dalam mendalangi huru-hara Gerakan Anti Jepang 1974

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini merupakan sumber yang ditulis oleh penulis lain seperti misalnya *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74* karya Heru Cahyono diterbitkan Pustaka Sinar Harapan berisi penuturan Jenderal (Purn) Soemitro kepada penulis mengenai persaingan di kalangan militer selama peristiwa terjadi; buku karangan Marzuki Arifin berjudul *Peristiwa 15 Januari 1974* terbitan Publishing House Indonesia tentang masa-masa sebelum, selama, dan sesudah peristiwa kerusuhan anti Jepang 1974 menurut aktivis pers; buku karangan Rum Aly berjudul *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974* terbitan Penerbit Buku Kompas tentang dinamika gerakan mahasiswa di Jakarta dan Bandung dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru; buku karangan Francois Raillon berjudul *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966 – 1971* diterbitkan oleh Pustaka LP3ES Indonesia tahun 1985 berisi gerakan mahasiswa menjatuhkan Orde Lama dan mengkritisi Orde Baru; buku karangan Akhmad Zaini Abar berjudul *1966-1974: Kisah Pers Indonesia* diterbitkan oleh LKiS tahun 1995 berisi kronologi peliputan kritis mengenai opini masyarakat oleh pers, mahasiswa, dan cendekiawan

mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru; buku karangan Adi Suryadi Culla berjudul *Patah Tumbuh Hilang Berganti Sketsa Pergolukan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)* diterbitkan PT Raja Grafindo Persada tahun 1998 berisi kronologi perjuangan pergerakan mahasiswa pada masa Hindia Belanda sampai tumbanginya rezim militer pimpinan Jenderal Suharto; buku karangan Sritua Arief dan Adi Sasono berjudul *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri, dan Ekonomi Indonesia* diterbitkan LSP dan UI Press tahun 1987 berisi strategi pemerintahan Orde Baru untuk memperoleh dana dan pengelolaannya di lapangan; dan buku karangan Tahiro berjudul *Sepak Terjang Jepang di Indonesia* diterbitkan Lembaga Humaniora tahun 2003 berisi tentang strategi Jepang untuk menguasai perdagangan dan penanaman modal yang ada di Indonesia sampai memperoleh keuntungan sebesar-besarnya serta reaksi penduduk lokal terhadap kiprah mereka di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang Gerakan Anti Jepang 1974 maka tulisan ini terdiri dari beberapa bab yang akan menjelaskan masalah-masalah pokok. Sistematika penulisan yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan pendekatan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gerakan anti Jepang 1974. Dalam bab ini akan dibahas faktor ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi munculnya gerakan anti Jepang.

Bab III merupakan penjelasan tentang proses terjadinya gerakan anti Jepang pada tahun 1974. Dalam bab ini akan memuat tentang tahap-tahap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dan pemuda untuk menyatakan ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah Orde Baru

Bab IV merupakan penjelasan tentang dampak dari terjadinya gerakan anti Jepang bagi struktur pemerintahan, perkembangan pers, pendidikan, dan kegiatan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang.

Bab V berisi Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan.

Demikianlah pendahuluan penulisan skripsi ini yang akan menjelaskan tentang “Gerakan Anti Jepang, 1974”, untuk selanjutnya dalam skripsi ini akan dibahas Latar Belakang Gerakan Anti Jepang sampai dampak yang ditimbulkannya.



BAB II

LATAR BELAKANG GERAKAN ANTI JEPANG

A. Dominasi Ekonomi Jepang di Indonesia

Jepang menyerah kalah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945⁵⁰ dan menandatangani pengakuan kekalahan tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Tokyo.⁵¹ Jepang harus melepaskan kembali daerah pendudukannya pada negara-negara Barat yang tergabung dalam blok Sekutu.

Amerika Serikat – pemimpin Blok Sekutu – menduduki Jepang sejak 2 September 1945 – 28 April 1952⁵². Jenderal Douglas MacArthur memimpin pemerintah pendudukan Amerika Serikat (Supreme Commander of the Allied Power) yang menjalankan politik pembendungan komunisme di Asia⁵³.

Selama tujuh tahun pendudukan Sekutu, Jepang memperoleh perlindungan ekonomi, militer, dan politik dari Amerika Serikat. Kampanye Sekutu menangkal penyebaran komunisme di Asia didukung sepenuhnya oleh Jepang dengan potensi yang dimilikinya. Amerika Serikat mempengaruhi Jepang untuk membantu negara-negara yang baru merdeka agar mereka bisa diajak bekerja sama secara aktif dalam berbagai bidang karena perekonomian Jepang sangat tergantung pada Amerika

⁵⁰ G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20. *ibid.* hlm. 96

⁵¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia 7, *op.cit.*, hlm. 419

⁵² Masashi Nishihara (terj. Dean Praty R). *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang: Hubungan Indonesia Jepang, 1951-1966* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). hlm. 47

⁵³ Siti Daulah Wiratno, *op. cit.* hlm. 355.

Serikat setelah kekalahannya pada Perang Asia Timur Raya⁵⁴. Amerika Serikat menginginkan negara-negara baru di Asia tetap non komunis.

Pemulihan perekonomian Jepang dipengaruhi oleh meletusnya Perang Korea tahun 1950 di semenanjung Korea untuk membendung pengaruh komunisme di daerah tersebut⁵⁵. Jepang mendapat permintaan perolehan khusus dari angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan militernya. Pada tahun 1951, Jepang telah menanam investasi dalam pembangunan pengolahan biji di Goa, India, yang merupakan investasi pertama di luar negeri⁵⁶.

Pemerintah Jepang ikut campur dalam kegiatan ekonomi lewat Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (Ministry of International Trade and Industry – MITI). Lembaga ini mempunyai peran besar dalam pembangunan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing internasional serta melampaui ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat dalam waktu yang sesingkat mungkin⁵⁷.

Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri bekerjasama dengan sektor swasta khususnya dalam membangun industri strategis yang sangat kompetitif. Hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta meliputi akses selektif bagi perusahaan manufaktur untuk memperoleh pendanaan yang dijamin oleh pemerintah, pembebasan pajak tertentu, koordinasi investasi oleh pemerintah selama masa sulit, bantuan pemerintah dalam komersialisasi dan penjualan produk perusahaan, dan bantuan pemerintah kepada industri yang mengalami kemunduran⁵⁸.

⁵⁴ Masashi Nishihara, *op.cit.*, hlm. 12

⁵⁵ Okada Osamu, *op. cit.* hlm. 83

⁵⁶ Okada Osamu, *loc. cit.*

⁵⁷ Thee Kian Wie, *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru: Esai-esai.* (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2004). hlm. 265

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 267

Jepang memperluas perekonomiannya saat tahun 1954 mulai menandatangani serangkaian perjanjian pampasan (ganti rugi) perang dengan negara-negara Asia Tenggara⁵⁹. Jepang menyelesaikan perundingan dengan Myanmar pada tahun 1954, Filipina tahun 1956, Indonesia tahun 1958, dan Vietnam Selatan tahun 1959⁶⁰.

Perundingan pampasan perang antara Jepang dan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1951 yang merupakan upaya menebus perilaku Jepang di masa Perang Asia Timur Raya⁶¹. Pemerintah Jepang melalui dana pampasan berusaha mendukung rezim Sukarno dan menjalin hubungan diplomatik tahun 1958. Selain dana pampasan perang, Jepang juga mengusahakan masuknya investasi modal swasta dan memberikan kredit impor dengan pembayaran yang ditanggihkan ke Indonesia⁶².

Citra sebuah negara Indonesia, dengan kehidupan ekonomi yang mantap dan kebijakan yang bersifat non komunis merupakan dasar dukungan Jepang terhadap pemerintahan Presiden Soekarno⁶³. Walaupun di Indonesia, masih ada ketidakstabilan politik dan sentimen orang asing yang menghalangi investasi asing ke Indonesia dan Jepang masih kekurangan modal usaha untuk berinvestasi karena perekonomiannya memerlukan waktu untuk pulih. Ketidakstabilan politik di Indonesia nampak pada upaya pemisahan diri regional, kemiskinan ekonomi, konflik kepemimpinan sipil – militer, kegagalan menerima konstitusi baru, dan pemilihan umum yang berkepanjangan⁶⁴. Jepang begitu yakin bahwa Soekarno merupakan

⁵⁹ Okada Osamu, *op. cit.* hlm 83.

⁶⁰ Masashi Nishihara, *op. cit.* hlm. 81

⁶¹ *Ibid.* hlm 15

⁶² *Ibid.* hlm 263

⁶³ *Ibid.* hlm 272

⁶⁴ *Ibid.* hlm 78

satu-satunya pemimpin berkharisma yang dapat mempertahankan persatuan politik di dalam masyarakat Indonesia yang sangat heterogen⁶⁵.

Daya tarik Indonesia bagi kegiatan perdagangan Jepang adalah kekayaan alam Indonesia khususnya minyak bumi, lokasi geopolitik yang strategis, pasaran ekspor yang potensial, dan tersedianya tenaga kerja yang murah. Minyak dari Indonesia mempunyai kadar belerang rendah sehingga dapat digunakan oleh industri dan kendaraan bermotor tanpa menimbulkan pencemaran udara yang berlebihan di daerah industri dan perkotaan Jepang. Posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara merupakan rute pelayaran kapal-kapal pengangkut minyak dari Timur Tengah ke Jepang melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan⁶⁶.

Selama periode perundingan dan pembayaran pampasan perang, Jepang mengambil keuntungan untuk mengembangkan perdagangannya⁶⁷. Pampasan perang yang semula dimaksudkan untuk menebus perilaku Jepang di masa Perang Asia Timur Raya justru dimanfaatkan untuk mempromosikan ekspor-eksportnya⁶⁸.

Proyek pembangunan sarana transportasi dan industri berat membutuhkan baja yang hanya dapat dihasilkan Jepang dengan cara mengimpor bijih besi dan bahan mentah lainnya⁶⁹. Impor Jepang terhadap bahan mentah Indonesia akan memajukan perekonomian Indonesia dengan sarana modal dan teknologi Jepang⁷⁰.

Distribusi dana pampasan dan pinjaman yang dijamin dengan dana pampasan meliputi pengembangan Sungai Brantas dan Sungai Kanan di Jawa Timur,

⁶⁵ *Ibid.* hlm 263

⁶⁶ *Ibid.* hlm 12 & hlm 27, Okada Osamu, *op. cit.* hlm 85

⁶⁷ Masashi Nishihara. *op.cit.* hlm 85

⁶⁸ *Ibid.* hlm 15

⁶⁹ *Ibid.* hlm 120

⁷⁰ *Ibid.* hlm 61

pembangunan jembatan di sungai Musi - Sumatera Selatan, Galangan Kapal, Proyek-proyek industri berat (mesin dan kapal), proyek-proyek industri ringan (pabrik kertas, kayu lapis, penenunan dan pemintalan, karet, semen), barang-barang konsumtif, industri jasa yang berupa pembangunan hotel (Jakarta, Pelabuhan Ratu, Yogyakarta, Bali), pembangunan toko serba ada Sarinah, gedung-gedung perkantoran, penyaluran beasiswa untuk pelajar Indonesia dalam program pelatihan dan pendidikan, dan membiayai misi delegasi pampasan serta jasa lain-lain⁷¹. Jepang juga mendapat kelonggaran menggunakan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka untuk impor minyak Jepang dari Timur Tengah, menangkap ikan di laut Jawa, memegang izin penebangan pohon di Kalimantan dan Sumatra serta membangun pengeboran minyak di Sumatra dan di lepas pantai Jawa dan Kalimantan⁷².

Bagi Jepang, suplai barang pampasan perang menghasilkan permintaan positif terhadap produksi dalam negeri Jepang, asalkan permintaan tersebut tidak bertentangan dengan arus ekspor normal ke negara penuntut karena pemerintah Jepang menyuplai bisnis Jepang dengan semua dana yang dibutuhkan. Pembayaran pampasan perang merangsang produksi dalam negeri di Jepang yang akan menimbulkan terjadinya transaksi maupun menambah ekspor Jepang ke Indonesia⁷³.

Namun sebaliknya bagi Indonesia, secara keseluruhan proyek-proyek pampasan perang mengandung lebih banyak aspek negatif dibanding positifnya kalau dilihat dari segi ekonomi. Banyak proyek yang tidak menerima dana yang cukup

⁷¹ *Ibid.* hlm 116-117

⁷² *Ibid.* hlm 288

⁷³ *Ibid.* hlm 121

untuk menyelesaikannya disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Indonesia akibatnya proyek-proyek lain dihentikan setelah Desember 1965 karena kurangnya dana⁷⁴.

Selama pertengahan tahun 1960-an, Jepang mulai diakui sebagai kekuatan ekonomi yang penting di Asia.⁷⁵ Hal yang berbeda terjadi di Indonesia, gejolak sosial dan politik melanda masyarakat setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Jakarta. Perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban dari kejadian tersebut dan Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai pelaku utamanya. Peralihan pemimpin nasional dari Ir. Soekarno ke Jenderal Soeharto mengikuti persaingan kekuatan-kekuatan politik dominan di Indonesia.

Jenderal Soeharto sebagai pemegang kepemimpinan nasional menemui keadaan ekonomi yang buruk warisan dari pemerintahan sebelumnya semenjak penunjukan oleh MPRS untuk menjabat presiden tanggal 12 Maret 1967. Pemerintahan Soekarno menggunakan kekayaan negara untuk tujuan politik sehingga menimbulkan krisis ekonomi dan keuangan ditambah dengan krisis sistem ekonomi karena mengabaikan pembangunan ekonomi.⁷⁶

Presiden Soeharto mengutamakan pembangunan ekonomi selama pemerintahannya didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan ahli ekonomi dari Universitas Indonesia. ABRI berperan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri agar perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan. Pakar ekonomi atau teknokrat yang tidak mewakili golongan apapun dan

⁷⁴ *Ibid.* hlm 124

⁷⁵ Prijono Tjiptoherjanto, MNC Jepang dan Perusahaan Negara di Asia Tenggara, dalam *Prisma* 7, Juli 1983. hlm.41

⁷⁶ Lukman Siahaan, Satu Dasawarsa Bantuan Luar Negeri di Indonesia, dalam *Prisma* 4, April 1977, hlm29-30

tidak berpolitik diperlukan keahliannya untuk mengelola birokrasi-birokrasi ekonomi.⁷⁷

Jepang memprakarsai pertemuan beberapa negara kreditor untuk membantu keuangan Indonesia pada September 1966 di Tokyo. Pertemuan ini berlanjut pada pertemuan di Paris bulan Desember 1966 dan Amsterdam bulan Februari 1967 membahas pengaturan kembali hutang-hutang Indonesia yang sudah jatuh tempo dan pembentukan Inter-Governmental Group Indonesia (IGGI), sebuah konsorsium negara-negara kreditor bagi Indonesia. Jepang merupakan pemberi bantuan terbesar dalam IGGI.⁷⁸

Sejak tahun 1967, pemerintah telah memberi kesempatan yang luas bagi penanaman modal asing dari negara-negara maju dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu, stabilitas politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing untuk menunjang pembangunan ekonomi.⁷⁹

Jepang menanamkan modal di Indonesia untuk berbagai bidang seperti perbankan, industri, asuransi, lembaga kredit, real estat/ perumahan, perusahaan dagang, dan perusahaan perkapalan.⁸⁰ Penanaman modal asing Jepang dikelola oleh perusahaan-perusahaan multinasional Jepang sebagai wujud kerjasama negara dan dunia usaha swasta secara langsung di Indonesia.

Jepang menyadari adanya keterbatasan di dalam negeri seperti adanya kekurangan tenaga kerja dan naiknya upah tenaga kerja lokal, pengawasan polusi

⁷⁷ Hero U. Kuntjoro-Jakti, Dampak Pembangunan di Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia: Tinjauan Ekonomi-Politik Internasional, dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 14 1993.

⁷⁸ Lukman Siahaan, *op.cit.* hlm.30

⁷⁹ Winarno Zein, Motivasi Penanaman Modal, dalam *Tempo*, 1 Agustus 1992. hlm. 96

⁸⁰ Prijono Tjiptoherijanto, *op.cit.* hlm.42

yang disebabkan masalah energi dan pengotoran lingkungan, dan kurangnya sumber-sumber alam. Jepang terdorong untuk meluaskan usaha dagang dan industri ke luar negeri sekaligus memindahkan pabrik-pabrik yang menghasilkan polusi dan memerlukan banyak energi, bahan baku, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Jepang tetap memiliki dan menggalakkan industri yang bernilai tambah tinggi dan memusatkan pada industri yang mempergunakan teknologi tinggi. Industri kelas kecil dan menengah yang tingkat memprosesnya rendah dan teknologinya dianggap telah usang serta menyerap banyak tenaga kerja dipindahkan ke Asia Tenggara dan sebagian besar ada di Indonesia.⁸¹

Pada umumnya porsi terbesar Penanaman Modal Asing Jepang dialokasikan di sektor pertambangan sedang di peringkat kedua di sektor kehutanan/perkayuan dan industri pengolahan (manufaktur).⁸² Kapasitas dan produk industri dalam negeri mengalami peningkatan pesat selama akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an mengiringi pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan multinasional Jepang yang menonjol dalam kegiatan perdagangan dan industri di Indonesia antara lain Mitsui, Mitsubishi, Nisho Iwai, Marubeni – Iida, Sumitomo, C-Itoh, Ataka, Toyomenka, Nichimen, Kanematsu Goshu, dan beberapa perusahaan pengolahan seperti Toyota, Sony, Hitachi, Honda, Yamaha, Daihatsu, Sharp, Toshiba, dan Sanyo. Perusahaan tersebut bersaing satu sama lain untuk

⁸¹ Hero U Kuntjoro-Jakti, *Pertumbuhan Jepang dan Setelah Menjadi Kaya: Ke Arah "Peran Internasional" yang Mana?*, dalam *Prisma* 3, Maret 1981. hlm.47

⁸² Mudrajad Kuncoro, *Dampak Arus Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik*, dalam *Prisma* 9 September 1989, hlm.35 Industri diartikan sebagai bentuk kegiatan manusia yang meningkatkan nilai guna dari bahan atau barang dengan mengerahkan inovasi teknologi, ketrampilan fisik, modal, sumber-sumber alam, peralatan, perkakas, dan mesin-mesin – dikutip dari Frans Mardi Hartanto dan Filino Harahap, *Beberapa Aspek Peranan Industri Dalam Pembangunan Regional*, dalam *Prisma* 2 Februari 1972. hlm.10.

mendapatkan pasarnya dengan berbagai tehnik dagang misalnya promosi lewat iklan, kemudahan membeli, dan keunggulan teknologi.⁸³

Kehadiran perusahaan multinasional Jepang membaaur dengan pengusaha nasional berskala kecil dan sedang dalam usaha patungan.⁸⁴ Pengusaha Jepang berusaha mempergunakan kemampuan pengusaha setempat dalam peninjauan lokasi, mencari tanah bangunan, menaksir biaya konstruksi, pengadaan bahan mentah, memperoleh tenaga kerja, mengupayakan kapasitas produksi, dan pemasaran hasil produksi di negara tuan rumah.⁸⁵ Pengusaha Jepang selain memiliki modal, berwenang mengelola seluruh proses industri seperti seleksi dan keseimbangan material, teknologi pabrik, manajemen produksi, pengadaan bahan, logistik, kontrol mutu, inspeksi dan sertifikasi serta pengujian dan analisis.⁸⁶ Tidak banyak yang bisa dilakukan rekanan Indonesia dalam hubungan perdagangannya dengan rekanan Jepang karena kekuatan tawar menawar yang lemah sehingga perusahaan multinasional Jepang mampu mendikte rekanan lokal dan memanfaatkan pajak serta hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara tuan rumah.⁸⁷

B. Rivalitas Elite Politik

Pemerintah Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto merupakan orde ekonomi dan orde pembangunan yang asas utamanya adalah kestabilan dan ketentraman.⁸⁸

⁸³ J Panglaykim, Pengaruh Resesi Terhadap MNC, dalam *Prisma* 3, Maret 1983. hlm.43

⁸⁴ Mayling Oey, Organisasi Perusahaan Jepang: Suatu Analisa Sosiologis, dalam *Prisma* 5, Mei 1983. hlm.44

⁸⁵ Prijono Tjiptoherijanto, *op.cit.* hlm.46

⁸⁶ *Ibid*, Hlm.48

⁸⁷ Thee Kian Wie, Menyingkap Peranan Modal Jepang, dalam *Prisma* 7, Juli 1983. hlm.38

⁸⁸ M.Sadli, Widjojo di Tengah Upaya Penyelesaian Krisis Ekonomi, dalam *Tempo* 10 Juni 2001. hlm.122

Stabilisasi politik dan keamanan Orde Baru diciptakan dengan inisiatif Jenderal Soeharto membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 3 Oktober 1965 setelah memperoleh mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban yang amat terganggu pasca Peristiwa Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (G30S/ PKI) serta kegiatan-kegiatan ekstrem dan subversi lainnya.⁸⁹ Sesuai dengan perkembangan, fungsi Kopkamtib diperluas yaitu menjaga kewibawaan pemerintah dan aparatnya dari pusat sampai daerah, mengamankan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, dan mengamankan pembangunan.⁹⁰ Kopkamtib memiliki wewenang tugas yang begitu besar dan luas seperti menangkap tanpa prosedur biasa dan menggerakkan kekuatan militer untuk menangkal setiap gerakan yang bisa mengganggu stabilitas misalnya kerusuhan rasial, teror dari kelompok ekstem kanan, dan gerakan-gerakan protes. Jenderal Soeharto menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) sampai tahun 1969 kemudian digantikan Jenderal Maraden Panggabean (1969-1971) lalu Jenderal Soemitro (1971-1974).

Untuk memulihkan birokrasi dan struktur politik, Jenderal Soeharto membentuk Staf Pribadi pada tanggal 25 Juli 1966. Lembaga ini mempunyai anggota yang ditunjuk berdasarkan kesetiaan kesatuan militer saat bertugas bersama di masa sebelumnya.⁹¹ Perwira militer yang mengemban tugas membantu Jenderal Soeharto antara lain Alamsyah Ratu Prawiranegara (Koordinator Staf Pribadi), Ali Moertopo (Urusan Intelijen Luar Negeri), Yoga Soegama (Urusan Intelijen Dalam Negeri),

⁸⁹ *Tempo*, 17 September 1988. hal.27

⁹⁰ Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 63

⁹¹ Michael Sean Malley, Soedjono Hoemardani dan Orde Baru: Aspri Presiden Bidang Ekonomi, 1966-1974, dalam *Edisi Khusus Prisma 1971-1991*. hlm.120.

Soedjono Hoemardani (Urusan Ekonomi), Surjo Wiryohadiputro (Urusan Keuangan), Sudharmono (Urusan Umum), Slamet Danudirdjo (Urusan Pembangunan), Nawawi Alif (Urusan Media Massa), Sunarso (Urusan Politik), Usman (Urusan Gerakan Massa), Abdul Kadir Prawiraatmaja (Urusan Kesejahteraan Sosial), dan Jusuf Singadikane (Urusan Proyek-proyek Nasional).⁹² Staf Pribadi bertugas memberi nasehat kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera dalam bidang-bidang yang ditangani dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri.⁹³ Presiden Soeharto membubarkan Staf Pribadi bulan Juni 1968 disebabkan oleh kritik pers dan mahasiswa menyoroti aktivitas beberapa staf pribadi dalam bisnis komersial.⁹⁴ Presiden Soeharto membentuk Asisten Pribadi Presiden RI menggantikan Staf Pribadi dengan anggotanya Ali Moertopo menangani Bidang Politik, Soedjono Hoemardani (Ekonomi dan Perdagangan), Surjo Wiryohadiputro (Keuangan), dan Tjokropranolo (Pengamanan Presiden).⁹⁵

Akademisi-ahli ekonomi dari Universitas Indonesia memperoleh tugas mengelola ekonomi yang kacau dengan program rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan dan alat-alat produksi dari kehancuran. Widjojo Nitisastro bersama para teknokrat seperti Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Soebroto, Emil Salim, J.B. Sumarlin mempunyai peranan dalam stabilisasi keuangan dengan melaksanakan kebijaksanaan uang ketat yaitu tidak membuat proyek-proyek baru, tidak mengeluarkan biaya besar-besaran untuk

⁹² *Ibid.*, hlm. 112

⁹³ *Ibid.*, hlm. 110

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 112

⁹⁵ Budiarto Shambazy, Tiga Puluh Tahun Tragedi Malari, *Kompas*, 17 Januari 2004.

investasi atau penggantian alat-alat produksi.⁹⁶ Asas-asas ekonomi yang diterapkan pembantu-penasehat ekonomi Jenderal Soeharto adalah pertama mekanisme pasar lebih diandalkan daripada investasi langsung pemerintah; dan kedua membuka hubungan dengan negara luar untuk menarik bantuan serta modal asing. Di dalam negeri, prioritas diberikan kepada rehabilitasi infrastruktur, pengendalian inflasi, dan penyediaan sandang, pangan serta papan. Sektor produksi yang ditangani oleh pemerintah adalah bidang pertanian untuk mencapai swasembada beras, dengan mengutamakan bibit unggul, pupuk, dan obat pembasmi hama, rehabilitasi irigasi, kredit murah, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan desa.

Kelompok-kelompok di sekeliling Presiden Soeharto mempunyai kepentingan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya mendampingi kepala negara. Lembaga yang satu dengan lainnya sangat berpotensi berbenturan dan bersaing sehingga menimbulkan saling curiga dan prasangka untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar di depan atasan.

Selain lembaga-lembaga negara di atas, Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) merupakan organisasi pelengkap dalam posisinya membantu Presiden.⁹⁷ Bakin membantu Presiden dalam hal menentukan kebijaksanaan pemerintah di bidang intelijen dan pengamanan pelaksanaannya, dengan menjalankan fungsi antara lain: mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan oleh badan-badan intelijen di luar Bakin, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui rapat-rapat koordinasi.⁹⁸ Pada

⁹⁶ Frans Meak Parera, *Ketokohan Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Reformator Budaya dan Perintis Orde Baru*, dalam *Edisi Khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991*. hlm 69

⁹⁷ Tahiro, *Sepak Terjang Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Humaniora, 2003), hlm.143

⁹⁸ Ensiklopedi Nasional Indonesia 3, *op.cit.*, hlm.19

masa awal Orde Baru, Bakin dipimpin oleh Yoga Soegama kemudian diteruskan oleh Sutopo Juwono sampai tahun 1974.

Perebutan pengaruh disekitar penguasa Orde Baru nampak pada kelompok menteri teknokrat dan beberapa Jenderal diantaranya Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dengan kelompok yang dipimpin oleh Asisten Pribadi Presiden RI seperti Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soedjono Hoemardani dalam menentukan strategi pembangunan nasional. Kelompok pertama menginginkan koreksi terhadap cara-cara pembangunan yang telah diterapkan pada masa awal Orde Baru sedangkan kelompok kedua berusaha menerapkan cara pembangunan dengan bantuan luar negeri terutama dari Jepang.⁹⁹

Di kalangan ahli ekonomi terdapat perbedaan pokok mengenai pembangunan yang harus ditempuh oleh pemerintah Orde Baru. Teknokrat yang membantu pemerintah mengupayakan negara dapat mencapai taraf perkembangan perekonomian yang pesat dengan mengerahkan segala kebijaksanaan dan masa kepada satu atau beberapa perusahaan multinasional berbentuk konglomerat internasional yang bergerak di berbagai bidang mulai dari penciptaan rencana perekonomiannya sampai pencarian modal dan pemasaran ekspor. Ahli ekonomi yang berasal dari kampus menginginkan negara dapat mengambil sikap dimana segala perekonomian akan dilaksanakan hanya oleh swadaya dan pembiayaan sendiri, dengan pengertian bahwa laju perkembangan ekonomi tidak akan pesat.¹⁰⁰

⁹⁹ François Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974* (Jakarta: LP3ES, 1984) hlm.92

¹⁰⁰ H.S. Kartadjoemena, *Multinational Corporation, Kebebasan Nasional dan Transformasi Sistem Hubungan Internasional dalam Prisma No.1 Tahun II Februari 1973*. hlm.27

Persaingan diantara para pembantu Presiden Soeharto nampak jelas dalam kasus rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah tahun 1972.¹⁰¹ Sebuah rencana yang dikemukakan Ibu Tien Soeharto, istri Presiden, setelah mengunjungi negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Gagasan Ibu Tien Soeharto dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan kepentingan negara mengingat biayanya yang terlampau mahal dan tidak jelas cara memperolehnya yaitu berdasarkan anggaran negara atau proyek swasta sepenuhnya.¹⁰² Untuk melaksanakan idenya, Ibu Tien Soeharto mencari berbagai dana, terutama meminta kepada beberapa instansi resmi untuk memberikan sumbangan sukarela. Hal ini dilakukan saat Presiden meminta berbagai pihak mengurangi pengeluaran yang tidak perlu karena pemerintah masih sangat membutuhkan dana untuk menopang pembangunan ekonomi yang tengah menjadi fokus perhatian.¹⁰³

Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Asisten Pribadi Presiden RI Bidang Politik Jenderal Ali Moertopo menjadi sorotan utama isu perebutan pengaruh di kalangan kekuasaan tahun 1973. Kewenangan Jenderal Soemitro dalam menjalankan tugasnya dianggap telah menggeser peranan Jenderal Ali Moertopo sebagai pembantu terdekat Presiden sejak tahun 1966 di samping adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas kenegaraan di antara kedua pejabat tersebut.¹⁰⁴

Selain menjabat Asisten Pribadi Presiden RI, Ali Moertopo mempunyai posisi di Bakin sebagai Deputy bidang penggalangan di bawah kewenangan Sutopo

¹⁰¹ Rum Aly, *op.cit.*, hlm.359

¹⁰² Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998). hlm.144

¹⁰³ François Raillon, *op.cit.* hlm.95

¹⁰⁴ Tahiro, *op.cit.*, hlm.143

Juwono dan memimpin lembaga Operasi Khusus (Opsus).¹⁰⁵ Jabatan yang diemban tersebut tidak mempunyai kejelasan karena sebagai bagian dari Bakin harus bertanggung jawab pada ketuanya sedangkan tugas-tugas sebagai Asisten Pribadi Presiden RI dan komandan Opsus tanggung jawab langsung pada Presiden.

Kapasitas Ali Moertopo sebagai pembantu Presiden didukung oleh lembaga studi bernama Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dengan konsepnya tertuang dalam buku *Dasar-Dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*, terbit tahun 1972.¹⁰⁶ CSIS berfungsi sebagai dapur pemikiran pengembangan konsepsi-konsepsi dan wawasan, serta membentuk kader sekaligus bertugas menyelesaikan masalah-masalah strategis dan operasional.¹⁰⁷ Konsep pembangunan yang diajukan Ali Moertopo bersama CSIS merupakan strategi ekonomi jangka panjang saat tim teknokrat sedang memfokuskan pada penyelamatan ekonomi guna menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang menjadi peninggalan pemerintah sebelumnya. Konsep Akselerasi Modernisasi diterima oleh pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan pada tim teknokrat sehingga beban pekerjaan yang harus diemban bertambah.¹⁰⁸

Ketidacocokan antara Soemitro dan Ali Moertopo berkaitan juga dengan arah keprofesionalan ABRI. Soemitro berpandangan bahwa ABRI sedapat mungkin meninggalkan peran-peran sipil yang tidak ada hubungannya dengan aspek

¹⁰⁵ Bakin meliputi beberapa staf yaitu Ali Moertopo di bidang penggalangan, Soeprapto (keamanan), Nicklany Sudarjo (luar dan dalam negeri), Hernowo Asmanu (pendidikan), dan Junus Samosir (analisa laporan). Opsus merupakan intelijen tidak resmi yang dibentuk di bawah naungan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pimpinan Jenderal Soeharto semasa Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia tahun 1964. Tugas Ali Moertopo di Opsus membantu menyelesaikan masalah konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa Orde Baru Opsus menjalankan tugas untuk kepentingan pemimpin negara dan pemimpin organisasi. Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm.68-69, 280-281

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.5

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.10

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.6

pertahanan negara. Sebaliknya Ali Moertopo merumuskan fungsi ABRI yang tangkas dan ulet untuk mengerjakan apa saja yang telah ditugaskan kepadanya, termasuk tugas yang tidak ada hubungannya dengan aspek pertahanan negara.

Kelompok mahasiswa menentang kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi karena keberpihakan pada industri kecil – tradisional yang umumnya dikelola oleh mayoritas masyarakat.¹⁰⁹ Tindakan pemerintah membuka penanaman modal asing untuk mengarahkan dan mempercepat masuknya modal, teknologi, dan pengalaman manajemen membawa konsekuensi pada perlindungan terhadap pengembangan industri berskala besar dan padat modal.

Mahasiswa sebagai kekuatan pembawa kontrol dalam masyarakat memperlihatkan keragu-raguan terhadap pemerintah Orde Baru untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan nasional. Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pimpinan Hariman Siregar menempatkan posisi terdepan pengawasan sosial didukung oleh perguruan tinggi di ibukota dan kota-kota besar lainnya.

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan golongan militer bersama teknokrat, birokrat, dan pengusaha harus menghadapi aksi-aksi spontan dan radikal mencerminkan perasaan masyarakat yang gelisah dan frustrasi akibat dampak negatif pembangunan. Hubungan pemerintah dan mahasiswa menjadi bertentangan dan saling curiga setelah pada masa sebelumnya bekerja sama menjatuhkan pemerintah rezim Soekarno tahun 1965-1966. Mahasiswa berada pada pihak oposisi untuk mengingatkan partner lama mereka: militer, tentang penyimpangan yang terjadi seperti pemborosan, korupsi, demokrasi, dan sandiwara politik. Ditambah lagi,

¹⁰⁹ Hero Kuntjoro-Jakti, *Dampak Pembangunan, op.cit.*, hlm. 78

muncul gugatan terhadap lembaga Kopkamtib dan Aspri Presiden RI berkaitan dengan wewenang tugas yang tidak jelas.

C. Protes Masyarakat Terhadap Strategi Pembangunan

Kehadiran ekonomi Jepang di Indonesia mempunyai potensi kembar yaitu meningkatkan stabilitas politik dan meningkatkan ketidakstabilan politik sejak pemerintah Orde Baru membuka penanaman modal asing tahun 1967.¹¹⁰ Kemampuan Jepang menanamkan investasinya dalam jumlah paling besar dibandingkan negara-negara lain merupakan bantuan yang positif bagi pembangunan nasional. Namun, kelompok tertentu dalam masyarakat seperti pemuda, mahasiswa, intelektual, dan politisi mengkritik kehadiran penanaman modal Jepang yang dianggap hanya mencari keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial masyarakat Indonesia.¹¹¹

Masyarakat Indonesia menginginkan proyek penanaman modal asing dalam bidang industri mewujudkan adanya pemerataan pendapatan, padat karya, dan terjadi proses pengalihan teknologi bagi negara tuan rumah.¹¹² Selain pengembangan masyarakat di luar pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan seperti pelayanan kesehatan, perumahan, perbaikan kualitas pendidikan, semangat kebangsaan, hubungan antar umat beragama dan dinamikanya, dan aspek-aspek sosial-budaya.¹¹³

¹¹⁰ Toru Yano, Dimensi Keamanan dalam Hubungan Jepang – ASEAN dalam *Prisma* 8, Agustus 1982. hlm.44

¹¹¹ Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992). hlm.14

¹¹² Sutomo Roesnadi, Dilema Ketergantungan, Pengalihan Teknologi, dan Disiplin Nasional Dunia Ketiga, dalam *Prisma* 5, Mei 1979. hlm 38-39

¹¹³ Suhadi Mangkusuwondo, Faktor-faktor non-ekonomi Dalam Penentuan Sasaran dan Cara Pendekatan Pembangunan, dalam *Prisma* 1, November 1971. hlm 17

Bantuan luar negeri¹¹⁴ dan penanaman modal asing menimbulkan ketergantungan antara penerima dengan pemberi bantuan. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan langsung karena sebagian besar tinggal di desa dan berkecimpung di sektor pertanian sedangkan bantuan luar negeri dan penanaman modal asing digunakan pada sektor pertambangan, kehutanan (perkayuan), dan industri (manufaktur-pengolahan). Pengangguran di pedesaan muncul sebagai akibat kemerosotan pengembangan sektor pertanian yang kekurangan sumber biaya dan menciptakan urbanisasi.¹¹⁵

Strategi pembangunan yang dikembangkan sejak tahun 1967 menimbulkan kenaikan pesat dalam ketimpangan pendapatan maupun jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan.¹¹⁶ Lapisan masyarakat yang kurang memiliki ketrampilan, pendidikan, modal, kemampuan menyerap teknologi yang lebih maju telah tersisih dalam proses pembangunan.¹¹⁷

Perusahaan-perusahaan pribumi yang bergerak di bidang pertekstilan, batik, dan makanan mengalami kebangkrutan sebab harus bersaing dengan perusahaan asing yang bermodal besar, teknologi modern, organisasi yang rapi, dan kemampuan

¹¹⁴ Bantuan luar negeri sebagai terjemahan foreign aids mengandung konotasi bahwa hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri yang diperoleh negara, diberikan dalam bentuk pinjaman lunak (soft loan) mengingat lemahnya kekuatan modal, bersumber dari tindakan-tindakan penduduk atau lembaga-lembaga terhadap penduduk atau lembaga lainnya dengan tujuan menolong, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi jarak jurang pemisah antara negara-negara maju dan negara sedang berkembang. Soeharsono Sagir, Bantuan Luar Negeri Dalam Pembangunan Indonesia, *Prisma* 3, Maret 1981. hlm.54-55

¹¹⁵ Dorodjatun Kuntjoro – Jakti, Mau Kemana Kita Dengan Pembangunan Ekonomi Ini? dalam *Prisma* 10, November 1978. hlm.13

¹¹⁶ Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi Indonesia di Bawah Pemerintahan Orde Baru, dalam *Masyarakat Indonesia* Tahun-IX, No.1, 1982. hlm.116

¹¹⁷ Adi Sasono, Tesis Ketergantungan Dan Kasus Indonesia, dalam *Prisma* 12, Desember 1980. hlm.76

mendominasi pasar.¹¹⁸ Begitu juga pengusaha lokal yang menggabungkan modalnya bersama pengusaha asing, peranan mereka meliputi urusan-urusan sepele dan digunakan sebagai alat untuk membuka investasi asing di Indonesia.

Penanaman modal Jepang yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional berusaha memonopoli pasaran dalam negeri dengan agresif sehingga julukan binatang ekonomi melekat pada pelaku ekonomi dari Jepang. Sebagian besar investasi Jepang bergerak di bidang industri pengolahan-manufaktur bekerja sama dengan pengusaha lokal dan penguasa setempat. Pulau Jawa – khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat – merupakan daerah yang menjadi pusat kegiatan industri dan usaha perdagangan karena dekat dengan pasar, infrastruktur, dan fasilitas kota bagi staf asingnya.¹¹⁹

Tenaga kerja lokal yang bekerja untuk perusahaan Jepang diperlakukan berbeda dibandingkan staf asing (orang Jepang). Perusahaan Jepang menampilkan etos kebersamaan, stabilitas, dan keseragaman yang menuntut loyalitas dan disiplin terhadap karyawan, tidak memberikan posisi, tanggung jawab, keputusan strategis pada tenaga kerja setempat serta sistem penggajian yang belum memadai.¹²⁰

Pendekatan pengusaha Jepang melalui pejabat setempat menggunakan cara-cara yang membuka peluang terjadinya penyimpangan seperti korupsi lewat berbagai komisi, suap menyuap, dan berbagai hadiah. Pemerintah beserta aparatnya memberikan pelayanan optimal dalam mengembangkan kegiatan investasi seperti

¹¹⁸ Dochak Latief, *Kenyataan Operasinya Modal Asing di Indonesia dan Demokrasi Ekonomi*, dalam *Informasi* No.2 Th.X 1980. hlm.39

¹¹⁹ Thee Kian Wie, *Menyingkap Peranan Modal Jepang*, *op.cit.*, hlm.32. Daerah di luar Jawa dibuka usaha pertambangan, penebangan kayu bulat/log, dan penangkapan ikan di laut lepas oleh nelayan Jepang, hasil yang diperoleh dibawa ke Jepang untuk diolah menjadi bahan baku.

¹²⁰ Rum Aly, *op.cit.*, hlm 13

proses pengalihan fungsi tanah dari budidaya maupun hunian menjadi fungsi industri di lahan milik penduduk.

Alih fungsi tanah menyebabkan konflik tanah dan menurunkan kualitas tanah karena penggusuran dan pembukaan – eksploitasi hutan.¹²¹ Penduduk yang kehilangan tanahnya mendapat ganti rugi tanah atau uang yang tidak mencukupi kebutuhan karena pentingnya tanah pekarangan bagi penduduk kurang efisien menggunakan uang akibatnya mata pencaharian beralih dari petani menjadi buruh kasar.¹²²

Di daerah industri, pekerja setempat berbaur dengan pekerja yang datang dari luar daerah menimbulkan persaingan, iri hati, dan tindak kriminal. Masyarakat menghadapi kecemasan antara harapan untuk memperbaiki nasib dan sumber kehidupan serta jumlah industri yang besar telah mengurangi kualitas lingkungan sehingga kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan penghuninya juga merosot.¹²³

Perasaan anti Jepang berawal bulan April 1973 saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka dengan politik luar negerinya aktif merambah pasar luar negeri.¹²⁴ Politik luar negeri yang diterapkan adalah penggalakkan kerja sama dengan negara-negara kurang maju termasuk usaha menstabilkan harga dan suplai energi serta program restrukturisasi.¹²⁵ Kebijakan pemerintah Tanaka membantu pihak swasta

¹²¹ Rio Rachwartono, Masalah Pembangunan Dan Lingkungan: Haruskah Dipertentangkan Satu Sama Lain? dalam *Prisma* No. 1, November 1971. hlm.27

¹²² Otto Soemarwoto, Pengaruh Lingkungan Proyek Pembangunan, dalam *Prisma* 3, Juni 1975. hlm.77-78

¹²³ Otto Soemarwoto, *loc.cit.*

¹²⁴ Rum Aly, *op.cit.*, hlm.294

¹²⁵ Hero U Kuntjoro-Jakti, Kepentingan Jepang di dalam Pembangunan Industri Orde Baru, dalam *Prisma* 9, 1988. hlm.60

mengekspor barang-barang hasil pabrik Jepang, menghindarkan hambatan-hambatan dagang yang ditujukan terhadap ekspor Jepang, dengan menguasai surplus perdagangan, desakan dari luar atas Jepang untuk membebaskan politik impornya sendiri dapat dikurangi, lebih gampang memperoleh bahan mentah di negara tuan rumah, menghindari tenaga kerja yang lebih mahal di Jepang, industri berat dengan dampak lingkungan bisa dipindahkan keluar Jepang.¹²⁶

Pada tanggal 26-28 Maret 1973, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan seminar Jepang – Indonesia bertema Pembangunan Bangsa di Jakarta. Saat Tahi Bonar Simatupang menanggapi makalah Harsya W Bachtiar mengenai negara kesatuan dan gagasan negara federasi, ilmuwan Jepang bernama Sinichi Ichimura mencemooh keanekaragaman etnis, suku, dan budaya yang ada di Indonesia dengan mengatakan orang Jawa harus menghentikan mengeksploitasi orang bukan Jawa. Salah seorang peserta seminar, Fuad Hasan, menolak anggapan Sinichi Ichimura dan mengatakan bahwa sebenarnya orang Jepanglah yang mengeksploitasi orang Indonesia.¹²⁷

Harsya W Bachtiar dan Fuad Hasan mengungkapkan kejadian tersebut kepada pers. Reaksi masyarakat menunjukkan ketersinggungan sehingga sentimen anti Jepang berkembang dalam bentuk salah paham dan saling curiga antara orang Jepang dan Indonesia.

Gerakan mahasiswa memprotes strategi pembangunan pemerintah Orde Baru mendapat momentum dari luar maupun dalam negeri. Gerakan mahasiswa Thailand memberi inspirasi saat mampu memaksa PM Thanom Kittikachorn mengundurkan

¹²⁶ Prijono Tjiptoherijanto, Penanaman Modal Jepang di Asia Tenggara, dalam *Prisma 11*, November 1981. hlm.51

¹²⁷ Rum Aly, *op.cit.*, hlm.295

diri dari jabatannya Oktober 1973. Thanom Kittikachorn seorang Marsekal Udara tidak tahan menerima tekanan mahasiswa berkaitan dengan dominasi barang-barang dan modal Jepang di Thailand. Dari dalam negeri, mahasiswa menyambut kedatangan Menteri Kerja Sama Belanda Jan Pieter Pronk sebagai Ketua IGGI – badan yang mengatur bantuan internasional untuk Indonesia – ke Jakarta 11 November 1973 dengan demonstrasi anti modal asing.¹²⁸

Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM UI) menyelenggarakan diskusi pada tanggal 24 Oktober 1973 di aula Fakultas Ekonomi UI.¹²⁹ Diskusi bertema “Apa yang Menjadi Motivasi Bangkitnya Gerakan Pemuda” – “Peranan Generasi Muda Dewasa Ini” menghadirkan pembicara Sudiro mewakili angkatan ’28, Adam Malik dan BM Diah mewakili angkatan ’45, Cosmas Batubara dan Hariman Siregar mewakili angkatan ’66 dan generasi post-1966.¹³⁰ Setelah diskusi, mahasiswa berziarah ke Makam Pahlawan Kalibata dan membacakan “Petisi 24 Oktober 1973” mengenai kepincangan dalam pembagian hasil pembangunan, perkosaan hukum, merajalelanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, membumbungnya harga barang-barang, dan pengangguran.¹³¹ (lampiran 2)

Pada tanggal 30 November 1973, Balai Budaya Jakarta menyelenggarakan diskusi bertajuk “Untung Rugi Modal Asing”. Diskusi ini menghadirkan pembicara Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Maruli Panggabean, Mohammad Hatta, Suhadi Mangkusuwondo, dan Yap Thiam Hien dengan moderator Mochtar Lubis sebagai

¹²⁸ François Raillon, *op.cit.*, hlm. 104

¹²⁹ Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, *op.cit.*, hlm. 136

¹³⁰ Marzuki Arifin, *Peristiwa 15 Januari 1974*, (Jakarta: Publishing House Indonesia, 1974), hlm.102

¹³¹ Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm. 137

tuan rumah.¹³² Dalam diskusi dikemukakan ketidakpuasan terhadap modal asing beserta teknologi yang digunakan karena tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan bangsa Indonesia.¹³³ Pada akhir pertemuan, para intelektual, budayawan, dan mahasiswa menandatangani sebuah pernyataan “Ikrar Warga Negara Indonesia” yang berjanji akan mengembalikan kebanggaan nasional. (lampiran 3) Diantara tokoh-tokoh yang menandatangani ikrar tersebut adalah Adnan Buyung Nasution, Mochtar Lubis, Yap Thiam Hien, Juwono Sudarsono, Marsilam Simanjuntak, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Louis Wangge, dan Hariman Siregar.¹³⁴

Presiden Soeharto menanggapi kegiatan kampus-kampus mengkritisi arah pembangunan nasional dengan menugaskan Pangkoptik Jendral Soemitro mengunjungi kampus-kampus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur sedangkan kampus-kampus Jakarta berada di bawah pengawasan Wapangkoptik Laksamana Soedomo. Jendral Soemitro berdialog dengan mahasiswa mengenai kebijaksanaan pemerintah. Pada kesempatan ini, Pangkoptik melontarkan gagasan mengenai pola kepemimpinan nasional yaitu “Komunikasai Dua Arah” dan “Pola Kepemimpinan Baru”.¹³⁵

Di akhir tahun 1973, DM UI menyelenggarakan tirakatan menyambut Tahun Baru di halaman Fakultas Kedokteran UI, Salemba. Mahasiswa menampilkan ekspresi keprihatinan, Hariman Siregar selaku tuan rumah menyampaikan pidato pernyataan diri. Pidato tersebut menyerukan agar mahasiswa berani bersikap dan bergerak untuk mewujudkan pendapat-pendapatnya. Selain itu, ia juga mengajak

¹³² Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 324-325

¹³³ *Ibid.*, hlm. 326

¹³⁴ *Ibid.*, hlm.324

¹³⁵ Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm.115

unsur-unsur di luar mahasiswa – kampus bergerak menuntut kesejahteraan.¹³⁶
(lampiran 4)

Tirakatan dihadiri oleh mahasiswa Jakarta, Bogor, dan Bandung merupakan kebersamaan yang terakhir dilakukan diantara aktivis kampus. Pada saat yang sama, Tirakatan diselenggarakan oleh mahasiswa Yogyakarta dari Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Insititut Agama Islam Negeri. Mahasiswa Jakarta dan luar Jakarta mempunyai kepentingan berbeda dalam aksi-aksi memprotes strategi pembangunan pemerintah Orde Baru.

¹³⁶ Rum Aly, *op.cit.*, hlm 346-347

BAB III

PROSES TERJADINYA HURU-HARA ANTI JEPANG 1974

A. Pertemuan Mahasiswa dan Presiden Soeharto

Gerakan protes mahasiswa yang dilakukan di Jakarta bulan Desember 1973 ditujukan langsung kepada Presiden Soeharto. Gabungan Mahasiswa Jakarta, Bogor, dan Bandung berdemonstrasi ke kantor Presiden, Gedung Bina Graha dan ke kediaman Presiden, Jalan Cendana 8 untuk menyampaikan tuntutan berdialog dengan Presiden Suharto. Kepala Negara menyanggupi tuntutan mahasiswa untuk berdialog tanggal 11 Januari 1974 di kantor Presiden, Bina Graha dalam pertemuan tertutup dan terbatas.¹³⁷

Isu yang berkembang di awal tahun 1974 di antara pejabat tinggi pembantu Presiden Soeharto terdapat persaingan untuk mencapai jabatan tertinggi pimpinan nasional. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Asisten Pribadi Presiden bidang politik Mayjen Ali Moertopo dikaitkan dengan isu tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban dan pembantu terdekat Presiden.¹³⁸

Dialog antar mahasiswa dan Presiden Soeharto tanggal 11 Januari 1974 di Bina Graha diikuti oleh 85 orang dari 35 delegasi Dewan Mahasiswa dari berbagai

¹³⁷ Rum Aly, *op. cit.*, hlm. 339

¹³⁸ Marzuki Arifin, *op.cit.*, hlm. 138. Jenderal Sumitro dihubungkan dengan dengan dokumen Ramadi yang menyatakan "Ada seorang Jenderal berinisial "S" akan merebut kekuasaan dengan cara menggulingkan presiden pada sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh" Dalam dokumen disebutkan pula kritik Ramadi bahwa Presiden Suharto terlalu bekerja sama dengan Jepang. Dokumen itu ditandatangani oleh Ramadi, mantan kolonel bidang hukum yang dijadikan pimpinan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh Soedjono Hoemardani

perguruan tinggi yang berasal dari Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Denpasar, Ujung Pandang, Banjarmasin, Medan, Padang, dan Aceh.¹³⁹(lampiran 7) Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah, bertepatan dengan kegiatan Latihan Nasional Kepemimpinan Dewan Mahasiswa II di Puncak, Jawa Barat, dari tanggal 6 sampai 11 Januari 1974 yang diselenggarakan Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.¹⁴⁰

Dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto 11 Januari 1974 di Bina Graha, mahasiswa mengungkapkan masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat. Selain itu mahasiswa juga menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan Presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah; karena peran Opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo terlalu besar disamping akibat tindakan para Aspri yang tampaknya punya kekuasaan melebihi pemerintah dan Parlemen; karena para mahasiswa diintimidasi oleh beberapa tokoh militer.¹⁴¹

Mahasiswa menyerahkan dua deklarasi pada akhir dialog, satu dari mahasiswa Jakarta dan satu lagi dari mahasiswa daerah.(lampiran 5 & 6) Pada pokoknya, kedua deklarasi berisi tuntutan agar pemerintah melaksanakan pola pembangunan yang berorientasi kepada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat banyak, penekanan harga, dan peningkatan daya beli masyarakat, pemberantasan korupsi, refungsionalisasi lembaga-lembaga yang konstitusional, dan penghapusan lembaga-lembaga yang dianggap inskonstitusional.¹⁴²

¹³⁹ Akhmad Zaini Abar, *op.cit.*, hlm. 199

¹⁴⁰ Rum Aly, *op.cit.*, hlm-343-344

¹⁴¹ François Raillon, *op.cit.*, hlm. 111

¹⁴² Rum Aly, *op.cit.*, hlm.341



Presiden meminta kepada delegasi mahasiswa untuk tidak mengganggu jalannya acara-acara tamu negara yang dapat menurunkan martabat negara sebagai tuan rumah yang baik. Penanggung Jawab Keamanan dan Ketertiban menganggap mahasiswa sudah semestinya berhenti berdemonstrasi karena dalam pertemuan antara Presiden Soeharto dan mahasiswa, kepala negara telah menampung protes-protes mahasiswa .¹⁴³

Kalangan mahasiswa menganggap pertemuan dengan Presiden Soeharto bukanlah akhir dari aksi yang dilakukan untuk memprotes strategi pembangunan. Mahasiswa tidak puas atas jawaban-jawaban yang diungkapkan Presiden saat pertanyaan membutuhkan penjelasan tegas. Perbedaan watak antara generasi tua dan generasi muda tidak menemui kecocokan dan kesepakatan yang berarti sehingga mahasiswa tetap meneruskan berbagai aksi protes sampai ada perubahan. (lampiran 8 & 9)

B. Demonstrasi di Bandara Halim Perdanakusuma

Pada tanggal 14 Januari 1974, pelajar, mahasiswa, dan pemuda berdemonstrasi di lapangan terbang Halim Perdanakusuma sebagai protes terhadap kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka. Aksi ini tidak mempedulikan himbauan Wapangkopkamtib Laksamana Soedomo dan Menhankam/ Pangab Jenderal Maraden Panggabean agar mahasiswa mematuhi permintaan Presiden Soeharto untuk tidak mengganggu jalannya acara menyambut tamu negara.¹⁴⁴

¹⁴³ *Loc.cit.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 359

500 mahasiswa Jakarta yang terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, sejak sore hingga malam hari bergerak menuju Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma. Para demonstran harus menembus penjagaan yang berlapis-lapis hingga mencapai jarak pandang tamu negara di area landasan.¹⁴⁵

Rombongan mahasiswa yang tidak mampu mencapai area landasan dihadang penjagaan polisi dan tentara bersenjata lengkap (lampiran 10). Penjagaan disusun dalam tiga lapis dan mahasiswa hanya mampu berhadapan langsung dengan penjagaan lapis terakhir dari Komando Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara. Sebagian mahasiswa yang mampu menembus lapis ketiga tak mampu menerobos rawa-rawa yang dalam dan gelap di sekitar bandara. Beberapa mahasiswa yang mampu mencapai tepi lapangan terbang dapat menyaksikan bahwa tak lama sesudah PM Kakuei Tanaka turun dari pesawat tampak iring-iringan mobil keluar seolah-olah rombongan tamu negara telah meninggalkan Bandara Halim Perdanakusuma. Kenyataannya, rombongan baru meninggalkan bandara kurang lebih setengah jam kemudian.¹⁴⁶

Setelah demonstrasi di bandara, pelajar dan mahasiswa-pemuda menyelenggarakan rapat membahas gerakan selanjutnya di kampus Universitas Indonesia Salemba Raya dipimpin Gurmilang Kartasasmita. Pertemuan diikuti oleh mahasiswa Jakarta antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Nasional,

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm 360

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 361

Universitas Jayabaya, IKIP Jakarta, Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Olahraga, IAIN, Universitas Krisnadwipayana.¹⁴⁷

Dalam pertemuan mahasiswa, pelajar, dan pemuda memutuskan gerakan mereka keesokan harinya akan dimulai dari berbagai arah dengan menyebutkan tujuan Istana Merdeka, tempat PM Kakuei Tanaka menginap. Mahasiswa meminta PM Kakuei Tanaka bersedia berdialog dengan mereka dan permintaan tersebut dapat dipenuhi tanggal 16 Januari 1974. Namun, dialog yang sudah ditetapkan waktunya diganti sepihak oleh mahasiswa dengan dialog jalanan.¹⁴⁸

C. Demonstrasi Menjadi Kerusuhan di Jalanan Jakarta

Pagi hari tanggal 15 Januari 1974 mahasiswa berkumpul di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jalan Salemba(lampiran 10). Mereka melanjutkan aksi yang difokuskan untuk menentang modal asing Jepang serta tingkah laku dari pengusaha-pengusaha Jepang di Indonesia. Demontran membawa poster-poster yang antara lain berbunyi “Tolak Dominasi Ekonomi Jepang”, “Get Out Japan”, “Menerima “Tanaka = menerima kolonialis”, “Ganyang antek-antek kolonialis Jepang” dan “Menghimpun kekuatan budak-budak kapitalis Jepang = Makar”.¹⁴⁹ (lampiran 12,13,14)

Tuntutan Mahasiswa mengingatkan pada Tritura 10 Januari 1966 dengan versinya sendiri : 1. Bubarkan Aspri, 2. Turunkan Harga, 3. Ganyang Korupsi dikenal sebagai Tritura 1974.¹⁵⁰ Setelah mengadakan upacara pengibaran setengah

¹⁴⁷ *Loc.Cit.*

¹⁴⁸ Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm. 215

¹⁴⁹ Rum Aly, *op.cit.*, hlm.362

¹⁵⁰ François Raillon, *op.cit.*, hlm.112

tiang dan memproklamirkan tuntutan, mahasiswa UI dan mahasiswa IKIP berangkat menuju Monumen Nasional. Rombongan semakin membesar saat perwakilan dari berbagai dewan mahasiswa dan barisan pelajar ikut bergabung.¹⁵¹

Pasukan keamanan yang menjaga keamanan Istana diperkuat kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata lengkap dari berbagai kesatuan menjaga dengan ketat jalan menuju Monumen Nasional.(lampiran 15) Sepanjang perjalanan mahasiswa terus menerus meneriakkan Tritura baru mereka dan “Kami bukan makar!” serta singgah menurunkan setiap bendera menjadi setengah tiang, sebagai pertanda berkabung atas kunjungan PM Kakeui Tanaka.(lampiran 16)

Kerusuhan pertama antara para demonstran dan aparat negara terjadi dekat Istana Merdeka di sekitar lapangan merdeka. Rombongan Mahasiswa berdebat dengan para anggota pasukan keamanan yang menolak bendera Merah Putih diturunkan setengah tiang dan bendera tidak jadi diturunkan di Merdeka Barat.

Sebagian besar rombongan mahasiswa dan pelajar-pemuda berputar menuju Tanah Abang III setelah dihadang lapisan pengamanan yang ketat di sekitar Istana Merdeka. Selama perjalanan, rombongan demonstran semakin besar karena bergabungnya perwakilan-perwakilan lain, sehingga jumlahnya menjadi ribuan dalam barisan yang amat panjang (lampiran 17). Barisan induk meneruskan perjalanan menuju Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, dengan berjalan kaki diiringi sebagian lainnya naik truk berkecepatan rendah.

Salah satu dari rombongan mahasiswa tiba di pertigaan Jalan Merdeka Barat dengan Jalan Museum dipimpin Gurmilang Kartasmita dari DM UI. Rombongan

¹⁵¹ Rum Aly, *op.cit.*, hlm.363

ini didatangi seorang aktivis non kampus Jopie Lasut yang mengajak mahasiswa maju menuju Istana Merdeka. Gurmilang Kartasmita menolak ajakan tersebut karena tidak ada kesepakatan untuk menerobos ke arah istana dan menghindari bentrokan dengan pasukan keamanan yang mengawal ketat istana.¹⁵²

Saat seluruh mahasiswa telah tiba di kampus Trisakti, mereka melakukan apel bersama sambil mengacung-acungkan boneka yang menggambarkan Asisten Pribadi Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, menyampaikan orasi, dan bernyanyi-nyanyi. Bersamaan dengan gerakan mahasiswa di kampus Trisakti, dari arah Jalan Pecenongan – sisi utara Istana Merdeka – ratusan massa pelajar dan anggota masyarakat bergerak menuju Monumen Nasional. Rombongan non-kampus ini dihadang petugas keamanan yang membawa anjing-anjing herder dan petugas kadang-kadang seolah melepas anjingnya ke arah massa, sehingga tampak massa agak marah (lampiran 18). Mereka tidak mampu menembus penjagaan lalu mundur dan mulai melakukan tindakan-tindakan perusakan dan pengempesan ban kendaraan.

Massa menjungkirbalikkan kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di sepanjang Jalan Pecenongan yang dikenal sebagai daerah perdagangan mobil dan sepeda motor dengan sasaran utama kendaraan buatan Jepang. Kaca-kaca kendaraan dipecah lalu dijungkirbalikkan dan meningkat menjadi pembakaran terhadap kendaraan yang ada di daerah tersebut. Pada waktu yang bersamaan, etalase ruang pamer toko-toko mulai dipecahkan terutama PT Astra yang dianggap salah satu simbol usaha Jepang.¹⁵³ (lampiran 19)

¹⁵² *Ibid.*, hlm.364

¹⁵³ *Ibid.*, hlm.365

Petugas keamanan yang ada tidak menindak karena lebih mementingkan penjagaan jalan-jalan masuk ke arah Istana Merdeka agar tidak kebobolan. Tanpa penindakan petugas keamanan, kerusuhan makin meluas ke berbagai wilayah lain yang tak terjaga di luar kepentingan pengamanan Istana dan tamu negara.

Peristiwa perusakan, penjarahan, dan pembakaran terjadi di Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Proyek Senen, Harmoni, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada. Proyek Senen terbakar berjam-jam lamanya tanpa bisa dipadamkan dan hal yang sama juga terjadi pada pada showroom PT Astra di Jalan Sudirman lengkap dengan mobil-mobil yang ada di dalam ruang pamernya.(lampiran 20,21,22,23)

Bangkai mobil dan kendaraan bermotor lainnya bertebar di berbagai tempat Ibukota Jakarta antara lain di dasar kanal antara Harmoni – sisi utara istana – hingga Gunung Sahari tergeletak kendaraan yang dicempelungkan massa(lampiran 24). Mahasiswa yang selesai mengikuti apel di kampus Universitas Trisakti dan tidak ikut dalam perusakan dan kerusakan massal, langsung menarik diri kembali ke kampus masing-masing. Sebagian dari rombongan mahasiswa diangkut dengan truk dan saat sampai Monumen Nasional iring-iringan digiring dan diarahkan oleh para petugas keamanan untuk melalui Harmoni, Jalan Juanda, Pertigaan Pecenongan yang telah penuh bangkai-bangkai kendaraan bermotor yang telah rusak.

Pangkopkamtib Jenderal Soemitro berusaha mencegah massa merusak Kedutaan Besar Jepang di Jalan M.H.Thamrin. Ia berjanji untuk menampung tuntutan massa yang menginginkan “Bubarkan Aspri, turunkan harga, berantas

korupsi”. Massa tidak mau menghentikan aksinya dan sempat mengelu-elukannya dengan teriakan “Hidup Pak Mitro!” berulang-ulang.¹⁵⁴ (lampiran 25)

D. Usaha Mengatasi Kerusuhan

Kerusuhan massa berlangsung hingga larut malam walaupun penguasa militer Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jenderal G.H. Mantik memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sampai 06.00 pagi. Peringatan dari penanggung jawab keamanan diacuhkan oleh massa dan kerusuhan tetap berlanjut keesokan harinya, 16 Januari 1974. (lampiran 29)

Menhankam/ Pangab Jenderal Maraden Panggabean mencoba menenangkan massa dengan menemui langsung para demonstran yang memenuhi Jalan Kramat Raya sampai ke depan kampus Universitas Indonesia di Jalan Salemba Raya. (lampiran 26) Ia berusaha berdialog dengan massa namun semua pertanyaan dan pernyataannya selalu dijawab: “Turunkan Harga!”. Dalam kesempatan itu, Menhankam meminta kepada massa tetap percaya pada kepemimpinan Jenderal Soeharto dan Pemerintah Orde Baru serta meminta massa untuk tenang dan pulang ke tempat masing-masing.¹⁵⁵

Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mendatangi kampus UI memberitahu mahasiswa bahwa massa sedang menuju kampus di Salemba Raya dari Pasar Senen (lampiran 27 & 28). Penguasa sipil berusaha mencegah kerusuhan meluas ke kampus dan menghancurkan kegiatan mahasiswa oleh serbuan massa agar tidak timbul korban yang lebih banyak. Ia meminta Hariman Siregar mengeluarkan

¹⁵⁴ Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm.221-222

¹⁵⁵ M. Panggabean, *Berjuang dan Mengabdikan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm.381

perintah menghentikan demonstrasi lewat TVRI. Hariman Siregar dalam siaran televisinya menyerukan kepada mahasiswa dan pelajar untuk tenang dan waspada serta tidak ikut aksi-aksi perusakan. Ia membacakan pernyataan Dewan Mahasiswa dan senat-senat mahasiswa UI yang menegaskan “tidak membenarkan cara-cara perusakan”.¹⁵⁶

Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro mengeluarkan 6 langkah penertiban keadaan Ibukota Jakarta setelah kerusuhan 15-16 Januari 1974. Langkah penertiban tersebut adalah: 1. Menertibkan pelaksanaan hak-hak demokrasi, dengan jalan antara lain tidak membenarkan demonstrasi, menertibkan kehidupan universitas dan sekolah-sekolah agar tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik; 2. Mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang menjurus membuka peluang ke arah makar; 3. Mengembangkan dan memantapkan saling pengertian antara pemerintah dengan DPR dan antara Pemerintah dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang bermanfaat bagi pelaksanaan kehidupan demokrasi Pancasila; 4. Melakukan tindakan-tindakan pengusutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa-peristiwa berdasarkan hukum yang berlaku; 5. Menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan hukum seperti perampokan, pembakaran, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya; 6. Segera mengusahakan pulihnya kembali kehidupan di DKI Jakarta khususnya kehidupan ekonomi.¹⁵⁷

Penguasa militer menutup semua sekolah dari Sekolah Dasar hingga Universitas dan Perguruan Tinggi serta melarang kegiatan berkumpul dan berkelompok lebih dari lima orang. Penangkapan terhadap aktivis gerakan protes dari

¹⁵⁶ Ramadhan K.H., *Bang Ali, Demi Jakarta 1966-1977*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992) hlm.381

¹⁵⁷ *Tempo*, 26 Januari 1974, hlm. 9

kampus maupun non kampus dilakukan secara bertahap. Mereka yang ditahan pada kesempatan pertama adalah Hariman Siregar, Gurmilang Kartasasmita, Theo L Sambuaga, Bambang Sulistomo, Purnama, Abdul Salim Hutadjulu, dan Drs. Dorodjatun Kuntjoro- Jakti. Tahap berikutnya, terdapat nama-nama dari mantan pergerakan 1966 seperti Fahmi Idris, Sugeng Sarjadi, Marsilam Simanjuntak, Adnan Buyung Nasution S.H., dan Aktivistis HAM H.J.C. Princen ditambah aktivis non kampus yang ditahan yaitu Imam Waluyo, Yusuf AR, Yessi Moninca beserta Prof. Sarbini Sumawinata, Soebadio Sastrosatomo, Moerdianto, Sjahrir, Rahman Tolleng, Soemarno, dan Ramadi.¹⁵⁸

Kerusuhan selama dua hari, 15-16 Januari 1974, meminta kerugian materi dan korban jiwa yang tidak sedikit. Menurut Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin kerugian materi berupa 269 mobil terbakar, 253 mobil rusak, 94 sepeda motor terbakar dan 43 rusak, 5 gedung dibakar dan 113 dirusak, 5 bangunan industri rusak berat maupun ringan. Sedangkan Menhankam/ Pangab Jenderal Maraden Panggabean di depan Sidang Pleno DPR 21 Januari 1974 mengungkapkan bahwa kerugian yang diderita akibat huru-hara berupa 807 mobil terbakar/ dirusak, 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan dibakar/ dirusak dan 160 kilogram emas/ perhiasan dirampok. Korban jiwa tercatat 11 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, 775 orang ditahan berkaitan dengan kerusuhan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi mata, jumlah korban yang jatuh sebenarnya jauh

¹⁵⁸ Rum Aly, *op.cit.*, hlm 373-374

lebih banyak, terutama yang dikategorikan perusuh yang memanfaatkan situasi sehingga langsung ditembak di lokasi peristiwa.¹⁵⁹



¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm.369

BAB IV

DAMPAK HURU-HARA ANTI JEPANG 1974

Kerusuhan yang berlangsung 15-16 Januari 1974 telah menghambat kegiatan sehari-hari masyarakat DKI Jakarta karena kecemasan menggunakan kendaraan bermotor dan tutupnya kantor – toko setelah kejadian tersebut. Barang-barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya masuk dari luar Jakarta praktis terhenti mengakibatkan harga-harga kebutuhan sehari-hari naik.

Aspek sosial yang menonjol akibat banyaknya toko-toko yang terbakar adalah banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dengan terbakarnya dua blok bangunan proyek Pasar Senen diperkirakan tidak kurang 3500 orang menjadi penganggur.¹⁶⁰

Pemerintah Orde Baru menanggapi secara negatif dan positif kritik dan protes terhadap strategi pembangunan yang mencapai puncaknya pada kerusuhan 15-16 Januari 1974. Tanggapan negatif pemerintah Orde Baru terhadap para pengkritik dan pemrotesnya adalah pertama melakukan penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis mahasiswa dan cendekiawan yang gemar mengkritik dan memprotes kebijaksanaan politiknya, kedua melakukan pembredelan terhadap sejumlah pers yang dianggap terlalu kritis dan berani. Tanggapan positif pemerintah adalah menetapkan sejumlah keputusan politik yang nampaknya ingin memenuhi beberapa tuntutan masyarakat. Keputusan politik tersebut antara lain menetapkan patokan-patokan pola hidup sederhana bagi pejabat-pejabat pemerintah, larangan impor mobil

¹⁶⁰ *Tempo*, 26 Januari 1974

jadi, dan usaha-usaha nyata untuk memajukan usaha-usaha pribumi dalam PMA dan PMDN. Keputusan politik yang terakhir, bertujuan untuk membatasi ruang gerak modal golongan non-pribumi dan asing serta memperluas ruang gerak usaha golongan pribumi.¹⁶¹

A. Pembredelan Pers

Pemerintah Orde Baru mencabut Surat Ijin Cetak (SIC) dan Surat Ijin Terbit (SIT) beberapa surat kabar harian – mingguan dan majalah mingguan berita setelah terjadinya kerusuhan 15-16 Januari 1974. Penerbitan pers yang dilarang kegiatan operasionalnya berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Ujung Pandang.

Media massa pertama yang terkena larangan adalah harian Nusantara, Jakarta tertanggal 16 Januari 1974 karena menyiarkan tulisan-tulisan yang tidak berdasarkan pada kebenaran yang dapat menghasut rakyat untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Harian yang dipimpin oleh T.D. Hafaz ini dicabut SIT-nya oleh Departemen Penerangan setelah Pelaksana Khusus Pangkoptibda Jakarta Raya membatalkan SIC.¹⁶²

Pelaksana Khusus Pangkoptibda Jawa Timur mencabut SIC harian Suluh Berita, Surabaya tertanggal 19 Januari 1974. Tindakan penguasa militer di Jawa Timur dengan alasan pemuatan berita berjudul “Demonstrasi Belum Perlu di Surabaya, Tapi Jika Diperlukan Akan Terjadi Yang Lebih Patriotik dari Jakarta”

¹⁶¹ Akhmad Zaini Abar, *op.cit.*, hlm. 201-202

¹⁶² Abdurrachman Suryomiharjo (ed), *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002) hlm. 290

tanggal 18 Januari 1974 dianggap mengandung ajakan untuk berunjuk rasa bagi mahasiswa Surabaya dan golongan masyarakat lainnya.¹⁶³

Surat kabar dari Bandung yang terbit mingguan, Mahasiswa Indonesia, dicabut SIC-nya oleh Pelaksana Khusus Pangkopkamtibda Jawa Barat tanggal 20 Januari 1974. Liputan mingguan ini mengenai Peristiwa 15-16 hingga 17 Januari 1974 dianggap melakukan penghasutan-penghasutan mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa Indonesia menyajikan kejadian secara apa adanya di lapangan mulai dari insiden di Bandara Udara Halim Perdanakusuma dan adanya non mahasiswa yang memulai perusakan di daerah Pecenongan dan Senen. Dalam editorialnya yang berjudul “Di Balik Kerusuhan Jakarta” mengungkapkan terciptanya situasi rawan akibat kehilangan kepercayaan terjadi karena pengalaman menunjukkan bahwa apa yang diucapkan kalangan kekuasaan tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁶⁴

Media cetak Ibukota Jakarta yang dibredel di wilayah Pelaksana Khusus Pangkopkamtibda Jakarta Raya tertanggal 21 Januari 1974 adalah Harian Indonesia Raya yang dipimpin Mochtar Lubis, Harian Kami yang dipimpin Nono Anwar Makarim, Harian Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Wenang, dan Mingguan Pemuda Indonesia. Alasan penguasa militer mencabut SIC media cetak tersebut adalah telah memuat tulisan-tulisan yang merusak kewibawaan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional dan dianggap menghasut rakyat sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan dan memperuncing situasi ke arah terjadinya

¹⁶³ *Loc.cit.*

¹⁶⁴ Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 375

kekacauan-kekacauan seperti tanggal 15-16 Januari 1974 dan yang dapat mengadu domba antara pimpinan yang satu dengan yang lain.¹⁶⁵

Pada tanggal 24 Januari 1974, harian Pedoman yang dipimpin Rosihan Anwar dan majalah mingguan berita Ekspres yang dipimpin Marzuki Arifin SE dicabut SIC-nya dengan alasan yang sama seperti enam penerbitan ibukota terdahulu.¹⁶⁶ Selain itu, harian Pedoman telah memuat pernyataan para mahasiswa IKIP Jakarta yang mempertanyakan saham-saham Ibu Tien Soeharto di Astra dan di sejumlah perusahaan lainnya.¹⁶⁷ Sedangkan majalah mingguan berita Ekspres telah memuat foto-foto perusakan pada kerusuhan 15-16 Januari 1974 sebagai alasan tindakan pembredelan.¹⁶⁸

Satu-satunya surat kabar luar Jawa yang terkena pembredelan adalah Indonesia Pos Ujung Pandang tertanggal 2 Februari 1974. Pelaksana Khusus Pangkoptibda Sulawesi Tenggara menganggap terdapat hubungan erat antara surat kabar tersebut dengan peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta.¹⁶⁹

Surat kabar harian-mingguan dan majalah mingguan berita yang dicabut SIC-nya di kemudian hari dicabut SIT-nya sehingga tidak kurang dari 502 wartawan dan karyawan pers kehilangan pekerjaan di Jakarta dan kota lainnya. Kehidupan pers dengan ditutupnya 12 media cetak telah kehilangan gaya penulisan jurnalisme politik yang memberikan perhatian besar kepada advokasi (pembelaan) masyarakat.¹⁷⁰ Posisi pers menjadi lemah dengan kekuatan negara yang ditunjukkan pada kuatnya

¹⁶⁵ Abdurrachman Suryomiharjo, *op.cit.*, hlm 291

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 293

¹⁶⁷ Mahiddin M, Pembredelan Harian Pedoman: Sirmanya Suatu Harapan dalam Tribuana Said (Peny), H. Rosihan Anwar, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1992) hlm. 119

¹⁶⁸ Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 377

¹⁶⁹ Abdurrachman Suryomiharjo, *op.cit.*, hlm. 293

¹⁷⁰ Bredel Malari di Mata Mashuri dalam *Suara Independen* No.7/ 11/ Januari – Februari 1966

posisi negara untuk tidak menghiraukan atau bahkan menolak tuntutan dan kritik masyarakat seperti yang disampaikan oleh media massa.

Media massa yang lolos dari pencabutan SIC dan SIT oleh kalangan penguasa, kebebasan persnya dikekang untuk mengikuti sumber yang resmi dari siaran pers pemerintah. Penguasa mulai melihat pers memiliki sejumlah nilai kebenaran yang sama dengan mahasiswa kritis dan menempatkan pers sebagai “musuh”.

Pada perkembangannya, berkembang budaya telpon dari kalangan penguasa kepada redaksi dari berbagai media pers untuk menegur, tumbuh dan makin menjadi dari waktu ke waktu atas nama Kopkamtib dan instansi militer dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya, isi pemberitaan bisa didiktekan arahnya dan bahkan sampai pada pemutarbalikkan fakta. Martabat pers didorong ke tingkat yang paling rendah sehingga tidak mampu menjadi alat mediasi kepentingan masyarakat dan kebenaran. Kalupun pers ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan harus dilakukan dengan “bergerilya” melalui formulasi penyajian yang sangat taktis dan halus terselubung.

B. Pergeseran Elite Poltik

Pangkopkamtib Jendral Soemitro mengajukan pengunduran diri sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban setelah meletusnya kerusuhan 15-16 Januari 1974. Ia menyatakan dirinya gagal mengamankan Ibukota Jakarta saat PM Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Indonesia.¹⁷¹

¹⁷¹ Heru Cahyono, *op. cit.*, hlm. 243

Presiden Soeharto mengambil alih jabatan Pangkopkamtib sama seperti saat lembaga Kopkamtib dibentuk pertama kali dan menunjuk Laksamana Soedomo – Wapangkopkamtib – sebagai kepala staf Kopkamtib untuk kegiatan rutin sehari-hari. Penyatuan wewenang di tangan Presiden Soeharto dengan alasan agar penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban umum, khususnya dalam usaha mengatasi sebab-sebab dan akibat-akibat terjadinya kerusuhan 15-16 Januari 1974 dapat berjalan efektif, lebih praktis, lebih cepat, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan terutama apabila diperlukan tindakan-tindakan khusus yang wewenangnya memang berada di tangan Presiden.¹⁷²

Jabatan yang masih diemban Jenderal Soemitro setelah melepas jabatan Pangkopkamtib adalah Wakil Panglima ABRI dan di kemudian hari ditunjuk menjadi Duta Besar RI di Amerika Serikat. Namun ia menolak penugasan tersebut dan memilih mengundurkan diri dari dinas militer pada usia yang relatif muda untuk seorang jenderal bintang empat, 47 tahun.¹⁷³

Tuntutan mahasiswa dalam Tritura Baru 1974 yang pertama: “Bubarkan Aspri” terwujud dalam tindakan Presiden Soeharto membubarkan institusi Asisten Pribadi Presiden RI. Alasan melakukan kebijakan tersebut adalah “Kepala Negara memandang keadaan sekarang tidak perlu lagi ada jabatan Aspri”.

Para Asisten Pribadi Presiden RI dikembalikan ke jabatan-jabatan mereka yang lain, antara lain Mayjen Ali Moertopo ke Wakil Kepala Bakin, Mayjen Soedjono Hoemardani sebagai anggota DPR/MPR, Mayjen Surjo Wiryohadiputro menjabat Direktur Utama PT Hotel Indonesia Internasional, dan Mayjen

¹⁷² *Tempo*, 2 Februari 1974

¹⁷³ Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 384

Tjokropranolo sebagai Sekretaris Militer Presiden. Presiden Soeharto berusaha mengoptimalkan peranan Sekretaris Negara yang dijabat Mayjen Sudharmono SH untuk membantu tugas-tugas kenegaraan.

Pejabat militer bidang intelijen yang bertanggung jawab pada berbagai informasi mengenai keamanan dalam negeri diserahkan dari Letjen Sutopo Juwono kepada Mayjen Yoga Soegama. Kepala Bakin yang baru meninggalkan tugasnya sebagai wakil pemerintah RI di PBB dan pejabat lama Kabakin menempati posisi sebagai Duta Besar RI di Belanda menggantikan Letjen Alamsyah Ratu Prawiranegara. Bagi Yoga Sugama jabatan Kabakin bukanlah hal baru karena pernah diembannya sebelum dijabat Sutopo Juwono. Pejabat intelijen di bawah Kopkamtib (Asisten Intel Kopkamtib) Mayjen Kharis Suhud dipindah tugaskan sebagai Duta Besar RI di Vietnam. Hal yang sama terjadi pada perwira tinggi yang dikenal pembaharu dan mendukung gerakan kritis masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru.¹⁷⁴

Dalam Kabinet Pembangunan II, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kosong sejak meninggalnya Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro diisi oleh kalangan militer dengan masuknya Mayjen Dr. Sjarif Thajeb sebagai menteri yang baru. Ia meninggalkan tugas sebagai Duta Besar RI di Amerika Serikat dan pernah menjabat Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan kabinet peralihan Soekarno 1964-1966.¹⁷⁵

¹⁷⁴ *Tempo*, 2 Februari 1974

¹⁷⁵ Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 385

C. Pembatasan Kebebasan Akademik

Sekolah Dasar hingga Universitas dan Perguruan Tinggi dinyatakan ditutup oleh Laksus Pangkoptibda Jakarta Raya setelah terjadinya kerusuhan 15-16 Januari 1974 agar tidak digunakan kegiatan politik. Tokoh-tokoh Dewan Mahasiswa di Jakarta ditangkap dan ditahan untuk mengurangi kerusuhan berkembang menjadi lebih besar. Untuk keperluan pengamanan dan pengusutan, Kopkamtib meminta seluruh Dewan Mahasiswa yang ada di Jakarta membuat laporan tertulis mengenai segala sesuatu yang mereka lakukan pada hari-hari demonstrasi 15-16 Januari 1974.¹⁷⁶

Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia Hariman Siregar, aktivis pers UI Sjahrir, dan mahasiswa Universitas Gajah Mada Mohammad Aini Chalid diadili dengan tuduhan yang beragam. Hariman Siregar dianggap telah melakukan tindakan subversif dan makar saat mencetuskan Petisi 24 Oktober 1974 dan pidatonya dalam malam tirakatan di kampus Fakultas Kedokteran UI, Salemba 31 Desember 1974 yang mengajak segala lapisan masyarakat memperjuangkan hak-haknya.¹⁷⁷ Sjahrir dituduh telah menyatakan ketidakpuasan terhadap strategi pembangunan yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara. Ia mencetuskan ketidakpuasan melalui diskusi dan ceramah mahasiswa di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sjahrir dituduh telah mengajak mahasiswa untuk bergerak melawan pemerintah.

Bagi Sjahrir, perbuatannya sebelum kerusuhan 15-16 Januari 1974 merupakan kebebasan mimbar yang harus digunakan sebaik-baiknya. Ia berusaha

¹⁷⁶ *Tempo*, 26 Januari 1974

¹⁷⁷ *Tempo*, 27 Juli 1974

memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang menyertai pembangunan ekonomi yang berdasarkan pertumbuhan nasional (GNP) seperti korupsi, pengangguran, dan pemerataan pendapatan.¹⁷⁸

Pemerintah Orde Baru menganggap aktivitas kalangan kampus telah merendahkan kewibawaan pemerintah dan negara saat negara sedang membangun. Pemerintah berusaha menormalkan kembali kehidupan universitas dan kehidupan mahasiswa secepatnya lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mayjen Dr. Sjarif Thajeb mengeluarkan Surat Keputusan No. 028/ 1974 yang memuat petunjuk-petunjuk kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kampus. Dalam peraturan-peraturan yang menyertai SK tersebut ditegaskan bahwa kegiatan yang bersifat politis dilaksanakan dengan bimbingan dan atas tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dan berdasarkan penganalisaan secara ilmiah.¹⁷⁹

Surat Keputusan Menteri P dan K mendapat reaksi keras dari mahasiswa karena melarang demonstrasi di kampus dan mengharuskan segala kegiatan mahasiswa di kampus seperti demonstrasi, pawai, apel, rapat, rapat umum, pernyataan lisan atau tulisan, seminar, diskusi, kuliah, kuliah umum harus mendapat persetujuan dahulu. Mahasiswa mendapat tekanan dan pengawasan ketat dari negara saat berkegiatan di dalam maupun luar kampus lewat pimpinan perguruan tinggi.

Dewan Mahasiswa/ Senat Mahasiswa yang ada di Bandung menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan protesnya dan meminta supaya DPR mendesak Menteri P dan K mencabut SK Menteri P dan K No. 028/1974. Aksi ini dipimpin

¹⁷⁸ *Tempo*, 19 April 1975

¹⁷⁹ Rum Aly, *op.cit.*, hlm. 390

oleh Ketua DM Universitas Pajajaran Hatta Albanik yang berbuntut pada konflik terbuka dengan Menteri Sjarif Thajeb.¹⁸⁰

Ketika kegiatan mahasiswa dilarang melakukan kegiatan di permukaan, banyak kegiatan diskusi dilakukan mahasiswa secara terbatas dan tersamar dalam berbagai bentuk, yang tidak mudah dilakukan pada awalnya karena ada larangan berkumpul dalam jumlah tertentu. Salah satu penyaluran yang efektif kegiatan mahasiswa adalah penerbitan kampus walaupun pers mahasiswa diarahkan untuk dibina dan dikembangkan sebagai tukar menukar informasi dan pengalaman antar warga kampus. Pers mahasiswa masih sempat menulis opini dan gugatan dalam tajuk rencana media yang diasuh sebelum Menteri Penerangan lewat rekomendasi Kopkamtib mengharuskan memiliki izin dari Departemen Penerangan seperti halnya penerbitan umum.¹⁸¹

D. Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan

Kerusuhan 15-16 Januari 1974 telah menghancurkan beberapa tempat perdagangan dan hiburan yang ada hubungannya dengan ekonomi Jepang di Ibukota Jakarta. Perusahaan Astra yang merupakan usaha gabungan pengusaha Indonesia dan Jepang menjadi sasaran pembakaran dan perusakan karena dianggap simbol usaha Jepang. Di jalanan ibukota, barang-barang produksi Jepang dalam berbagai jenis dirusak dan dibakar tanpa peduli pada pemiliknya yang memiliki barang buatan Jepang karena harganya murah.¹⁸²

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 401

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 412

¹⁸² *Tempo*, 26 Januari 1974

Aksi demonstran memprotes strategi pembangunan yang berhubungan dominasi barang-barang dan modal Jepang telah menghasilkan reaksi yang berpihak pada golongan pribumi. Kebijakan yang berpihak pada golongan pribumi adalah pembatasan pengaruh modal asing, pemberian kesempatan bagi golongan pribumi untuk mengembangkan usaha mereka, memperluas program pemerataan, dan pemberantasan korupsi.¹⁸³

Dewan Stabilisasi Nasional yang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi. Keputusan tersebut menentukan beberapa patokan tentang PMA yaitu: 1. mempercepat terciptanya perimbangan saham sehingga peserta Indonesia berangsur-angsur dapat menaikkan sahamnya menjadi 51 % dalam jangka waktu 10 tahun; 2. Penutupan dan pembatasan izin kepada pengusaha non-pribumi dan asing untuk melaksanakan investasi di bidang-bidang tertentu, karena bidang tersebut dianggap cukup atau memang khusus disediakan untuk kegiatan-kegiatan swasta nasional; 3. Syarat-syarat pelaksanaan PMA diperketat lagi dengan: a. ketrampilan (skill) harus sebanyak mungkin menggunakan tenaga Indonesia, bila belum mungkin perusahaan yang bersangkutan wajib mendidik tenaga-tenaga Indonesia; b. semua modal PMA harus berbentuk perusahaan patungan dengan rekanan nasional Indonesia; c. pemberian fasilitas-fasilitas seperti tax holiday, keringanan bea masuk dan sebagainya akan dikurangi – dengan catatan: pemberian fasilitas-fasilitas ini dulu bertujuan untuk menarik investor-investor pelopor; d. pihak rekanan PMA haruslah pribumi; e. dalam hal perusahaan patungan itu terdiri dari modal asing dan modal

¹⁸³ M Dawam Raharjo, Gerakan Rakyat dan Negara, dalam *Prisma* 11, 1985. hlm. 13

pribumi, maka akan dipercepat perimbangan saham asing dan non-pribumi itu agar menjadi 49: 51. Selanjutnya 50 % dari modal non-pribumi tadi diusahakan agar dapat dimiliki oleh pribumi dengan mendorong prosesnya melalui pasar modal.¹⁸⁴

Untuk mendorong agar golongan pribumi makin luas mendapat kesempatan mengembangkan usaha, maka dalam hal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diambil langkah-langkah: 1, kredit investasi hanya diberikan kepada golongan pribumi; 2. PMDN milik non-pribumi yang telah melunasi kredit yang diterimanya dahulu, harus mulai menjual sahamnya melalui pasar modal, sehingga sekurang-kurangnya 50 % dari saham tersebut menjadi saham pribumi; 3. PMDN pribumi dan non-pribumi secara bertahap dikembangkan perimbangan sdaham-sahamnya, sehingga sekurang-kurangnya 50% pribumi dan 50% non-priobumi; 4. untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan diatas maka patokan perusahaan yang disebut perusahaan pribumi adalah: a. yang perbandingan modal pribumi dan modal non-pribumi adalah 75%:25%; yang perbandingan modal modalnya 50%:50%, akan tetapi pengurusannya sebagian besar oleh pribumi.¹⁸⁵

Pemerintah mulai melakukan pendekatan pengawasan terhadap aparat negara lewat berbagai institusi seperti Inspektur Jenderal Pembangunan, Inspektur Jenderal dalam departemen, Inspektur Keuangan di daerah-daerah yang mengawasi keuangan pengelolaan keuangan aparat di daerah, dan Badan Pengawas Keuangan yang secara tradisional ada pada konstitusi. Kebijakan pemerintah membentuk institusi

¹⁸⁴ *Tempo*, 2 Februari 1974

¹⁸⁵ *Loc.cit.*

pengawasan aparat negara disertai bermacam-macam peraturan yang membatasi kegiatan pegawai negeri dan istrinya di bidang usaha.¹⁸⁶

Kebijakan mengenai patokan-patokan pola hidup sederhana bagi pejabat pemerintah meliputi: penyelenggaraan pesta-pesta hari ulang tahun institusi, memberi atau menerima hadiah-hadiah, dan penghematan – penertiban penggunaan uang negara. Pemerintah Orde Baru menekankan pentingnya pengamanan dana dan daya negara melibatkan struktur pemerintahan.¹⁸⁷

Kerusuhan anti Jepang 15-16 Januari 1974 memberi pelajaran bagi pemerintah Jepang untuk memperbaiki citranya sebagai partner dalam bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan adalah memperbesar bantuan luar negeri dan memberikan kemudahan-kemudahan sektor industri di masa mendatang yang memperhitungkan kepentingan bangsa lain.

Beberapa perusahaan Jepang mengalihkan investasi ke Amerika Latin khususnya Meksiko dan Brasil, Amerika Utara, dan Timur Tengah karena tingginya potensi risiko yang ada di Asia Tenggara khususnya Muangthai dan Indonesia. Perusahaan Jepang menjadi lebih berhati-hati dalam investasi di luar negeri dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya sentimen anti Jepang.

E. Hubungan Mahasiswa dan Militer Berakhir

Kegiatan mahasiswa memprotes strategi pembangunan Pemerintah Orde Baru berkaitan dengan modal asing dari Jepang merupakan perjuangan masyarakat sipil

¹⁸⁶ Sjahrir, Pengamanan Dana dan Daya Negara, Soal Pemberantasan atau Pencegahan Korupsi? dalam *Prisma* 3, 1985

¹⁸⁷ *Tempo*, 2 Februari 1974

menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Gerakan ini didukung oleh berbagai kalangan masyarakat seperti cendekiawan, politisi, intelektual, dan budayawan.

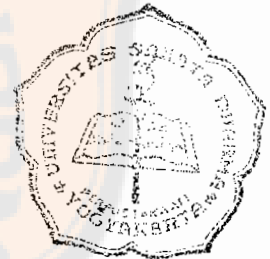
Mahasiswa menginginkan pembangunan yang dijalankan memperhatikan faktor-faktor sosial masyarakat dan terciptanya pemerataan pendapatan, padat karya, dan terjadi proses pengalihan bagi negara tuan rumah. Masyarakat yang terkena efek negatif mengadu kepada mahasiswa sebagai wujud dukungannya pada gerakan kritis mahasiswa.

Gerakan kritis mahasiswa menolak kehadiran modal asing Jepang di Indonesia tahun 1974 telah berkembang menjadi kekuatan moral yang luas. Namun kegiatan mahasiswa tersebut tidak mampu mempersatukan tuntutan mereka saat bertemu secara langsung dengan Presiden Soeharto pada tanggal 11 Januari 1974 di Bina Graha Jakarta.

Kerusuhan anti Jepang tanggal 15-16 Januari di Jakarta merupakan puncak gerakan protes mahasiswa terhadap strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang tergantung Pada modal dari Jepang. Kejadian tersebut tidak terjadi di daerah-daerah lain yang merupakan pendukung utama gerakan kritis mahasiswa di Ibukota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya menggambarkan proses menyempitnya aksi-aksi mahasiswa.

Mahasiswa Jakarta selanjutnya dituduh terpengaruh simpatisan partai terlarang yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang telah dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1960. Arah gerakan yang radikal dipahami oleh pemegang kekuasaan sebagai usaha untuk menggulingkan kekuasaan negara.

Ketidaksepahaman antara mahasiswa dan pemerintah menjadi dasar bagi pemerintah Orde Baru menindak secara tegas dan keras golongan masyarakat yang tidak sesuai dengan arah kebijakannya. Tindakan keras pemerintah menandai retaknya hubungan partnership antara mahasiswa dan militer yang telah terjalin sejak 1966. Penangan yang represif dan militeristik dari pemerintah Orde Baru terhadap gerakan kritis mahasiswa menimbulkan keyakinan para mahasiswa bahwa kekuasaan Orde Baru khususnya yang dipengaruhi\ didominasi militer harus dilawan, dijatuhkan, dan diganti, tidak cukup sekedar dikoreksi dan dikritik.



BAB V

KESIMPULAN

1). Pada tahun 1958, Indonesia dan Jepang menyetujui pembayaran ganti rugi – pampasan perang dalam bentuk bantuan mengelola sumber-sumber alam, mengerjakan proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi, pengembangan tenaga, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan dan jasa – pelayanan. Lewat ganti rugi-pampasan perang, Jepang memperluas kegiatan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Pergantian kepemimpinan nasional tahun 1966 dari Ir. Soekarno kepada Jenderal Soeharto telah memberi peluang seluas-luasnya bagi Jepang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Soeharto menitikberatkan pembangunan pada bidang ekonomi didukung oleh Jepang lewat modal yang diberikan dalam bentuk bantuan luar negeri, pinjaman, dan kredit jangka panjang berbunga lunak untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Kegiatan ekonomi Jepang mampu mendominasi perekonomian Indonesia sehingga menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap modal dari Jepang lebih besar. Posisi tawar yang dimiliki pihak Indonesia menjadi lemah sehingga tidak mempunyai peran strategis dan menguntungkan bagi perekonomian lokal.

Akibat negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi Jepang telah sampai pada persaingan di tingkat elite kekuasaan dan ketimpangan sosial. Rivalitas elite politik mempertentangkan pembantu-penasehat Presiden Soeharto yang melibatkan

Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro, Asisten Pribadi Presiden RI antara lain Mayjen Ali Moertopo dan Mayjen Soedjono Hoemardani, dan staf ahli ekonomi dari Universitas Indonesia pimpinan Prof. Widjojo Nitisastro. Pembantu-penasehat Presiden Soeharto saling berebut pengaruh berkaitan dengan strategi pembangunan yang harus diterapkan di awal pemerintahan Orde Baru.

2). Pelajar, mahasiswa, pemuda, intelektual, dan politisi yang dipimpin Hariman Siregar, Gurmilang Kartasasmita, Jopie Lasut, dan Sjahrir memprotes strategi pembangunan yang mengandalkan modal asing khususnya modal asing dari Jepang. Penanaman modal asing Jepang dianggap hanya mencari keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial masyarakat.

Puncak aksi protes terjadi saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Indonesia tanggal 14-17 Januari 1974. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda menyambut PM Kakuei Tanaka dengan demonstrasi anti Jepang di Jakarta. Aksi jalanan mahasiswa berkembang menjadi kerusuhan saat massa non mahasiswa ikut berdemonstrasi dengan merusak dan membakar produk-produk Jepang serta tempat usahanya.

3). Dampak kerusuhan anti Jepang di Jakarta adalah penangkapan dan penahanan aktivis gerakan protes diikuti pembatasan kebebasan akademik dengan dikeluarkannya SK No. 028/ 1974, pembredelan media cetak yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru dengan dibatalkannya izin cetak dan izin terbit 12 surat kabar harian-mingguan dan majalah berita mingguan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Ujung Pandang. Di tingkat elite Politik, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro

mengundurkan diri dari dinas militer karena merasa gagal menjalankan tugas dan Kepala negara membubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden karena sudah tidak dibutuhkan dan mengembalikan anggotanya ke jabatan semula. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk membatasi pengaruh modal asing, memberi kesempatan bagi golongan pribumi untuk mengembangkan usaha, memperluas program pemerataan, dan memberantas korupsi lewat dibentuknya lembaga-lembaga pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abar, Akhmad Zaini. 1995. *1966 -- 1974, Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- Aly, Rum. 2004. *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970 -- 1974*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Arifin, Marzuki. 1974. *Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia
- Budiman, Arief dan Tornquist, Olle. 2001. *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Indonesia
- Cahyono, Heru. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- , 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Cipta Adi Pustaka. 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 3 dan 7*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka
- Culla, Adi Suryadi. 1998. *Patah Tumbuh Hilang Berganti, Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Penerangan. 1974. *Peristiwa 14-15-16 Januari di Jakarta*. Siaran Khusus Nomor 1 22 Januari. Jakarta
- Eisenstadt, S.N. (terj. Chandra Johan). 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Gottschalk, Louis (terj. Nugroho Notosusanto). 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Grolier International Inc. 1989. *Negara dan Bangsa: Asia, Australia, Selandia Baru, Oseania, Eropa*. Jakarta: Grolier International Inc

- Hartono, A. Budi dan Juliantoro, Dadang. 1997. *Derita Paksa Perempuan, Kisah Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hoffer, Eric (terj. Masri Maris). 1988. *Gerakan Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hudson, Michael C. dan Taylor, Charles Lewis. 1972. *World Handbook of Political and Social Indicators*. New Haven and London: Yale University Press
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1990. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 Jilid 1, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius
- . 1988. *Indonesia Abad Ke-20 Jilid 2, Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius
- . 2003. *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma
- Nishihara, Masashi (terj. Dean Praty R). 1994 *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang, Hubungan Indonesia Jepang 1951-1966*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Nugroho Notosusanto (ed). 1980. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975*. Jakarta: PT Tira Pustaka
- Panggabean, M. 1993. *Berjuang dan Mengabdikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Raillon, Francois. 1984. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES
- Ramadhan K.H.1992. *Bang Ali, Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Said, Tribuana.(Peny.) 1992. *Rosihan Anwar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sakanoto, Taro (terj. Sylvia Tiwon). 1982 *Jepang Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Yayasan Obor
- Sanit, Arbi. 1989. *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa, Refleksi dan Gagasan Alternatif*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan LBH
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1978. *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis Dalam Gerakan Protes Mahasiswa*. Jakarta: Bulan Bintang
- Siregar, Hariman. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama
- Suryomiharjo, Abdurrachman (ed). 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Suwarno, P. J. 1999. *Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma
- Tahiro. 2003. *Sepak Terjang Jepang di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Humaniora
- Thee Kian Wie. 2004. *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru, Esai-esai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Majalah dan Koran:

- Fatah, R. Eep Saefulloh. (1994, April). Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi, Potret Pergeseran Politik Orde Baru. *Prisma* 4 Th. XXIII. Hlm. 3-21
- Gunadi, K. (1976, September). Penanaman Modal Asing dan Kesempatan Kerja. *Prisma* 9 Th. V. Hlm14-22
- Hartanto, Frans Mardi dan Harahap, Filino. (1972, Februari). Beberapa Aspek Peranan Industri Dalam Pembangunan Regional. *Prisma* 2 Th. II. Hlm. 10-13
- Kuncoro, Mudrajad. (1989, November). Dampak Arus Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik. *Prisma* 9 Th. XVIII. Hlm26-47
- Kuntjoro-Jakti, Dorajatun. (1978, November). Mau Kemana Kita Dengan Pembangunan Ekonomi Ini? *Prisma* 10 Th. IX. Hlm. 10-15

- Kuntjoro-Jakti, Hero U. (1981, Maret). Pertumbuhan Jepang dan Setelah Menjadi Kaya, Ke Arah "Peran Internasional" yang Mana? *Prisma* 3 Th. X. Hlm. 39-53
- (1988, September). Kepentingan Jepang di Dalam Pembangunan Industri Orde Baru. *Prisma* 9 Th. XVII. Hlm. 55-69
- Kartadjoemena, H.S. (1973, Februari). Multinational Corporation, Kebebasan Nasional dan Transformasi Sistem Hubungan Internasional. *Prisma* 1 Th. II. Hlm. 26-37
- Malley, Michael Sean. (1991). Soedjono Hoemardani dan Orde Baru, Aspri Presiden Bidang Ekonomi, 1966-1974. *Edisi Khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991*. Hlm 104-120
- Mangkusuwondo, Suhadi.(1971, November). Faktor-faktor Non- Ekonomi Dalam Penentuan Sasaran dan Cara Pendekatan Pembangunan. *Prisma* 1 Th. I. Hlm16-20
- Oey, Mayling. (1983, Mei). Organisasi Perusahaan Jepang Suatu Analisis Sosiologis. *Prisma* 5 Th. XII. Hlm. 43-54
- Osamu, Okada. (1979, November). Ekspansi Ekonomi Jepang ke Asia Tenggara, Tinjauan Perdagangan dan ASEAN. *Prisma* 11 Th. VIII. Hlm 81-93
- Panglaykim, J. (1983, Maret). Pengaruh Resesi Terhadap MNC. *Prisma* 3 Th. XII. Hlm 38-49
- Parera, Frans Meak. (1991). Ketokohan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Reformator Budayawan Perintis Orde Baru. *Edisi Khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991*. Hlm. 41-80
- Rachwartono, Rio. (1971, November). Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Haruskah dipertentangkan Satu Sama Lain? *Prisma* 1 Th. I. Hlm.24-28
- Raharjo, M. Dawam. (1983, Mei). Zuhd-nya Pedagang Zen. *Prisma* 5 Th XII. Hlm. 2
- .(1985, November). Gerakan Rakyat dan Negara. *Prisma* 11 Th. XIV. Hlm. 3-15
- Roesnadi, Sutomo. (1979, Mei). Dilema Ketergantungan, Pengalihan Teknologi dan Disiplin Nasional Dunia Ketiga. *Prisma* 5 Th. VIII. Hlm. 33-41

- Sagir, Soeharsono. (1981, Maret). Peranan Bantuan Luar Negeri dalam Pembangunan Indonesia. *Prisma* 3 Th. X. Hlm. 54-63
- Sasono. Adi. (1980, Desember). Tesis Ketergantungan dan Kasus Indonesia. *Prisma* 12 Th. IX. Hlm 73-85
- Siahaan, Lukman. (1977, April). Satu Dasawarsa Bantuan Luar Negeri di Indonesia. *Prisma* 4 Th. VI. Hlm.29-40
- Silalahi, Pande Radja. (1983, Mei). Penataan Kembali Hubungan Ekonomi Jepang, Suatu Tuntutan dan Kebutuhan. *Prisma* Th. XII. 3-13
- Sjahrir. (1986, Maret). Pengamanan Dana dan Daya Negara. *Prisma* 3 Th.XV. Hlm. 12-22
- Soemarwoto, Otto. (1975, Juni). Pengaruh Lingkungan Proyek Pembangunan. *Prisma* 3 Th. IV. Hlm. 75-78
- Strout, Alan M. (1973, Februari). Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Prisma* 1 Th. II. Hlm. 55-60
- Thee Kian Wie. (1983, Juli). Menyingkap Peranan Modal Jepang. *Prisma* 7 Th. XII. Hlm. 28-39
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1981, November). Penanaman Modal Jepang di Asia Tenggara. *Prisma* 11 Th. X. Hlm. 50-57
- (1983, Juli). MNC Jepang dan Perusahaan Negara di Asia Tenggara. *Prisma* 7 Th. XII. Hlm. 40-52
- Toru Yano. (1982, Agustus). Dimensi Keamanan dalam Hubungan Jepang-ASEAN. *Prisma* 8 Th.XI. Hlm.39-45
- Kuntjoro-Jakti, Hero U. (1993). Dampak Pembangunan di Jepang, Korea Selatan dan Indonesia, Tinjauan Ekonomi-Politik Internasional. *Jurnal Ilmu Politik* 4 Th. II. Hlm. 71-82
- Latief, Dochak. (1980). Kenyataan Operasinya Modal Asing di Indonesia dan Demokrasi Ekonomi. *Informasi* 2 Th. X. Hlm. 35-46
- Thee Kian Wie. (1982). Pembangunan Ekonomi Indonesia di Bawah Pemerintahan Orde Baru. *Masyarakat Indonesia* 1 Th. IX. Hlm. 103-120

- Wiratno, Siti Daulah. (1991, April). Bantuan Luar Negeri dalam Hubungan Indonesia Jepang. *Prospektif* 4 Th. IV. Hlm. 347-359
- Bur Rasuanto. (1974, Januari 26). Musibah Bagi Golongan Menengah & Bawah. *Tempo*. Hlm 8
- N.N. (1974, Februari 2). Presiden Adalah Pangkoptib (Dan Tanpa Aspri). *Tempo*. Hlm 5
- N.N. (1974, Juli 27). Hariman, Ikan & Kapal. *Tempo*. Hlm7
- Slamet Djabarudi. (1975, April 19). "Apakah Saya Berkhianat" . *Tempo*. Hlm. 5
- N.N. (1985, Februari 23). Kecelakaan di Pearl Harbor. *Tempo*. Hlm. 27
- N.N. (1988, September 17). Kopkamtib, Dari Masa ke Masa. *Tempo*. Hlm. 27
- Didi Prambadi & Seiichi Okawa. (1992, Juli 25). Setelah Pemerintah Jepang Tak Bisa Mengelak Lagi. *Tempo*. Hlm. 14
- N.N. (1993, Oktober 9). Dewi & Pampasan Perang. *Tempo*. Hlm. 52
- Zein, Winarno. (1992, Agustus 1). Motivasi Penanaman Modal. *Tempo*. Hlm. 96
- Sjahrir. (1988, Juli 23). Jepang-Indonesia, Gelombang Hubungan Pasang Surut Yang Permanen. *Tempo*. Hlm. 100
- Sadli, M. (2001, Juni 10). Widjojo Di Tengah Upaya Penyelesaian Krisis Ekonomi. *Tempo*. Hlm.122
- N.N. (1996, Januari-Februari). Bredel Malari di Mata Mashuri. *Suara Independen* 7 Th.II. Hlm 3-5
- Shambazy, Budiarto. (2001, Januari 17). Tiga Puluh Tahun Tragedi Malari. *Kompas*. Hlm.11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

SILABUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Semester: 3/6

Alokasi Waktu : 4 jam

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia di tengah usaha mengisi kemerdekaan
Materi Pokok	Perkembangan Masyarakat dan Negara Pada Masa Orde Baru
Hasil Belajar	Memahami Gerakan Anti Jepang yang terjadi di Jakarta tahun 1974
Indikator	1.Menjelaskan latar belakang munculnya Gerakan Anti Jepang tahun 1974 2.Menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerakan anti Jepang tahun 1974 3.Menganalisis dampak Gerakan Anti Jepang tahun 1974 bagi politik, ekonomi, dan sosial 4.Menjelaskan nilai-nilai nasionalisme yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik
Tujuan	Siswa mampu menjelaskan :

<p>Pembelajaran</p>	<p>1.Latar belakang munculnya gerakan anti Jepang tahun 1974</p> <p>2.Proses terjadinya Gerakan Anti Jepang tahun 1974 di Jakarta</p> <p>3.Dampak Gerakan Anti Jepang tahun 1974 terhadap politik, ekonomi, dan sosial</p>
<p>Langkah Pembelajaran</p>	<p>I. Pendahuluan</p> <p>-Apersepsi</p> <p>-Penyampaian tujuan pembelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang munculnya Gerakan Anti Jepang tahun 1974. <ol style="list-style-type: none"> a.Dominasi ekonomi Jepang di Indonesia b. Rivalitas Elite Politik c. Protes Masyarakat Terhadap Strategi Pembangunan 2. Proses terjadinya huru hara anti Jepang tahun 1974 <ol style="list-style-type: none"> a. Pertemuan Mahasiswa dan Presiden Soeharto b. Demonstrasi di Bandara Halim Perdanakusuma c. Demonstrasi menjadi kerusuhan di jalanan Jakarta d. Usaha mengatasi kerusuhan 3. Dampak huru hara anti Jepang tahun 1974 <ol style="list-style-type: none"> a. Pembredelan Pers b. Pergeseran Elite Politik Pembatasan c. Pembatasan Kebebasan Akademik

	<p>d.Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan</p> <p>e.Hubungan Mahasiswa dan Militer Berakhir</p>
<p>Sarana dan Sumber Pembelajaran</p>	<p>A. Sarana Pembelajaran</p> <p>1. Peta Jakarta saat terjadi huru hara anti Jepang tahun 1974</p> <p>2. Foto demonstrasi dan aksi anti Jepang tahun 1974</p> <p>B. Sumber Pembelajaran</p> <p>1. Abar, Akhmad Zaini. 1995. <i>1966-1974, Kisah Pers Indonesia</i>. Yogyakarta: LKiS</p> <p>2. Aly, Rum. 2004. <i>Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974</i>. Jakarta: Penerbit Buku Kompas</p> <p>3. Arifin, Marzuki. 1974. <i>Peristiwa 15 Januari 1974</i>. Jakarta: Publishing House Indonesia</p> <p>4. Cahyono, Heru. 1998. <i>Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan</p> <p>5. Nishihara, Masashi(terj. Dean Praty R). 1994. <i>Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang, Hubungan Indonesia Jepang 1951-1966</i>. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti</p> <p>6. Raillon, François(terj. Nasir Tamara). 1984. <i>Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan</i></p>

	<p><i>Konsolidasi Orde Baru 1966-1974</i>. Jakarta: LP3ES</p> <p>7. Tahiro. 2003. <i>Sepak Terjang Jepang di Indonesia</i>. Jakarta: Lembaga Humaniora</p>
Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami gerakan anti Jepang tahun 1974, dapat dilakukan melalui tes tertulis berbentuk esai baik secara tertutup maupun terbuka 2. Memberikan tugas kepada siswa 3. Mencatat dan mengamati kegiatan siswa selama proses belajar dan diskusi di kelas. 4. Portofolio – guru mencatat aktivitas siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan. Guru mengumpulkan seluruh siswa, baik individual maupun kelompok dalam map yang telah tersedia
Alat Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan latar belakang munculnya Gerakan Anti Jepang Tahun 1974! 2. Bagaimanakah proses terjadinya huru-hara anti Jepang tahun 1974 di Jakarta? 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari huru hara anti Jepang tahun 1974

Yogyakarta, 21 September 2005

Guru Bidang Studi

Thomas Camar

PETISI 24 OKTOBER 1973

Kami, Pemuda-pemudi Indonesia, milik dan pemilik nusa dan bangsa tercinta, dari tempat terbaringnya kusuma-kusuma bangsa yang telah memberikan milik mereka yang paling berharga bagi kemerdekaan dan kekayaan bangsa Indonesia, menyatakan kecemasan kami atas kecenderungan keadaan ini yang menjurus pada keadaan yang makin jauh dari apa yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh bangsa.

Bahwa dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab di hari yang keadaannya sangat ditentukan oleh masa kini, dimana kami, sebahagian daripadanya, merasa berkewajiban untuk mengingatkan Pemerintah, militer, intelektual/teknokrat, politisi, untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun suatu strategi yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan
2. Segera membebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastian dan pemeriksaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga dan pengangguran
3. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi serta pendapat masyarakat luas mendapat kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya
4. Yang paling berkepentingan akan masa depan adalah kami, oleh karena itu penentuan masa depan – yang tidak terlepas dari keadaan kini – adalah hak dan kewajiban kami.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa
menyertai perjalanan Bangsa Indonesia
Kalibata, Peringatan Sumpah Pemuda
Tahun 1973

DEWAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Sumber: Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Jakarta: Mantika Media Utama, 1994

Ikrar Warga Negara Indonesia

Kami warga negara Indonesia yang berkumpul pada tanggal 30 November malam, bertempat di Balai Budaya Jakarta, menyadari akan arah dan perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa dewasa ini, berikrar

1. menegakkan kembali kebanggaan nasional yang sebagian telah dicemarkan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia
2. mengusahakan dengan segala cara yang berdasarkan hukum untuk menegakkan kembali kebanggaan nasional tersebut
3. menetapkan hari ini, tanggal 30 November 1973 sebagai titik tolak dari usaha ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati ikrar ini

PIDATO PERNYATAAN DIRI MAHASISWA

Rekan-rekan sekalian,

Malam ini adalah malam yang istimewa bagi kita. Jika penutupan tahun-tahun yang lalu kita hanya merasa perlu berkumpul di sini mencanangkan malam ini sebagai: “Malam Keprihatinan”. Tentu ada sebab-sebabnya. Sebab yang paling nyata adalah tahun 1973 yang telah menimbulkan kebingungan-kebingungan dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu perasaan kita. Tetapi yang terang bagi kita, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, malam ini bukanlah malam pesta pora dan peragaan kemewahan. Tetapi sebaliknya, malam ini justru merupakan kesempatan untuk sejenak berhenti dari kesibukan kita sehari-hari dan merenungkan suasana prihatin yang kini sedang mencekam kita dan rakyat Indonesia pada umumnya. Tetapi lebih dari itu adalah bahwa protes kita terhadap keadaan yang tercermin dalam “Petisi 24 Oktober” ternyata menuntut kita untuk lebih menegapkan langkah dan menjermihkan pikiran agar kehadiran kita dalam masyarakat menjadi nyata dan berarti. Apalagi kalau kita bertekad untuk menanggung beban sejarah. Karena sejarah telah membuktikan bahwa perubahan-perubahan besar selalu diawali oleh kibaran bendera Universitas.

Mari kita baca beban sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Beban kita adalah membuat rakyat menganggur untuk mempersoalkan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi yang tidak menguntungkan rakyat. Beban kita adalah mengetatkan gendengan dengan sesama generasi muda memikirkan masa kini dan masa depan. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menggalakkan keberanian rakyat untuk menyuarakan diri. Semua itu adalah beban yang tidak ringan – untuk tidak mengatakan berat sekali. Namun pada akhirnya berat atau ringan beban itu tetap merupakan beban kita. Sekali kita mengelak, untuk selamanya kita akan menjadi warga negara yang dikutuk sejarah. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah

menghentkan kebisuan yang ditimbulkan oleh himbauan kenikmatan yang dijanjikan kepada kita. Dan juga kebisuan akibat feodalisme yang mementingkan sikap nrimo, Apatis dan antipartisipasi. Artinya, kita harus membebaskan diri dari mitos-mitos yang menempatkan diri kita dalam posisi bisu dan terbelenggu. Misalnya, mitos bahwa cinta kasih dan kemurahan hati kelompok-kelompok kecil penguasa jika mereka berbuat baik adalah memang betul-betul dari hati yang tulus; mitos bahwa setiap ucapan dan setiap tindakan penguasa adalah untuk kepentingan rakyat; mitos bahwa pemberontakan terhadap nilai-nilai budaya feodal adalah berdosa terhadap masyarakat.

Untuk bisa menilai situasi masa kini dan meraba kemungkinan masa depan, marilah kita teliti perkembangan yang terjadi di negara kita dalam bidang politik, ekonomi serta kaitannya dengan suasana internasional, yang satu sama lain sangat erat sekali hubungannya. Perkembangan ekonomi yang sangat mengejutkan akhir-akhir ini tentu bukan hanya akibat dari suatu strategi pembangunan ekonomi semata-mata, tetapi juga disebabkan oleh strategi politik yang dilancarkan sejak 1966. Setelah secara moral dan konstitusional Jendral Suharto menjadi Presiden di negeri ini, maka pembangunan ekonomi telah dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan mitos baru yang banyak menimbulkan banyak harapan. Tetapi ternyata perkembangan ekonomi telah menolak kemauan penguasa untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai alat legitimasi dan mitos politik semata-mata. Hal ini disebabkan karena sikap penguasa yang demikian itu akan selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang menguntungkan kelompok yang ada di sekitar kekuasaan.

Akibatnya adalah bahwa kesibukan pembangunan dan pemerintah sendiri menjadi sesuatu yang asing bagi rakyat. Dan lebih dari itu, kini telah terkesan dalam hati rakyat bahwa pembangunan ekonomi berarti pengusuran tanah, pemaksaan penjualan beras kepada pemerintah dan kehidupan yang semakin sulit di desa-desa. Sebaliknya bagi kelompok kecil di sekitar kekuasaan, pembangunan ekonomi merupakan saat yang memberi kesempatan kepada mereka untuk menumpuk kekayaan dan memuaskan nafsu terhadap barang-barang mewah. Kelompok ini

terang berkepentingan untuk mempertahankan keadaan dengan segala macam peralatan cara dalam politik Rakyat dengan demikian akan terus menerus menjadi pelengkap penderita yang dipaksa untuk diam dan tidak berdaya. Bagi kita generasi muda, kecenderungan ini merupakan bahaya yang mengancam pada saat ini dan di masa depan. Ancaman itu berupa larangan yang berbau “mempersoalkan perkembangan masyarakat”, sehingga kita menjadi warga negara yang tidak peka terhadap situasi sekitar; kita hanya boleh menyibukkan diri dengan kegiatan yang menunjang pengukuhan politik dari segelintir orang yang menikmati kehidupan enak dan mewah dalam pembangunan.

Hasil nyata dari pembangunan ekonomi menurut kami adalah bahwa sejak Pelita hingga berakhir nanti 1974, walaupun bertumbuh tujuh persen setahun, ketidakadilan sosial dan ekonomi yang menguasai uang dan sumber-sumber ekonomi dengan kekuasaan politik dalam bentuk populer populer berupa kerjasama antara kelompok cina dan jendral-jendral. Tidak mengherankan jika sebagian rakyat yang tidak jendral dan tidak cina tidak menikmati pembangunan ekonomi seperti sekarang ini. Terang bagi kita, sebagai unsur masyarakat dan masyarakat tidak mungkin menjadi cina dan jendral sehingga alternatif pembangunan yang terbuka adalah menyadarkan jendral-jendral dan cina-cina menjadi warga negara biasa seperti sebagian rakyat. Kalau tidak, maka kemungkinan lain yang harus ditempuh. Pemerintah sering mendengung-dengungkan pembangunan ekonomi dalam bentuk ditekannya inflasi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berlangsungnya industri-industri barang-barang dan jasa-jasa dalam kepesatan pertumbuhan yang fantastis. Tetapi kalau hasil-hasil itu dikuliti, sesungguhnya isinya tidak lebih dari berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis dimana sebagian kecil masyarakat menghisap begiab terbesar rakyat. Ini bukan mengada-ada, karena tidak kurang dari seorang Dr. Hatta, seorang konseptor ide pembangunan ekonomi dalam UUD' 45 menyatakan demikian. Kalau seorang Dr. Hatta yang mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah bangsa kita telah menyatakan demikian, sulit bagi pemerintah untuk berdiam diri. Pada kesempatan ini kami ingin mengajukan pertanyaan pada

pemerintah: Apakah pembangunan ekonomi sudah menyeleweng dari UUD' 45 atau tidak? Kalau memang benar, dan kami yakin benar, kami serukan kepada pemerintah untuk mengoreksi sistem ekonomi sekarang. Kalau tidak, mari kita bersama-sama mengoreksi pemerintah. Pada saat ini sering dikemukakan bahwa ekonomi Indonesia sangat tergantung pada modal asing. Juga sering dikemukakan bahwa kekuatan ekonomi asing hanya menguras sumber-sumber alam yang kita punyai dan sebaliknya atas jasa-jasanya itu mereka membanjiri Indonesia dengan barang-barang mewah hanya bisa dibeli oleh kelompok kecil yang berkuasa. Kami ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian. Apakah kita perlu berpuluh-puluh ribu mobil mewah setiap bulan? Apakah kita perlu mengimpor pakaian-pakaian mewah dari rumah-rumah mode di Paris? Apakah perlu kita mengimpor sepatu yang harganya lima belas kali dari harga sepatu dalam negeri? Apakah kita perlu mengimpor film-film yang bertendens asosial? Bukankah akan lebih baik kalau kita memikirkan usaha-usaha penggunaan produksi kita sendiri yang mungkin kalah mentereng tetapi sama kegunaannya? Sehingga kita tidak perlu membuang-buang bermilyar-milyar rupiah untuk mengimpor barang-barang mewah tadi. Kalau ini bisa dilakukan maka ladang-ladang minyak yang akan habis nanti, hutan-hutan kita yang akan gundul nanti dan karet yang kegunaannya yang semakin menurun di masa mendatang, tidak menyebabkan Indonesia tenggelam bersamanya.

Sebaliknya marilah kita dengan kepala dingin meneliti secara mendalam masalah-masalah yang kedengarannya mentereng, yaitu masalah internasional. Soal-soal internasional ini betapapun juga besar pengaruhnya kepada kita dan seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Orde Baru telah memulai arah politik luar negerinya dengan suatu kebijaksanaan yang jalin menjalin dengan kepentingan perekonomian negara pada saat itu, yang tercakup di dalam pertanyaan pemerintah tertanggal 4 April 1966. Kondisi perekonomian Indonesia yang telah membawa beban berat kepada rakyat Indonesia pada masa Orde Lama telah sama kita ketahui. Perekonomian demikian itulah yang menggariskan kebijaksanaan luar negeri yang menitikberatkan kepada

usaha-usaha penanggulangan dengan mencari sumber-sumber luar sebagai suatu jalan keluarnya.

Masalah bantuan luar negeri dan modal asing merupakan gejala yang wajar, suatu gejala yang menunjukkan adanya saling ketergantungan antar bangsa di dunia. Masalah saling ketergantungan ini terutama pada tingkat peradaban dunia sekarang adalah masalah yang tidak bisa dihindarkan. Akan tetapi sudah barang tentu saling ketergantungan ini meminta persyaratan-persyaratan. Persyaratan yang utama adalah seberapa jauhkah ia membawa keuntungan kepada masing-masing kepada masing-masing pihak yang terlibat. Jadi diperlukan persyaratan yang kedua, yaitu pihak-pihak yang terlibat harus menjaga kemampuan kondisi dalam negerinya sendiri, agar mendapatkan posisi yang sederajat, dan dengan demikian pula mencegah ketergantungan sepihak.

Demikianlah, maka pernyataan pemerintah 4 April 1966 itu telah berkembang menjadi suatu keadaan dimana perekonomian negara ditopang oleh lima sektor. Pertama adalah bantuan luar negeri; kedua, modal asing; ketiga, adalah ekspor karet; keempat, minyak bumi; dan kelima adalah kayu. Sedangkan kita ketahui bahwa peningkatan hasil-hasil ekspor karet, minyak bumi, dan kayu pun tidak mungkin, tanpa ditunjang oleh sumber-sumber luar tadi. Dengan ini jelaslah betapa memang bantuan luar tadi. Dengan ini jelaslah betapa memang jelaslah betapa memang bantuan luar negeri dan modal asing merupakan faktor pokok dalam perekonomian negara, dan bukanlah faktor pelengkap sebagaimana seringkali dikemukakan oleh para pejabat. Betapapun memang ada kenaikan dari hasil eksporkita secara keseluruhan, akan tetapi ketergantungan tadi tetap faktor pokok, yang jelas dipertunjukkan, misalnya oleh kenaikan-kenaikan pinjaman lewat IGGI.

Sumber-sumber luar yang masuk ke Indonesia cenderung diusahakan dari negara-negara Barat (termasuk Jepang) daripada negara-negara sosialis. Kondisi obyektif kelihatan memperkeras kecenderungan tadi. Akan tetapi masalahnya adalah timbulnya gejala-gejala yang membatasi aliran-aliran sumber tadi. Pembatasan-pembatasan ini berasal dari dalam negeri berupa kecaman yang pedas dari masyarakat

terhadap bantuan luar negeri dan modal asing dari negaranya, berupa tuntutan pula untuk lebih meningkatkan kondisi sosial ekonomi sendiri. Pembatasan yang berasal dari perkembangan dunia internasional berupa keguncangan moneter, dan yang terlebih dirasakan adalah kelangkaan dari sumber-sumber alam (bahan mentah), yang sekaligus menunjukkan betapa sebenarnya negara-negara menengah untuk memperjuangkan kepentingannya bisa saja berperan dalam menghadapi negara-negara besar.

Oleh karena pembatasan-pembatasan yang datang dari negara-negara Barat, maka semakin besarlah peranan Jepang dalam mengalirkan sumber-sumbernya kepada negara-negara di Asia Tenggara. Dan sudah barang tentu hal inipun dialami oleh Indonesia.

Apabila kita kembalikan kepada masalah saling ketergantungan antara bangsa khususnya antara Jepang dan Indonesia, maka ada masalah yang akan timbul. Dari Jepang sebagai suatu negara dengan tingkatan teknologi yang tinggi diharapkan dapat memberikan modal, pengalihan teknologi dan industri, pengalihan keahlian pengolahan dan penggalian sumber-sumber alam, dan lain-lain. Sedangkan dari Indonesia, diharapkan memberikan sumber-sumber alam bagi industri-industri Jepang dan sebagai pasar dari barang-barang industri Jepang. Akan tetapi di balik semua itu, ada cerita tersendiri mengenai Jepang ini. Upah buruh yang terus menanjak dan pengotoran udara memaksa pengalihan pabrik-pabrik dengan padat karya ke negara-negara lain, antara lain pabrik tekstil ke Indonesia. Sedangkan politik minyak bumi Arab telah menunjukkan sebenarnya betapa lemah kekuatan ekonomi Jepang, pula menunjukkan betapa sebenarnya Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak bumi yang cukup besar bisa bermain pula dalam hubungan saling ketergantungan ini.

Akan tetapi, dan disinilah letak masalahnya, kita mempergunakan kekuatan-kekuatan kita ini. Dalam masalah minyak misalnya, sistem ijon yang dibawa dalam kontrak, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang “konyol” di saat-saat harga minyak di dunia menanjak yang tidak kita nikmati. Keadaan ini pulalah yang sekaligus mentertawakan solidaritas negara-negara tetangga sebab kitapun tidak bisa

menolong sesama negara tetangga yang kekurangan bahan bakar, oleh karena keterikatan dengan Jepang ini. Dalam usaha perkebunan (dan khusus untuk soal ini marilah kita berdoa mudah-mudahan hutan kita tidak habis gundul, sebagai nasib yang dialami oleh Filipina melalui kontrak dengan Jepang pula). Laporan komisi IV telah menunjukkan betapa kerugian-kerugian berada di pihak kita dan betapa bisnis perkebunan telah memberikan keuntungan besar bagi investor asing.

Hubungan Indonesia-Jepang telah semakin menempatkan Indonesia dalam posisi ketergantungan dan sekaligus apabila dikaitkan pada sistem internasional maka kelemahan Indonesia telah menempatkan negara ini sebagai tawanan dan bukan sebagai peserta dari sistem internasional tersebut.

Kelemahan Indonesia dalam penggunaan kekuatan-kekuatannya, sebenarnya bisa disebabkan oleh Indonesia sendiri. Di sinilah terletak kelemahan dari segi pengawasan di dalam sistem kita sendiri. Jelas bahwa konstelasi politik dan kondisi-kondisi ekonomi dan cara-cara elite penguasa memandang masalah-masalah nasional, telah merupakan bagian yang penting dan memberi warna tersendiri kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri suatu negara. Di Indonesia, kelompok-kelompok elite penguasa untuk memperbesar porsi "posisi tukar"-nya di dalam negeri, telah menginterpretasikan dan mengambil bagian kepada kebijaksanaan luar negeri Indonesia, dan kesemuanya ini tidak memberikan kesatuan dalam kebijaksanaan tadi dan sudah barang tentu melemahkan posisi Indonesia dalam sistem internasional ini.

Persoalannya terletak kepada saling kait mengkaitnya kepentingan dari elite penguasa dalam kekuasaan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Ini semua bahkan menjadi suatu gejala yang membahayakan bagi kehidupan bernegara bagi Indonesia, apalagi apabila dihubungkan dengan pernyataan dari Bung Hatta di tahun 1970, bahwa korupsi telah membudaya. Jadi, kepentingan dari elite penguasa dalam kompetisi kekuasaan telah berkompetisi pula untuk memperoleh sumber-sumber politik (uang, informasi, massa, dan lain-lain), yang kesemuanya mengeraskan kecenderungan korupsi. Apabila kita kembalikan kepada sektor-sektor yang

menunjang perekonomian negara, maka bantuan luar negeri dan modal asing menjadi faktor, malahan turut memperkeras kompetisi korupsi dalam mendapatkan sumber-sumber politik, untuk mendapatkan posisi tukar yang lebih dalam porsi kekuasaan.

Jadi baiklah kita menerima kenyataan pahit bahwa kenaikan bantuan luar negeri dan modal asing adalah merugikan kepada Indonesia. Masalahnya adalah bahwa sumber-sumber luar tadi tidak menguntungkan rakyat banyak, masalahnya karena sumber-sumber luar tadi tidak sampai kepada rakyat banyak. Jelas bahwa elite penguasa di Indonesia tidak mau bertanggung jawab untuk soal ini. Padahal, apabila kita mempersoalkan nasib bangsa, ada pelajaran berharga dari sejarah.

Sejarah misalnya telah mencatat akibat hubungan saling ketergantungan antar Amerika Serikat dan negara-negara sedang berkembang, terutama Amerika Latin. Pada sekade 1950-an, arus modal dari Amerika Serikat lebih banyak diarahkan kepada negara-negara sedang berkembang, terutama negara-negara Amerika Latin. Dalam hal ini Amerika Serikat menjual barang-barang industrinya dan menanam modal disana, sedangkan Amerika Latin menjual sumber-sumber alamnya. Akan tetapi kecenderungan ini berubah. Pada dekade tahun 1960-an, arus modal Amerika Serikat lebih banyak mengalir ke negara-negara sudah maju dalam hal ini terutama Eropa Barat. Jadi yang terjadi selanjutnya adalah bahwa interdependensi dari negara-negara maju dengan negara-negara maju, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang (Amerika Latin) tadi malahan semakin tergantung kepada negara-negara maju (Amerika Serikat). Amerika Latin tetap tergantung kepada Amerika Serikat dalam teknologi dan industri, menjadi pasar barang-barang industri Amerika Serikat, dan sementara itu sumber-sumber alamnya disedot dan diolah untuk kepentingan Amerika Serikat.

Ini yang kami khawatirkan akan terjadi dalam hubungan antar Indonesia dan Jepang. Apalagi Jepang telah menunjukkan kebuasan dalam cara-cara mengeruk keuntungan. Dengan demikian, sebenarnya hubungan Indonesia dan Jepang bukan saling akan tetapi ketergantungan sepihak yaitu dari Indonesia terhadap Jepang. Dan

apabila tidak ditinjau kembali kami kira jang-jangan nasib Indonesia akan sama dengan nasib negara-negara Amerika Latin tersebut di atas.

Maka, rekan-rekan kalau ini yang terjadi tahun 1974 dan seterusnya hanyalah pengulangan sejarah sebelum kemerdekaan ketika kita dijajah Jepang. Sudah tentu bentuknya berlainan karena bila dulu yang ada adalah Kempetai Jepang, maka sekarang namanya menjadi Toyota, Mitsubishi, Mitsui, dan lain-lain. Kempetai dan Mitsubishi antara lain mempunyai tugas menghisap bangsa, kekayaan alam dan darah rakyat Indonesia. Sebagaimana kita dulu menolak Kempetai, sekarang kita pun harus bangkit melawan dominasi Jepang.

Rekan-rekan sekalian,

Tibalah kami pada pidato ini. Pidato ini saya tutup dengan mengemukakan kesimpulan dan langkah lanjut dari perjuangan mahasiswa.

Tidak ada hasil yang diperoleh tanpa kerja keras, tanpa perjuangan dan tanpa keberanian. Karena kalau kita tidak mau dikekang diancam baik oleh kekuasaan ataupun cecunguk-cecunguknya, maka kita mahasiswa harus berani bersikap dan bergerak untuk mewujudkan pendapat-pendapat yang telah diperolehnya. Ingat, pada akhirnya yang menentukan bukanlah analisa yang bagus-bagus yang ilmiah, tetapi tindak nyata yang mengubah keadaan. Kepada tukang becak, mari abang-abang kita bergerak bersama untuk membuka kesempatan kerja. Kepada para penganggur yang puluhan juta, yang berada di desa-desa dan kota-kota untuk bergerak untuk kesejahteraan sosial. Kepada warga negara Indonesia yang bekerja pada perusahaan asing, mari kita bergerak untuk menuntut persamaan hak dengan karyawan-karyawan asing. Dan akhirnya kepada para koruptor penjual bangsa, pencatut-pencatut sumber alam Indonesia yang mengejar-ngejar komisi sepuluh persen, kami serukan bersiap-siaplah menghadapi gerakan kami yang akan datang.

Akhirnya terima kasih atas kesediaan rekan-rekan yang bersedia mengorbankan waktunya menghadiri malam tirakatan ini menjadi titik tolak kita yang



penting dalam proses peragian menuju perjuangan baru. Fajar telah menyingsing, horison baru mulai tampak.

Selamat tinggal tahun 1973 dan Selamat Datang Tahun Baru 1974. Kita semua sudah siap menjelajahnya.

Terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 1973

Ketua Umum Dewan Mahasiswa
Universitas Indonesia

Hariman Siregar

TUNTUTAN MAHASISWA INDONESIA

1. Pola pembangunan yang berorientasi kepada keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak
2. Terwujudnya iklim politik berazaskan demokrasi, sehingga pemerintahan adalah benar-benar milik rakyat dan untuk kepentingan rakyat
3. Pembangunan hukum untuk tegaknya tertib hukum dan mekanisme peradilan yang tidak memihak, dimana setiap warga mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum
4. System ketata-negaraan yang berdasarkan UUD 1945 secara murni
5. Usaha-usaha menekan kenaikan harga dan meningkatkan daya beli rakyat
6. Pemberantasan segala bentuk kemewahan dan mencegah serta mengadakan pemberantasan korupsi

DEKLARASI MAHASISWA INDONESIA

1. Hendaknya pemerintahan dijalankan dengan kepemimpinan yang lebih bersifat terbuka, lebih memperbesar distribusi kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal yang menjamin terhindarnya sentralisasi.
2. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi, serta untuk menjamin partisipasi rakyat yang maksimal, efektifitas pembangunan hendaknya pemerintahan terdiri dari baik orang-orang yang profesional maupun orang-orang yang mendapat dukungan rakyat.
3. Hendaknya pemerintah dalam sikap politik luar negerinya lebih mementingkan kepentingan dan kebanggaan nasional serta menjamin kedaulatan Indonesia untuk Indonesia
4. Strategi Pembangunan hendaknya menjamin keseimbangan pertumbuhan bidang ekonomi, politik, dan sosial, distribusi hasil pembangunan secara merata, serta tumbuhnya enterpreneur bangsa
5. Untuk menjamin pemerintahan yang kuat dan bersih, kepastian hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, refungsionalisasi lembaga-lembaga yang konstitusional dan lembaga-lembaga yang inkonstitusional harus terjamin dalam setiap perwujudan
6. Pendidikan adalah faktor utama kelamjutan kebudayaan bangsa, oleh karenanya harus diberikan kesempatan yang merata serta sistim pendidikan harus menunjang dan sesuai dengan pembangunan, menjamin terbentuknya manusia-manusia Indonesia yang penuh dengan inisiatif, berkepribadian dan bertanggung jawab

Lampiran 7



Sumber: Nugroho Notosusanto (ed). 1980. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975*.
Jakarta: PT Tira Pustaka

Lampiran 8



Para mahasiswa dari 12 Dewan Mahasiswa yang berkumpul di Kampus UKI, 12 Januari 1974, dalam "Apel Siaga" datang dengan beraneka ragam poster. (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Lampiran 9



Menjelang terjadinya peristiwa Malari 1974, para mahasiswa dari 12 Dewan Mahasiswa mengadakan "Apel Siaga" di Kampus UKI, Jl. Diponegoro, Jakarta, 12 Januari 1974. (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Lampiran 10



"Penyambutan" kedatangan PM Jepang Tanaka, 14 Januari 1974

Sumber: Hariman Siregar. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama

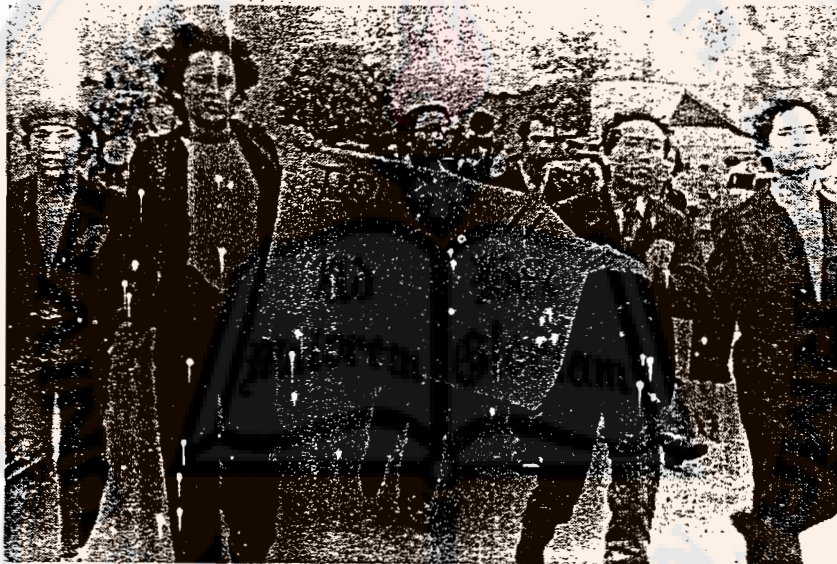
Lampiran 11



Appel mahasiswa di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta

Sumber: Hariman Siregar. 1994. *Hati Nurani Seorang Démonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama

Lampiran 12



"Tolak!! Dominasi Modal Asing "Jepang"; demikian bunyi poster yang mereka bawa dalam pawai massal itu, 15 Januari 1974.

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Lampiran 13



Demo Mahasiswa di Jalan Thamrin, Jakarta

Sumber: Hariman Siregar. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama

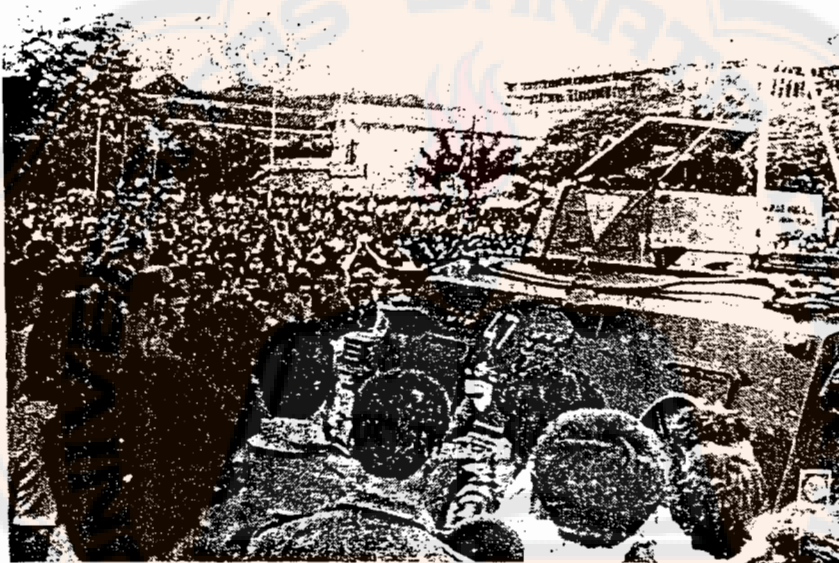
Lampiran 14



Hariman Siregar berada di tengah massa demonstran mahasiswa, Jakarta, 15 Januari 1974. (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

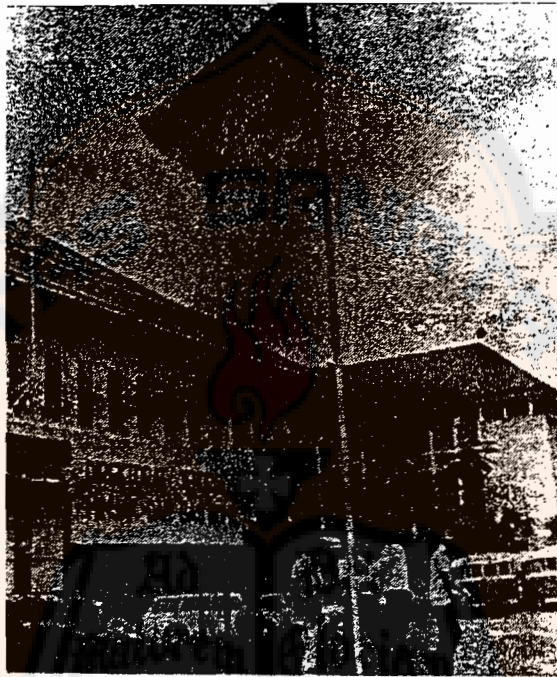
Lampiran 15



Aparat Keamanan/ABRI dari unsur RPPKAD mengadakan penjagaan ketat di sepanjang jalan Kramat Raya, Salemba Raya, dan di sekitar Kompleks Universitas Indonesia, Jakarta, 16 Januari 1974. (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

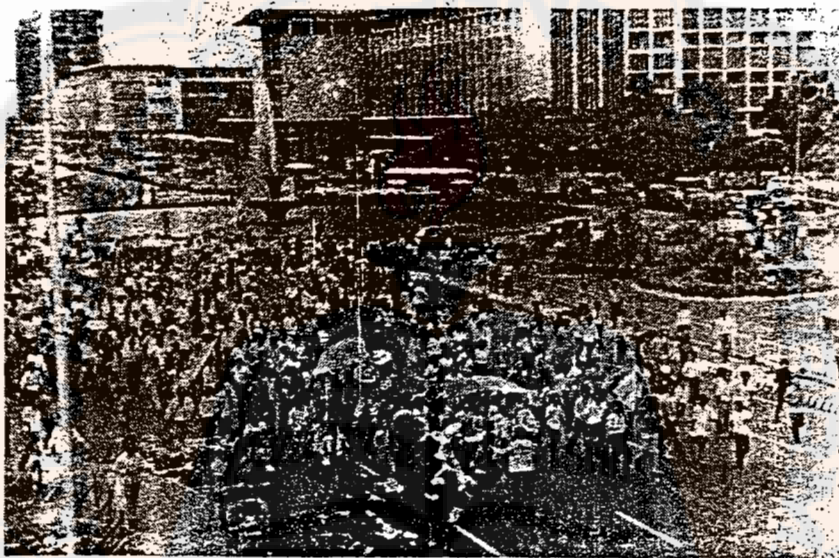
Lampiran 16



Beberapa orang mahasiswa menurunkan Sang Merah Putih menjadi setengah tiang, tanda berkabung. 15 Januari 1974. (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Lampiran 17



Kerumunan mahasiswa menuruni jalan-jalan Ibukota, mereka mengadakan demonstrasi tanggal 15 Januari 1974, di sepanjang jalan M.H. Thamrin (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Demo pelajar dan pemuda di Pecenongan, Jakarta, tempat penjualan mobil Jepang



Sumber: Hariman Siregar. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama



Demo di depan kantor pusat ASTRA, jalan Juanda, Jakarta

Sumber: Hariman Siregar. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama

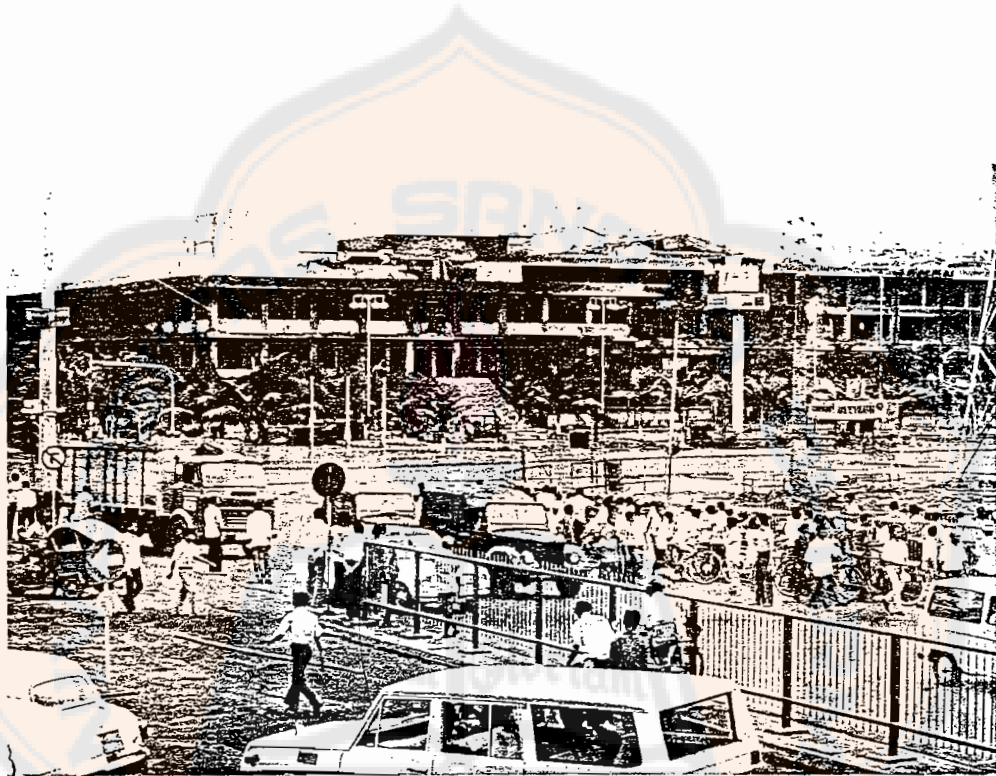
Lampiran 20



Massa yang mengamuk menjungkirbalikkan mobil di depan pertokoan Senen Jakarta Pusat (*Tempo*).

Sumber: Heru Cahyono. 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

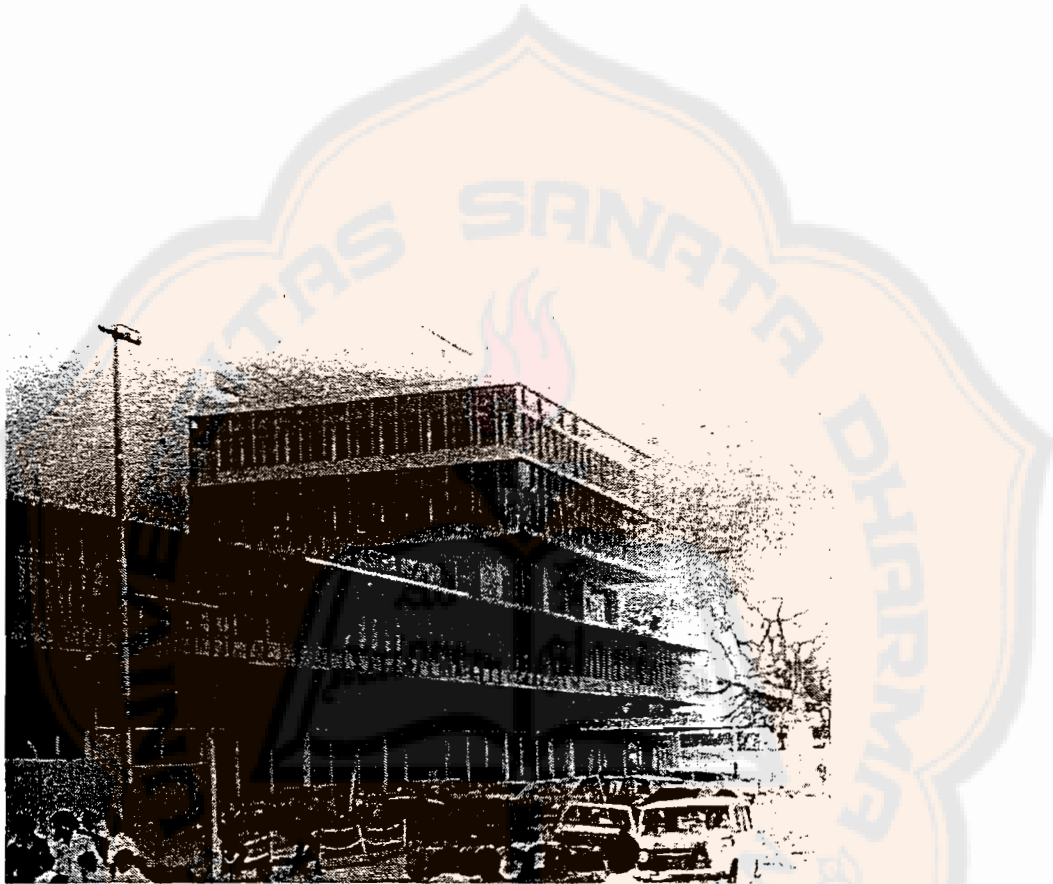
Lampiran 21



Kerusuhan tidak terbatas hanya pada luapan-luapan anti Jepang. Pusat pertokoan pasar Senen setelah diserbu dan dibakar, disertai dengan pencurian dan perampokan barang dagangan. Gerakan-gerakan pengrusakan juga dilakukan terhadap pabrik-pabrik, toko-toko, dan tempat-tempat umum di kota Jakarta. Gambar atas memperlihatkan pusat pertokoan pasar Senen setelah pembakaran dan pengrusakan itu.

Sumber: Nugroho Notosusanto (ed). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975*. Jakarta: PT Tira Pustaka

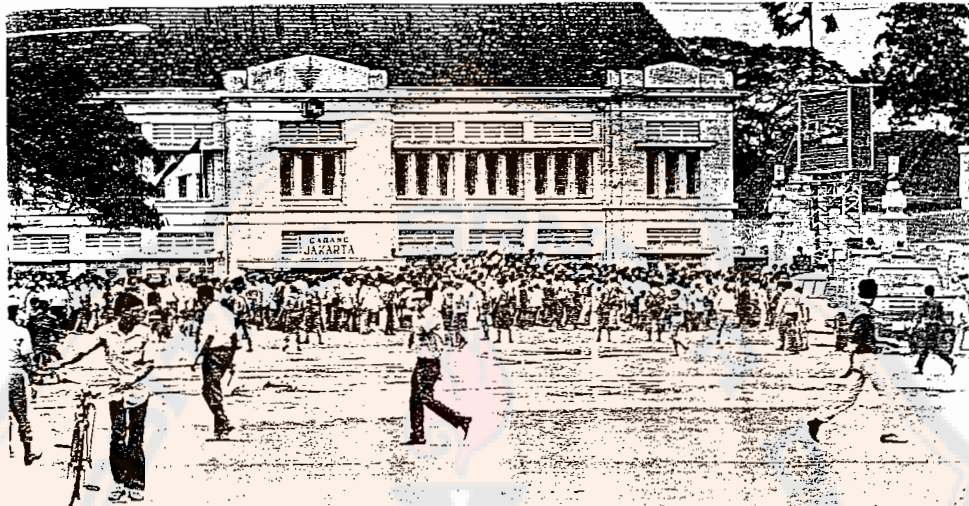
Lampiran 22



Gedung Toyota Astra yang hancur bersama dengan mobil-mobil dan kendaraan bermotor lainnya, Jakarta, 17 Januari 1974. (Dok. Idayu).

Sumber: Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980, Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Lampiran 23

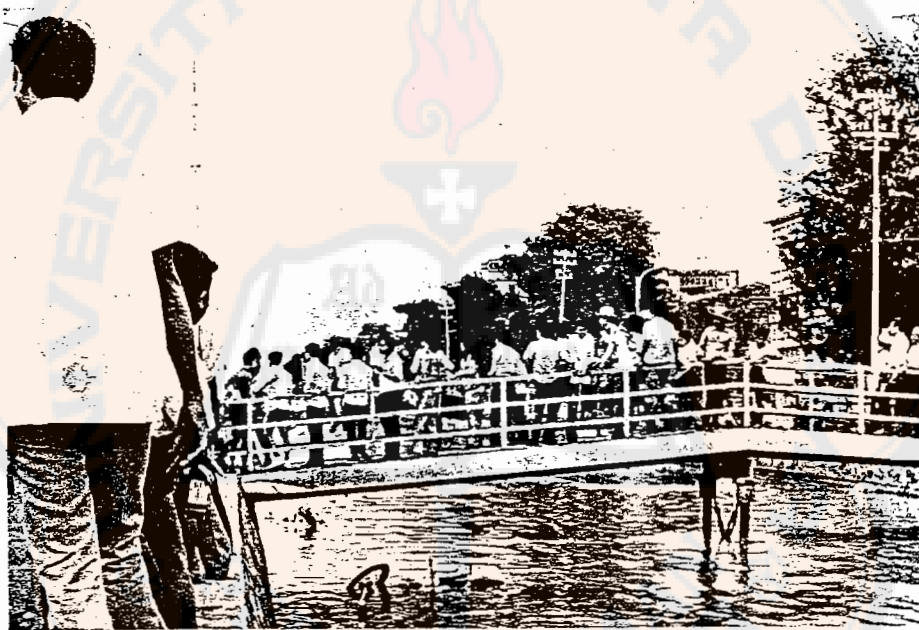


Kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang dikenal dengan nama "Peristiwa Malari". Kedua gambar ini menunjukkan keadaan di Harmoni dan di Jalan Ir. H. Juanda, tempat mobil-mobil buatan Jepang dirusak, digulingkan, dan dibakar. Kerusuhan seperti itu kemudian meluas di hampir-hampir seluruh pelosok kota Jakarta pada tanggal 15 Januari 1974.



Sumber: Nugroho Notosusanto (ed). 1980. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975*. Jakarta: PT Tira Pustaka

Lampiran 24



Di jalan Gajah Mada sepeda motor buatan Jepang dirampas begitu saja dari pemiliknya lalu dilemparkan ke Sungai Ciliwung.

Sumber: Nugroho Notokusanto (ed). 1980. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975*. Jakarta: PT Tira Pustaka

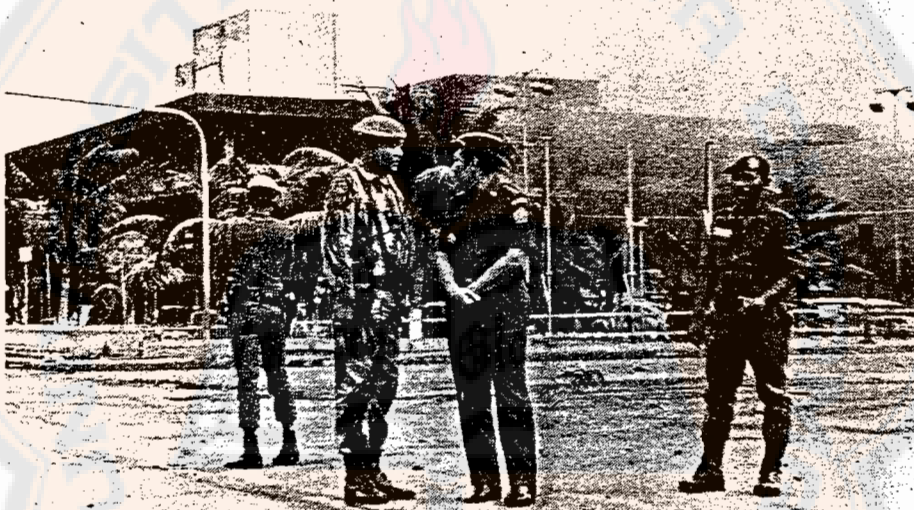
Lampiran 25



Pangkoptib Jenderal Sumitro menenangkan massa, 15 Januari 1974

Sumber: Hariman Siregar. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta: Mantika Media Utama

Lampiran 26



JENDRAL PANGGABEAN, ANAK BUAH, PROYEK SENIN YANG HANGUS

Sumber: *Tempo* 26 Januari 1974

Lampiran 27



ALI SADIKIN DI UI

Sumber: *Tempo* 26 Januari 1974

Lampiran 28

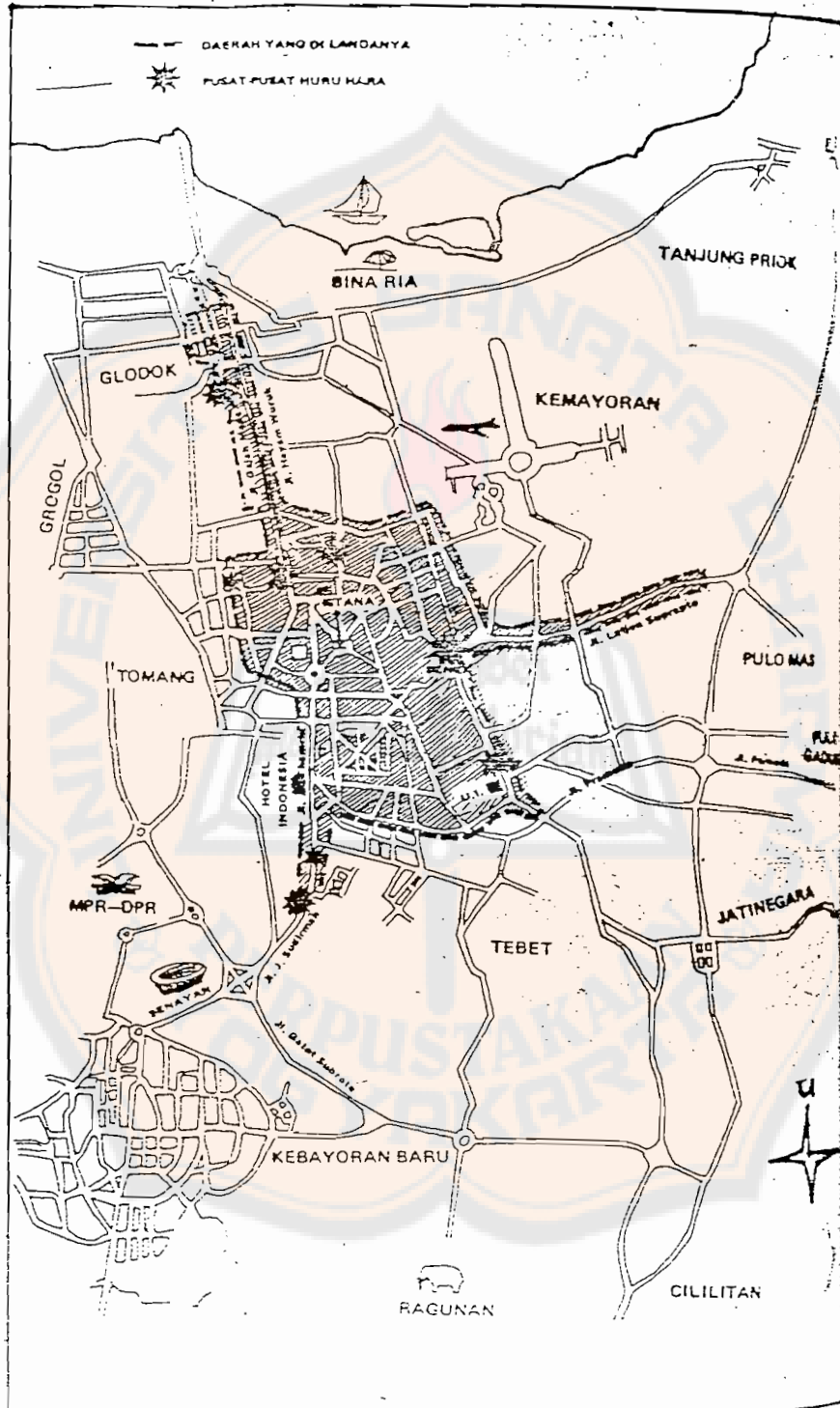


Pembakaran mobil di depan Universitas Indonesia pada peristiwa 15 Januari 1974 (*Tempo*).



Sumber: Heru Cahyono. 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

PETA DAERAH HURU-HARA



TEMPO, 26 JANUARI 1974